

Buku Referensi

# PILPRES

## 2024

ARENA PERTEMPURAN NARASI MENGGALI PERAN AGAMA,  
POLITIK DAN MEDIA DALAM MENANGKAL POLARISASI

Dr. Muhtar, S.Sos., M.A.





**BUKU REFERENSI**  
**PILPRES 2024**

**ARENA PERTEMPURAN NARASI MENGGALI  
PERAN AGAMA, POLITIK DAN MEDIA DALAM  
MENANGKAL POLARISASI**

**Dr. Muhtar, S.Sos., M.A.**



# **PILPRES 2024**

**ARENA PERTEMPURAN NARASI MENGGALI PERAN AGAMA,  
POLITIK DAN MEDIA DALAM MENANGKAL POLARISASI**

---

Ditulis oleh:

Dr. Muhtar, S.Sos., M.A.

Editor:

Dr. Muhtar, S.Sos., M.A.

---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

---



ISBN: 978-634-7012-74-6

IV + 215 hlm; 18,2 x 25,7 cm.

Cetakan I, Februari 2025

**Desain Cover dan Tata Letak:**

Ajrina Putri Hawari, S.AB.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**PT Media Penerbit Indonesia**

Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata

Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131

Telp: 081362150605

Email: [ptmediapenerbitindonesia@gmail.com](mailto:ptmediapenerbitindonesia@gmail.com)

Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>

Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



# 2024

## **KATA PENGANTAR**

---

Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia merupakan peristiwa yang sangat dinantikan dan memiliki dampak besar bagi masa depan negara. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan media sosial, narasi politik menjadi semakin kompleks dan beragam. Pemilu kali ini tidak hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana berbagai narasi dibentuk, dipertarungkan, dan diterima oleh publik.

Buku referensi ini membahas tiga elemen kunci yang berperan penting dalam Pilpres 2024: agama, politik, dan media. Ketiganya memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini publik dan memengaruhi hasil pemilu. Agama, sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sering kali digunakan sebagai alat politik untuk menarik dukungan. Politik, dengan segala dinamikanya, menjadi arena pertempuran ide dan kebijakan yang saling bersaing. Media, baik tradisional maupun digital, menjadi saluran utama dalam penyebaran informasi dan narasi politik.

Semoga buku referensi ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, peneliti, mahasiswa, jurnalis, politisi, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang dinamika politik kontemporer Indonesia.

Salam Hangat,

**Penulis**

# 2024

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Penulisan .....	24
<b>BAB II KONTEKS PILPRES 2024 .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum.....	37
B. Dinamika Politik.....	51
<b>BAB III PERAN AGAMA DALAM PILPRES 2024.....</b>	<b>73</b>
A. Pengaruh Tokoh Agama .....	73
B. Potensi Polarisasi Agama .....	84
<b>BAB IV PERAN POLITIK DALAM MENANGKAL POLARISASI.....</b>	<b>95</b>
A. Strategi Kampanye Anti-Polarisasi.....	95
B. Kebijakan dan Regulasi .....	113
<b>BAB V PERAN MEDIA DALAM PILPRES 2024 .....</b>	<b>127</b>
A. Media Sebagai Pengawal Demokrasi .....	127
B. Tantangan Media .....	141
C. Inisiatif Media dalam Menangkal Polarisasi .....	162
<b>BAB VI SINERGI ANTAR AGAMA, POLITIK, DAN MEDIA</b>	<b>171</b>
A. Kolaborasi untuk Menangkal Polarisasi .....	171
B. Contoh Kasus dan <i>Best Practices</i> .....	178

<b>BAB VII KESIMPULAN.....</b>	<b>191</b>
A. Ringkasan Peran Agama, Politik, dan Media .....	191
B. Rekomendasi untuk Menghadapi Pilpres 2024 .....	192
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>199</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>209</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>211</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>	<b>215</b>

# 2024

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1. <i>Illegal Logging</i> .....	13
Gambar 2. <i>Echo Chamber</i> .....	17
Gambar 3. <i>Internet Broadband</i> .....	45
Gambar 4. <i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i> .....	46
Gambar 5. <i>Kampanye Politik</i> .....	90
Gambar 6. <i>Federal Communications Commission</i> .....	133
Gambar 7. <i>Fast Checking</i> .....	137



# 2024

## BAB I

# PENDAHULUAN

---

---

Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia akan menjadi ajang pertempuran narasi yang kompleks dan dinamis, di mana peran agama, politik, dan media akan menjadi kunci dalam upaya menangkal polarisasi yang semakin tajam. Sebagai sebuah negara dengan keragaman budaya dan agama yang luar biasa, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan. Dalam konteks ini, dialog yang konstruktif, kampanye yang berfokus pada isu kebijakan, serta jurnalisme yang etis menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa proses demokrasi tidak tercederai oleh sentimen primordial dan disinformasi.

### A. Latar Belakang

#### 1. Pentingnya Pilpres 2024

Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia adalah momentum krusial yang memperlihatkan arah politik dan sosial negara ini dalam tahun-tahun mendatang. Dengan partisipasi yang meluas dari masyarakat, Pilpres ini bukan sekadar pesta demokrasi rutin, tetapi juga titik tolak bagi transformasi yang signifikan dalam peta politik Indonesia.

##### a. Menentukan Arah Kebijakan Nasional

Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia adalah momen krusial yang akan membentuk arah kebijakan nasional untuk lima tahun ke depan. Kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah yang terpilih akan memiliki dampak yang luas dan mendalam pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, visi dan misi kandidat presiden yang berhasil akan menjadi fokus utama dalam proses pemilihan ini. Presiden terpilih harus memiliki visi yang jelas tentang arah yang ingin dicapai oleh negara dalam jangka waktu yang akan datang. Visi ini haruslah

inklusif dan memperhatikan kebutuhan serta aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, visi tersebut juga harus mampu mengakomodasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Indonesia baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Kebijakan ekonomi akan menjadi salah satu fokus utama bagi presiden terpilih. Kebijakan ekonomi yang tepat dan proaktif dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini meliputi upaya untuk mendorong investasi, memperbaiki infrastruktur, mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi. Di samping itu, pendidikan dan kesehatan juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah terpilih. Investasi dalam bidang pendidikan akan membantu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten, sehingga dapat mendukung pembangunan jangka panjang Indonesia. Sementara itu, upaya untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat.

Presiden terpilih juga harus memperhatikan isu-isu lingkungan dan perubahan iklim. Dengan menghadapi ancaman perubahan iklim yang semakin nyata, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini termasuk upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi ekosistem yang rentan, dan mengadaptasi masyarakat terhadap perubahan lingkungan. Penguatan infrastruktur juga menjadi prioritas yang tidak bisa diabaikan. Infrastruktur yang baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta membuka akses ke daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, pemerintah terpilih harus memiliki rencana yang komprehensif untuk mengembangkan infrastruktur yang memadai di seluruh Indonesia.

Untuk menghadapi tantangan global, presiden terpilih juga harus mampu menjalankan diplomasi yang efektif. Kerja sama internasional yang baik akan membantu Indonesia dalam mengatasi berbagai tantangan di bidang politik, ekonomi, dan

keamanan. Hal ini meliputi upaya untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara mitra, berperan aktif dalam organisasi internasional, serta mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Selanjutnya, pemerintah terpilih juga harus memperhatikan masalah-masalah sosial yang berkembang di masyarakat. Hal ini termasuk upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial, melindungi hak asasi manusia, dan memperkuat keberagaman serta pluralisme di Indonesia. Penanganan isu-isu ini dengan bijaksana akan membantu memperkuat stabilitas sosial dan politik negara.

b. Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan

Stabilitas politik dan keamanan adalah dua aspek yang sangat penting dalam konteks pembangunan suatu negara. Pilpres 2024 di Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, karena proses ini tidak hanya menentukan pemimpin negara, tetapi juga mencerminkan kematangan demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Stabilitas politik adalah faktor penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketidakpastian politik dapat membuat investor ragu untuk menanamkan modalnya, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Pilpres 2024 harus dipandang sebagai kesempatan untuk menunjukkan kematangan demokrasi Indonesia dan memberikan kepastian bagi pelaku bisnis dan investor.

Proses pemilihan yang damai dan transparan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan lembaga-lembaga negara. Ketika masyarakat memiliki keyakinan bahwa pemerintah dipilih secara adil dan transparan, cenderung lebih mendukung pemerintah dan bekerja sama dalam upaya pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan bahwa Pilpres 2024 berjalan tanpa gangguan dan kecurangan sangat penting untuk mempertahankan stabilitas politik. Selanjutnya, Pilpres 2024 juga merupakan kesempatan untuk memperkuat keamanan nasional. Proses pemilihan yang lancar akan membantu mencegah terjadinya kerusuhan atau

konflik yang dapat membahayakan stabilitas keamanan negara. Presiden terpilih harus mampu memimpin aparat keamanan dalam menjaga ketertiban dan mengatasi potensi ancaman keamanan yang mungkin timbul selama masa transisi kekuasaan.

Pada konteks Indonesia yang multietnis dan multireligi, menjaga stabilitas politik juga berarti merawat kerukunan antarumat beragama dan antarsuku. Pilpres 2024 harus dijalankan dengan mengedepankan nilai-nilai pluralisme dan toleransi, sehingga tidak ada kelompok yang merasa terpinggirkan atau tidak diakui dalam proses politik. Hal ini akan membantu mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Selanjutnya, penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara transparan dan akuntabel. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan proses pemilihan akan membantu mengurangi peluang terjadinya kecurangan atau manipulasi. Lembaga-lembaga pengawas pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus diberikan kewenangan dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugas dengan efektif.

Pemerintah harus menjalankan peran aktif dalam meredam potensi konflik sosial dan politik selama masa transisi kekuasaan. Ini termasuk upaya untuk memfasilitasi dialog antarberbagai pihak dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Penanganan yang cepat dan tepat terhadap isu-isu sensitif juga dapat membantu mencegah eskalasi konflik. Selanjutnya, pendekatan inklusif dalam pembangunan kebijakan dan pengambilan keputusan dapat membantu mengurangi ketegangan politik. Presiden terpilih harus membuka ruang partisipasi bagi semua elemen masyarakat, termasuk oposisi, untuk berkontribusi dalam pembangunan negara. Ini akan membantu menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam memajukan bangsa.

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan juga penting dalam menjaga stabilitas politik. Pemerintah harus memiliki mekanisme yang efektif untuk memantau dampak kebijakan yang diterapkan dan merespons perubahan situasi

dengan cepat. Transparansi dalam pelaksanaan kebijakan akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penting untuk memperkuat kerja sama regional dan internasional dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan. Indonesia harus berperan aktif dalam forum-forum regional dan internasional untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama antarnegara. Kerja sama ini dapat membantu menghadapi berbagai tantangan keamanan yang bersifat lintas batas, seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan konflik regional.

c. Memperkuat Demokrasi dan Partisipasi Publik

Partisipasi publik dalam pemilihan presiden merupakan aspek yang sangat penting dalam memperkuat demokrasi. Pilpres 2024 di Indonesia tidak hanya menjadi sebuah acara politik, tetapi juga sebuah wujud dari kedaulatan rakyat yang dijalankan secara langsung. Dalam konteks ini, partisipasi publik yang tinggi menjadi indikator penting dari kesehatan demokrasi suatu negara. Pilpres 2024 memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mengekspresikan hak politiknya secara langsung dengan memilih calon presiden yang dianggap mampu mewakili aspirasi dan kepentingan. Partisipasi publik dalam proses ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya kontribusinya dalam menentukan arah dan kepemimpinan negara.

Partisipasi publik yang tinggi juga mencerminkan kualitas demokrasi suatu negara. Ketika masyarakat aktif terlibat dalam proses politik, baik melalui kampanye, pemilihan, atau diskusi publik, hal ini menandakan bahwa demokrasi berfungsi dengan baik dan memberikan ruang bagi pluralisme dan representasi yang lebih baik. Proses pemilihan yang adil dan transparan juga memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi. Ketika masyarakat memiliki keyakinan bahwa pemilihan dilakukan secara adil, tanpa intervensi atau kecurangan, akan lebih cenderung untuk aktif berpartisipasi dalam proses tersebut. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas.

Partisipasi publik yang tinggi dalam Pilpres 2024 juga memberikan legitimasi yang kuat bagi pemerintahan yang baru terpilih. Dengan partisipasi yang luas dari berbagai lapisan masyarakat, pemerintah yang terbentuk akan memiliki mandat yang kuat untuk menjalankan program-programnya. Hal ini akan membantu memperkuat kredibilitas dan legitimasi pemerintah di mata rakyat, sehingga dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan dukungan penuh dari masyarakat. Partisipasi publik yang tinggi juga dapat membantu memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa suaranya didengar dan dipertimbangkan dalam proses politik, hal ini akan memperkuat rasa memiliki dan kepercayaan terhadap pemerintah. Dengan demikian, partisipasi publik yang aktif dapat membantu membangun hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan rakyat.

Partisipasi publik yang tinggi juga menjadi dorongan bagi pertumbuhan budaya demokrasi di Indonesia. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam proses politik, akan lebih terampil dalam berdiskusi, bernegosiasi, dan menghargai pendapat orang lain. Hal ini akan membantu memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, seperti pluralisme, toleransi, dan dialog. Selain itu, partisipasi publik yang tinggi dalam Pilpres 2024 juga akan mendorong terciptanya pemimpin yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kepentingan rakyat. Dengan mengetahui bahwa masyarakat memperhatikan dan akan mengevaluasi kinerja, para pemimpin akan lebih cenderung untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dan menjalankan amanah yang telah diberikan oleh rakyat.

d. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Rakyat

Pemilihan Presiden tahun 2024 di Indonesia menjadi momentum krusial dalam menentukan arah kebijakan nasional yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup rakyat. Salah satu peran penting yang diemban oleh presiden terpilih adalah untuk menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini meliputi sejumlah aspek penting yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan kesejahteraan rakyat. Presiden yang efektif akan

memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, menciptakan kesempatan kerja yang adil, serta menjaga lingkungan agar bersih dan aman. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas merupakan fondasi utama bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Presiden terpilih harus mampu menyusun kebijakan pendidikan yang inklusif dan merata, sehingga setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas tanpa terkecuali. Program-program pendidikan yang efektif akan membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, sehingga dapat bersaing dalam pasar kerja global yang semakin kompetitif.

Layanan kesehatan yang baik juga merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat. Presiden terpilih harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang adil dan terjangkau terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan investasi dalam infrastruktur kesehatan, pelatihan tenaga medis, serta penyediaan obat-obatan dan peralatan medis yang memadai. Dengan demikian, masyarakat dapat mendapatkan perawatan yang baik dan terjangkau ketika sakit atau membutuhkan perawatan medis. Kemudian, kesempatan kerja yang adil juga merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat. Presiden terpilih harus mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga menciptakan lapangan kerja yang cukup dan layak bagi semua lapisan masyarakat. Program-program pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kecil dan menengah juga harus didorong, sehingga masyarakat dapat mandiri secara ekonomi dan meningkatkan taraf hidup.

Menjaga lingkungan yang bersih dan aman juga merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Presiden terpilih harus berkomitmen untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup dari degradasi dan kerusakan yang dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Langkah-langkah perlindungan lingkungan, seperti pengelolaan sampah yang baik, penghijauan kota, dan

pengendalian polusi udara dan air, harus diprioritaskan demi menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan hidup. Selain itu, penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial juga menjadi fokus penting dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat. Presiden terpilih harus mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, serta meningkatkan akses terhadap sumber daya dan peluang bagi yang berada di bawah garis kemiskinan. Program-program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil dan terpinggirkan harus didorong untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hasil pembangunan secara merata.

e. Membangun Hubungan Internasional yang Kuat

Pilpres 2024 tidak hanya penting untuk menentukan arah kebijakan nasional di Indonesia, tetapi juga untuk membangun hubungan internasional yang kuat dan strategis. Dalam era globalisasi yang semakin terhubung, hubungan internasional yang baik memiliki dampak yang signifikan pada kemajuan suatu negara dalam berbagai bidang, termasuk diplomasi, perdagangan, dan keamanan. Oleh karena itu, presiden yang terpilih harus mampu memperkuat hubungan dengan negara-negara lain serta berperan aktif dalam organisasi internasional, untuk menghadapi berbagai tantangan global dan regional. Penting bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi dengan negara-negara lain di tingkat bilateral dan multilateral. Hal ini dapat dilakukan melalui kunjungan kenegaraan, pertemuan bilateral, dan partisipasi aktif dalam forum-forum internasional. Presiden terpilih harus dapat menjalin hubungan yang baik dengan berbagai negara mitra, baik yang telah lama terjalin maupun yang baru potensial, untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, dan pertahanan.

Indonesia juga perlu berperan yang lebih aktif dalam organisasi-organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, dan G20. Dalam konteks ASEAN, Indonesia memiliki peran kunci sebagai negara pendiri dan

pemimpin regional. Presiden terpilih harus mampu memperkuat posisi Indonesia dalam ASEAN, untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, perdagangan internasional juga merupakan aspek penting dalam hubungan internasional Indonesia. Presiden terpilih harus memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara lain, serta membuka peluang akses pasar baru bagi produk-produk Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui negosiasi perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi dengan berbagai negara dan kawasan.

Pada bidang keamanan, Indonesia juga harus memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain untuk mengatasi berbagai tantangan keamanan yang kompleks, seperti terorisme, kejahatan lintas batas, dan konflik regional. Presiden terpilih harus mendorong kerjasama regional dan internasional dalam penanggulangan terorisme dan ekstremisme, serta memperkuat kerjasama maritim untuk menjaga keamanan di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga harus memperkuat diplomasi lingkungan untuk mengatasi masalah lingkungan global, seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Presiden terpilih harus berperan aktif dalam forum-forum internasional terkait lingkungan hidup, serta memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global.

f. Menjawab Tantangan Ekonomi dan Pembangunan

Perekonomian Indonesia merupakan salah satu aspek vital yang perlu mendapat perhatian serius dari presiden terpilih dalam Pilpres 2024. Tantangan ekonomi yang kompleks, termasuk ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan, menuntut kebijakan yang inovatif dan adaptif. Presiden yang terpilih harus memiliki visi ekonomi yang kuat untuk menjawab tantangan-tantangan ini, yang pada gilirannya akan memengaruhi kesejahteraan rakyat dan stabilitas nasional. Penting bagi presiden terpilih untuk mengelola sumber daya alam Indonesia dengan bijak. Indonesia kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak, gas, batubara, dan tambang lainnya. Namun, pengelolaan yang tidak berkelanjutan dapat

mengakibatkan degradasi lingkungan dan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, presiden terpilih harus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap industri ekstraktif, serta mempromosikan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam.

Peningkatan daya saing industri dalam negeri juga merupakan kunci untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Presiden terpilih harus mendorong investasi dalam inovasi dan teknologi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini akan memperkuat sektor-sektor industri kunci, seperti manufaktur, pertanian, dan pariwisata, sehingga mampu bersaing di pasar global dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Pengembangan ekonomi digital dan kreatif juga menjadi prioritas bagi presiden terpilih. Revolusi industri 4.0 telah mengubah lanskap ekonomi global, dengan teknologi digital dan internet berperan kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi digital dan kreatif, termasuk *e-commerce*, *fintech*, dan konten digital. Presiden terpilih harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor-sektor ini, dengan menyediakan infrastruktur digital yang memadai dan mendorong inovasi teknologi.

Pembangunan infrastruktur juga tetap menjadi prioritas dalam menjawab tantangan ekonomi dan pembangunan. Infrastruktur yang berkualitas akan mendukung konektivitas antar wilayah, meningkatkan efisiensi logistik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Presiden terpilih harus melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, termasuk jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, serta memastikan pengelolaan yang efisien dan transparan. Peningkatan investasi dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial juga penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Investasi dalam sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi, sementara peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

g. Mengelola Keragaman Sosial dan Budaya

Untuk menghadapi Pilpres 2024, pengelolaan keragaman sosial dan budaya menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh calon pemimpin. Indonesia, dengan keberagaman etnis, budaya, dan agama yang sangat luas, menuntut pendekatan yang bijaksana untuk memastikan bahwa keragaman ini menjadi kekuatan daripada sumber konflik. Pemimpin yang terpilih harus memiliki kemampuan untuk mempromosikan inklusivitas, menghormati hak-hak semua kelompok masyarakat, dan mencegah konflik yang dapat timbul akibat ketidaksetaraan atau diskriminasi. Penting bagi pemimpin terpilih untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan keberagaman dalam masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui promosi dialog antarbudaya dan kerjasama lintas-etnis. Dukungan untuk kegiatan budaya bersama, festival, dan acara komunitas dapat menjadi sarana yang efektif untuk mempererat hubungan antarwarga dari latar belakang yang berbeda. Dengan memperkuat kesadaran akan keberagaman, pemimpin dapat membangun fondasi yang kuat untuk harmoni sosial.

Pemimpin terpilih juga harus mendorong pembentukan kebijakan yang adil dan merata untuk semua warga negara. Ini mencakup pemberian hak-hak yang sama kepada semua kelompok masyarakat, termasuk akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan keadilan. Kebijakan yang inklusif akan membantu mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi antar kelompok, sehingga mendorong integrasi sosial yang lebih baik. Tidak kalah pentingnya, pemimpin terpilih harus secara tegas menolak segala bentuk diskriminasi, intoleransi, dan ekstremisme. Ini mencakup penindakan terhadap tindakan diskriminatif dan kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok minoritas atau rentan. Melalui langkah-langkah yang tegas dan konsisten, pemimpin dapat menegaskan komitmennya terhadap keadilan dan keberagaman dalam masyarakat.

Pada konteks ini, kerjasama antaragama juga menjadi faktor penting. Pemimpin terpilih dapat mempromosikan dialog antaragama dan kerjasama lintas kepercayaan untuk membangun

rasa saling pengertian dan kebersamaan di antara umat beragama. Program-program *interfaith* yang memfasilitasi pertemuan antar pemimpin agama, diskusi antarumat beragama, dan proyek bersama untuk kesejahteraan masyarakat dapat membantu memperkuat toleransi dan perdamaian antaragama. Selain itu, penting bagi pemimpin terpilih untuk mengadopsi pendekatan yang menghargai kearifan lokal dan budaya. Ini melibatkan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan. Dengan memperkuat otonomi lokal dan memberdayakan masyarakat setempat, pemimpin dapat memastikan bahwa keberagaman budaya dan tradisi tetap dihormati dan dilestarikan.

Pemimpin terpilih harus mengambil langkah konkret untuk memperbaiki akses dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua kelompok masyarakat. Ini termasuk perlindungan terhadap hak-hak minoritas, perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Melalui kebijakan yang inklusif dan penegakan hukum yang adil, pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua warga negara. Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemimpin terpilih dalam Pilpres 2024 dapat memperkuat keberagaman sosial dan budaya sebagai salah satu kekuatan utama Indonesia. Melalui promosi inklusivitas, penegakan keadilan, dan dialog antaragama, Indonesia dapat menjadi contoh bagi dunia dalam membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan berdampak dalam keberagaman.

#### h. Menghadapi Tantangan Lingkungan

Isu lingkungan merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia dalam Pilpres 2024. Perubahan iklim, deforestasi, polusi udara, dan masalah-masalah lingkungan lainnya membutuhkan perhatian serius dari calon pemimpin. Penting bagi pemimpin yang terpilih untuk memiliki komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan lingkungan, serta mampu mengimplementasikan kebijakan yang efektif dalam mengatasi tantangan ini. Pemimpin yang terpilih harus memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ini mencakup penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal yang merusak

lingkungan, seperti illegal logging dan penambangan ilegal. Selain itu, perlindungan terhadap hutan dan lahan gambut yang merupakan penyerap karbon alami juga harus menjadi fokus utama. Kebijakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan restorasi lahan gambut dapat membantu mengurangi emisi karbon dan menjaga keanekaragaman hayati.

Gambar 1. Ilegal Logging



Sumber: *Antara News*

Pemimpin yang terpilih harus mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon secara signifikan. Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat emisi karbon tertinggi di dunia perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Investasi dalam energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan efisiensi energi akan membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi jejak karbon negara. Selanjutnya, konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati juga harus menjadi prioritas dalam kebijakan lingkungan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk hutan hujan tropis yang merupakan habitat bagi berbagai spesies unik. Pemimpin yang terpilih harus memastikan bahwa konservasi ekosistem ini dilakukan dengan baik, termasuk melalui pembentukan dan pengelolaan taman nasional dan kawasan

konservasi lainnya. Selain itu, upaya pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam juga penting untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian alam dan kesejahteraan manusia.

Langkah-langkah ini harus didukung oleh komitmen untuk memperkuat kerjasama internasional dalam mengatasi masalah lingkungan. Indonesia harus aktif berpartisipasi dalam perjanjian dan inisiatif internasional yang bertujuan untuk melindungi lingkungan, seperti Persetujuan Paris tentang Perubahan Iklim. Kerjasama regional dan global dalam hal mitigasi perubahan iklim, konservasi lahan basah, dan pengelolaan perikanan dapat membantu Indonesia mengatasi tantangan lingkungan dengan lebih efektif. Kesadaran lingkungan dalam masyarakat juga harus ditingkatkan melalui pendidikan dan kampanye penyuluhan. Pemimpin yang terpilih harus mempromosikan literasi lingkungan di semua tingkatan pendidikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Kampanye informasi dan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat dapat membantu mengubah perilaku konsumen dan industri menuju praktek yang lebih ramah lingkungan.

i. Mengantisipasi Perubahan Teknologi dan Inovasi

Perubahan teknologi yang pesat membawa tantangan dan peluang bagi Indonesia dalam Pilpres 2024. Penting bagi pemimpin yang terpilih untuk mengantisipasi perubahan ini dan memanfaatkannya untuk kemajuan negara. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil termasuk:

- 1) Mendorong inovasi dalam berbagai sektor ekonomi. Pemimpin yang terpilih harus menggalakkan penelitian dan pengembangan teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industri Indonesia. Inovasi dalam bidang energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan manufaktur teknologi tinggi akan membantu negara memanfaatkan potensi ekonominya dengan lebih efisien.
- 2) Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemimpin yang terpilih harus

berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap internet dan teknologi digital. Investasi dalam penyediaan akses internet yang terjangkau dan berkualitas akan membantu mengurangi kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda.

- 3) Mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi era digital. Pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada teknologi akan membantu menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh perubahan teknologi. Program-program pelatihan dalam bidang teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan analitika data akan membantu meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja Indonesia.
- 4) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi *startup* dan industri teknologi. Pemimpin yang terpilih harus menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan ekosistem *startup* dan industri teknologi di Indonesia. Fasilitasi akses modal, peraturan yang jelas dan ramah *startup*, serta dukungan dalam hal riset dan pengembangan akan membantu meningkatkan daya saing Indonesia dalam ranah teknologi.
- 5) Memastikan bahwa perkembangan teknologi berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan. Pemimpin yang terpilih harus memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari perubahan teknologi. Kebijakan yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat akan membantu memastikan bahwa manfaat dari kemajuan teknologi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tanpa meninggalkan siapa pun.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemimpin yang terpilih dalam Pilpres 2024 dapat memastikan bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh perubahan teknologi. Pemanfaatan teknologi yang cerdas dan inklusif akan membantu negara mencapai pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## 2. Isu Polarisasi Dalam Politik Indonesia

Berikut adalah uraian mengenai isu polarisasi dalam politik Indonesia, dijabarkan dalam poin pembahasan utama dengan masing-masing sub-pembahasan:

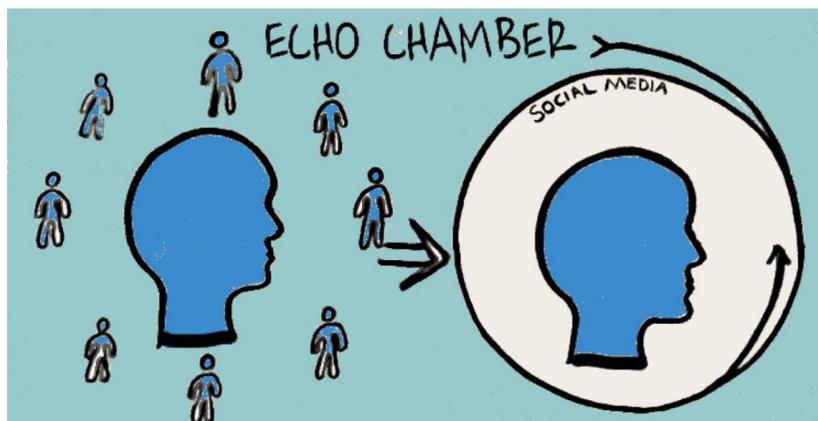
### a. Media Sosial dan Polarisasi

Media sosial telah menjadi kekuatan yang dominan dalam politik Indonesia, berperan krusial dalam menyebarkan informasi, memobilisasi massa, dan membentuk opini publik. Namun, seiring dengan keberhasilannya sebagai platform komunikasi, media sosial juga menjadi sumber utama polarisasi politik yang semakin memperdalam jurang antar kelompok. Dalam konteks Pilpres 2024, penting untuk memahami bagaimana media sosial mempengaruhi polarisasi politik di Indonesia. Media sosial telah menjadi ruang utama penyebaran informasi politik di Indonesia. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan berita dan pandangan politik. Kecepatan penyebaran informasi di media sosial seringkali melampaui media tradisional seperti televisi dan surat kabar. Namun, kemudahan ini juga membawa risiko tinggi penyebaran informasi yang belum terverifikasi atau bahkan *hoaks*.

Misinformasi dan *hoaks* menjadi ancaman serius dalam media sosial Indonesia. Isu-isu sensitif seperti agama, etnis, dan politik sering dimanipulasi untuk menyebarluaskan informasi palsu yang bertujuan untuk memperkuat pandangan tertentu atau merusak reputasi lawan politik. *Hoaks* semacam ini memicu ketegangan dan konflik antar kelompok, serta memperdalam polarisasi politik yang sudah ada. Selain itu, algoritma media sosial juga berperan dalam memperkuat polarisasi politik. Algoritma ini cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, menciptakan apa yang dikenal sebagai "*echo chamber*." Dalam *echo chamber*, pengguna hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan sendiri,

mempersempit ruang dialog dan memperkuat bias yang sudah ada. Hal ini membuat orang cenderung terpapar pada informasi yang memperkuat pandangan sendiri, tanpa terbuka pada perspektif yang berbeda.

Gambar 2. *Echo Chamber*



Ujaran kebencian juga menjadi masalah serius di media sosial Indonesia. Banyak individu dan kelompok menggunakan platform ini untuk menyebarkan pesan kebencian terhadap kelompok lain, baik berdasarkan agama, etnis, maupun orientasi politik. Sentimen negatif ini tidak hanya memperdalam jurang perbedaan antar kelompok, tetapi juga memicu konflik dan kekerasan. Untuk mengatasi masalah polarisasi politik yang disebabkan oleh media sosial, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan platform media sosial itu sendiri. Pertama, pemerintah perlu mengimplementasikan undang-undang dan regulasi yang mengatur penyebaran informasi di media sosial, serta memberlakukan sanksi bagi pelanggar. Penegakan hukum yang tegas terhadap penyebar *hoaks* dan ujaran kebencian penting untuk menekan aktivitas yang merusak ini.

Lembaga masyarakat sipil, seperti LSM dan organisasi advokasi, dapat berperan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan tentang literasi media kepada masyarakat. Program-program literasi media ini dapat membantu masyarakat untuk menjadi lebih kritis terhadap informasi yang diterima di media

sosial, serta mengajarkan cara memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya lebih jauh. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan platform media sosial juga diperlukan untuk mengembangkan algoritma yang lebih bertanggung jawab. Algoritma yang dirancang untuk memperluas perspektif pengguna dan meminimalkan efek dari *echo chamber* dapat membantu mengurangi polarisasi politik di media sosial.

Platform media sosial juga perlu mengambil tindakan proaktif dalam mengidentifikasi dan menghapus konten yang mengandung *hoaks*, ujaran kebencian, dan informasi palsu lainnya. Langkah-langkah ini akan membantu membatasi penyebaran informasi yang merugikan dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap polarisasi politik. Pada akhirnya, penyebaran informasi yang akurat, seimbang, dan bertanggung jawab akan menjadi kunci untuk mengurangi polarisasi politik yang disebabkan oleh media sosial. Dengan kerja sama lintas sektor dan upaya bersama dari semua pihak terkait, Indonesia dapat mencapai lingkungan media sosial yang lebih sehat dan konstruktif, yang mempromosikan dialog yang inklusif dan pemahaman yang lebih baik antar kelompok masyarakat.

b. Politik Identitas

Politik identitas telah menjadi salah satu faktor utama yang memperdalam polarisasi politik di Indonesia. Penggunaan agama, etnis, dan ras sebagai alat politik telah memicu ketegangan sosial dan memperburuk perpecahan antar kelompok. Dalam konteks Pilpres 2024, pemahaman yang mendalam tentang politik identitas dan dampaknya sangat penting untuk mengatasi polarisasi politik yang semakin meruncing di Indonesia. Agama sering kali dimanipulasi dalam politik sebagai alat untuk meraih dukungan politik. Sentimen agama dapat dimanfaatkan untuk memobilisasi massa dan menggalang basis dukungan politik. Misalnya, dalam kasus Pilkada DKI Jakarta 2017, isu agama menjadi sangat dominan, di mana calon dari agama yang berbeda digunakan sebagai kuda hitam untuk mendapatkan dukungan dari basis agama tertentu. Manipulasi sentimen agama ini tidak hanya memicu ketegangan antar

kelompok agama, tetapi juga memperdalam polarisasi politik di masyarakat.

*Tribalisme* politik juga merupakan fenomena yang umum terjadi di Indonesia. Masyarakat sering terjebak dalam "*tribalisme*" politik, di mana loyalitas terhadap kelompok identitas tertentu, seperti partai politik atau tokoh tertentu, mengalahkan rasionalitas politik. Hal ini mengakibatkan masyarakat lebih cenderung untuk mendukung kebijakan atau pandangan yang sesuai dengan identitas politik, tanpa mempertimbangkan secara objektif manfaat atau konsekuensi dari kebijakan tersebut. *Tribalisme* politik yang kuat memperkuat fragmentasi sosial dan memperburuk polarisasi di masyarakat. Selain agama, etnis dan ras juga sering dimanipulasi dalam politik sebagai alat untuk memecah belah masyarakat. Penggunaan isu-isu etnis atau rasial untuk keuntungan politik dapat memperkuat stereotip negatif dan memperdalam perpecahan sosial. Misalnya, kampanye politik yang membahas perbedaan etnis atau ras antara kandidat dapat memicu konflik antar kelompok dan memperdalam jurang antaranya. Dalam konteks yang lebih luas, politik identitas yang berlebihan berpotensi mengarah pada fragmentasi sosial yang lebih besar, di mana solidaritas nasional tergantikan oleh loyalitas terhadap kelompok identitas tertentu. Ini mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk menghadapi tantangan politik identitas, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mengurangi polarisasi politik dan mempromosikan persatuan di Indonesia. Penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memisahkan politik dari identitas pribadi. Pendidikan politik yang mempromosikan nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan inklusivitas dapat membantu mengubah persepsi masyarakat terhadap politik identitas. Partai politik dan pemimpin politik memiliki peran penting dalam mengurangi polarisasi politik, harus berupaya untuk memperkuat narasi yang inklusif dan memperkuat kesatuan nasional. Kolaborasi antar partai politik yang berbeda ideologi juga dapat membantu

mengurangi *tribalisme* politik dan memperkuat solidaritas nasional.

Media massa memiliki tanggung jawab besar dalam mengurangi polarisasi politik dengan memberikan liputan yang seimbang dan berimbang. Media harus berperan sebagai penyedia informasi yang objektif dan bertanggung jawab, serta menghindari sensasionalisme dan pembakaran opini. Pelatihan dan pembinaan jurnalis tentang etika jurnalistik dan tanggung jawab sosial juga penting dalam mengatasi polarisasi politik. Pemerintah perlu memperkuat institusi dan mekanisme yang mempromosikan inklusivitas dan partisipasi politik. Pembangunan infrastruktur politik yang inklusif, seperti dialog antaragama dan antarbudaya, dapat membantu mengurangi ketegangan dan konflik yang disebabkan oleh politik identitas. Masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam mengatasi polarisasi politik dengan memobilisasi dukungan untuk nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme. Gerakan masyarakat sipil yang kuat dapat menjadi kekuatan yang mendorong perubahan positif dalam arah politik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

c. Lemahnya Pendidikan Politik

Kurangnya pendidikan politik yang memadai merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi pada mudahnya masyarakat terpengaruh oleh narasi politik yang memecah belah. Dalam konteks politik Indonesia, masalah ini telah menjadi penyebab utama polarisasi dan ketegangan sosial yang semakin meningkat. Berikut adalah beberapa aspek yang membahas lemahnya pendidikan politik di Indonesia:

- 1) Kurangnya literasi politik di kalangan masyarakat menjadi masalah serius. Banyak orang Indonesia belum memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem politik dan proses demokrasi. Literasi politik yang rendah membuatnya lebih rentan terhadap manipulasi dan propaganda politik yang seringkali tersebar di berbagai media. Tanpa pemahaman yang cukup tentang bagaimana politik bekerja, masyarakat cenderung percaya begitu saja

pada narasi politik yang disajikan tanpa melakukan analisis kritis.

- 2) Ketidakmampuan untuk mencerna informasi dengan baik juga menjadi dampak dari kurangnya pendidikan politik yang memadai. Banyak orang sulit untuk memilah dan memverifikasi informasi yang diterima, terutama yang berasal dari media sosial. Akibatnya, lebih rentan terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan, provokatif, atau bahkan *hoaks*. Tanpa kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami informasi politik yang benar, masyarakat cenderung menjadi korban dari propaganda politik yang merugikan.
- 3) Pendidikan politik yang minim di institusi pendidikan formal juga menjadi masalah yang perlu diatasi. Sekolah-sekolah sering kali tidak memberikan perhatian yang cukup pada pendidikan politik, sehingga banyak generasi muda tidak terpapar pada prinsip-prinsip dasar demokrasi dan pentingnya partisipasi politik yang sehat. Hal ini membuatnya kurang siap untuk berperan sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam proses politik.

Untuk mengatasi lemahnya pendidikan politik di Indonesia, langkah-langkah konkret perlu diambil. Pertama-tama, pemerintah dan lembaga pendidikan harus meningkatkan literasi politik di kalangan masyarakat dengan menyediakan program-program pendidikan politik yang lebih luas dan terstruktur. Program-program tersebut harus mencakup materi-materi dasar tentang sistem politik, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta keterampilan analisis informasi politik. Selain itu, penting untuk meningkatkan keterampilan kritis dan analitis dalam menghadapi informasi politik. Pelatihan kritis berpikir dan literasi media harus diperkuat di semua tingkatan pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Masyarakat juga perlu diberikan keterampilan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang diterima, terutama di era digital di mana *hoaks* dan berita palsu mudah menyebar.

d. Ketidakpercayaan terhadap Institusi

Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi merupakan faktor penting yang memperkuat polarisasi politik di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja institusi, tetapi juga memengaruhi dinamika politik secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa aspek yang membahas ketidakpercayaan terhadap institusi dan dampaknya terhadap polarisasi politik:

- 1) Kepercayaan publik yang menurun terhadap institusi demokrasi menjadi salah satu isu utama. Masyarakat semakin merasa bahwa institusi-institusi seperti parlemen, partai politik, dan penegak hukum tidak lagi efektif dalam mewakili kepentingan. Penurunan kepercayaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk skandal korupsi, kegagalan dalam menangani masalah-masalah sosial, atau ketidakefektifan dalam menyampaikan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
- 2) Ketidakpercayaan ini kemudian memicu apatisme politik di kalangan masyarakat. Apatisme politik mengacu pada sikap acuh tak acuh atau kurangnya minat dalam berpartisipasi dalam proses politik. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi-institusi demokrasi, cenderung menjadi skeptis terhadap proses politik secara keseluruhan. Apatisme ini dapat mengakibatkan turunnya partisipasi dalam pemilihan umum, debat publik, atau diskusi politik lainnya, yang pada gilirannya memperburuk polarisasi karena kelompok-kelompok yang merasa diabaikan cenderung mencari alternatif ekstrem.
- 3) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam institusi-institusi demokrasi juga memperkuat persepsi bahwa korup dan tidak bisa dipercaya. Masyarakat merasa bahwa proses pengambilan keputusan di balik layar dan bahwa kepentingan tertentu lebih didahulukan daripada kepentingan publik secara keseluruhan. Ketidakpuasan

ini kemudian memperdalam polarisasi, karena kelompok-kelompok yang merasa ditinggalkan atau diabaikan semakin merasa bahwa sistem tidak adil dan tidak mewakili.

Untuk mengatasi ketidakpercayaan terhadap institusi, reformasi institusi menjadi sangat penting. Reformasi ini harus bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan representasi dalam institusi-institusi demokrasi. Pertama-tama, transparansi harus ditingkatkan melalui penyediaan informasi yang lebih terbuka tentang proses pengambilan keputusan dan penggunaan dana publik. Ini akan membantu membangun kepercayaan publik bahwa institusi bertindak secara jujur dan terbuka. Selanjutnya, akuntabilitas institusi harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan. Mekanisme pengawasan independen perlu diperkuat, dan pelanggaran etika atau hukum harus ditindak secara tegas. Hal ini akan membantu memulihkan kepercayaan publik bahwa institusi bertindak demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

e. Dampak Negatif Polarisasi Politik

Polarisasi politik memiliki berbagai dampak negatif yang signifikan bagi demokrasi, stabilitas nasional, dan persatuan bangsa. Polarisasi menghambat proses demokrasi yang sehat. Ketika perbedaan pendapat di antara kelompok politik menjadi terlalu tajam dan penuh permusuhan, proses dialog dan kompromi menjadi sulit. Hal ini dapat menghambat pembentukan kebijakan yang efektif dan menciptakan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Polarisasi politik dapat memicu ketegangan sosial dan konflik horizontal. Ketika perpecahan antara kelompok-kelompok politik menjadi semakin dalam, masyarakat menjadi rentan terhadap konflik yang bisa mengarah pada kekerasan dan instabilitas nasional. Konflik semacam ini dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan dan mengancam keamanan nasional.

Polarisasi politik juga dapat merusak rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ketika polarisasi mencapai tingkat yang tinggi, masyarakat terpecah belah berdasarkan identitas politik dan

ideologi. Solidaritas nasional melemah, dan fragmentasi sosial menjadi lebih parah. Ini bisa mengancam integrasi nasional dan merusak keutuhan bangsa. Polarisasi politik dapat menurunkan kualitas kebijakan publik. Ketika politik didominasi oleh pertarungan antar kelompok, kepentingan masyarakat seringkali terabaikan. Kebijakan publik yang dihasilkan mungkin kurang efektif dalam mengatasi masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Fokus politik yang terlalu memperhatikan pertarungan kekuasaan dapat mengesampingkan kepentingan publik yang lebih besar. Dalam konteks Indonesia, dampak-dampak negatif ini perlu diwaspadai karena dapat mengancam stabilitas dan kemajuan demokrasi. Penting bagi seluruh elemen masyarakat, terutama para pemimpin politik, untuk bekerja sama dalam mengurangi polarisasi dan membangun konsensus demi kepentingan bersama.

## **B. Tujuan Penulisan**

Pada konteks Pilpres 2024, arena pertempuran narasi menjadi semakin penting karena menggali peran agama, politik, dan media dalam menangkal polarisasi. Melalui penulisan ini, buku bertujuan untuk menguraikan peran masing-masing elemen ini dalam meredam polarisasi politik yang dapat mengancam stabilitas dan kemajuan demokrasi di Indonesia.

### **1. Menjelaskan Peran Agama, Politik, dan Media dalam Pilpres 2024**

Menjelaskan peran agama, politik, dan media dalam Pilpres 2024 adalah penting dalam memahami dinamika yang mempengaruhi pemilihan presiden di Indonesia. Buku ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana ketiga elemen ini mempengaruhi proses demokrasi, meningkatkan atau merusak kohesi sosial, dan menentukan hasil politik. Dalam uraian ini, akan membahas peran masing-masing elemen dan interaksinya dalam konteks Pilpres 2024.

#### **a. Peran Agama dalam Pilpres 2024**

Pada Pilpres 2024, peran agama akan menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam dinamika politik Indonesia.

Agama bukan hanya merupakan aspek kehidupan spiritual dan budaya, tetapi juga menjadi kekuatan politik yang signifikan, seringkali digunakan sebagai alat untuk memperkuat identitas politik dan memobilisasi massa. Agama telah lama menjadi bagian integral dari identitas politik di Indonesia. Sebagai negara dengan beragam agama, identitas keagamaan sering kali menjadi faktor penting dalam pilihan politik masyarakat. Dalam Pilpres 2024, diharapkan agama akan tetap menjadi salah satu identitas politik utama yang digunakan oleh kandidat untuk memperoleh dukungan. Kandidat yang dapat mengaitkan diri dengan nilai-nilai agama tertentu atau mendapatkan dukungan dari kelompok agama yang kuat kemungkinan akan memiliki keunggulan dalam kompetisi politik.

Organisasi keagamaan akan berperan penting dalam mobilisasi massa selama Pilpres 2024. Organisasi seperti NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jutaan anggotanya. Dalam pilpres sebelumnya, organisasi-organisasi ini telah terlibat dalam mendukung kandidat tertentu dan menggerakkan massa untuk memberikan dukungan. Dengan kehadiran organisasi keagamaan yang kuat, kandidat yang mampu memperoleh dukungan akan memiliki keunggulan strategis yang signifikan. Agama juga dapat memengaruhi kebijakan publik yang diusulkan oleh para kandidat. Dalam upaya untuk menarik pemilih, kandidat sering kali mempromosikan kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai agama mayoritas di Indonesia. Misalnya, isu-isu seperti pendidikan agama, hukum syariah, dan moralitas publik sering kali menjadi fokus dalam kampanye politik. Dalam Pilpres 2024, diskusi seputar peran agama dalam kebijakan publik dapat memengaruhi pandangan pemilih terhadap kandidat dan partai politik yang bersangkutan.

Penggunaan agama dalam politik juga memiliki potensi untuk memperdalam polarisasi sosial. Ketika agama digunakan sebagai alat untuk memecah belah masyarakat, hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antar kelompok. Contohnya adalah kasus-kasus polarisasi agama dalam pemilihan

umum sebelumnya, di mana isu-isu keagamaan digunakan untuk memperkuat dukungan politik dan memicu ketegangan di antara masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengawasi bagaimana agama digunakan dalam Pilpres 2024 dan dampaknya terhadap stabilitas sosial dan persatuan nasional. Dalam konteks ini, peran agama dalam Pilpres 2024 menjadi sangat penting untuk dipahami dan dianalisis. Identitas politik, mobilisasi massa, pengaruh terhadap kebijakan publik, dan potensi polarisasi adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat lebih baik memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Indonesia dalam menjalani proses demokrasi yang sehat dan inklusif.

b. Peran Politik dalam Pilpres 2024

Strategi kampanye menjadi kunci dalam memenangkan Pilpres 2024. Kandidat dan partai politik akan menggunakan berbagai pendekatan dan taktik untuk mengamankan dukungan dari pemilih. Salah satu strategi yang akan digunakan adalah penggunaan data pemilih untuk segmentasi kampanye. Dengan menganalisis data demografis dan preferensi politik pemilih, kandidat dan tim kampanye dapat menyusun pesan yang disesuaikan untuk berbagai segmen pemilih, meningkatkan efektivitas pesan yang disampaikan. Debat politik juga akan menjadi elemen penting dalam Pilpres 2024. Debat memberikan platform bagi kandidat untuk menyampaikan visi untuk masa depan Indonesia dan menjawab pertanyaan kritis dari publik dan media. Kemampuan kandidat untuk berkomunikasi dengan jelas dan meyakinkan selama debat dapat memiliki dampak signifikan pada persepsi pemilih. Oleh karena itu, persiapan yang matang dan kemampuan berbicara secara efektif akan menjadi kunci dalam memenangkan dukungan pemilih.

Pembentukan koalisi politik akan menjadi strategi penting dalam Pilpres 2024. Koalisi politik dapat memberikan kekuatan tambahan bagi kandidat dengan memperluas basis dukungan. Partai-partai politik perlu membentuk aliansi strategis untuk mengamankan dukungan yang cukup dalam pemilihan. Koalisi ini juga dapat mempengaruhi stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan setelah pemilu, karena partai-partai yang terlibat

dalam koalisi harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selain dinamika politik nasional, politik di tingkat lokal juga akan berpengaruh pada hasil Pilpres 2024. Kandidat yang mampu membangun dukungan di daerah-daerah penting akan memiliki keunggulan dalam memperoleh suara. Selain itu, isu-isu lokal yang diangkat selama kampanye dapat mempengaruhi hasil pemilihan di tingkat nasional, karena preferensi pemilih dapat dipengaruhi oleh isu-isu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

c. Peran Media dalam Pilpres 2024

Peran media dalam Pilpres 2024 sangatlah penting karena media memiliki kemampuan untuk memengaruhi persepsi publik, menentukan agenda politik, dan menyebarkan informasi yang krusial bagi pemilih. Dalam konteks ini, peran media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar tetap menjadi sumber informasi utama bagi sebagian besar masyarakat, sementara media baru seperti media sosial dan platform digital semakin berperan yang signifikan dalam menyampaikan pesan politik. Salah satu fungsi utama media dalam Pilpres 2024 adalah agenda *setting* dan *framing*, di mana media memilih isu-isu yang akan diberitakan dan cara pandang yang akan diberikan kepada isu-isu tersebut. Dalam hal ini, media memiliki kekuatan untuk mengarahkan perhatian publik pada isu-isu tertentu yang dianggap penting oleh pihak media. Bagaimana isu-isu ini diinterpretasikan dan dipresentasikan oleh media juga akan memengaruhi cara pandang publik terhadap kandidat dan partai politik yang bersangkutan.

Media juga berperan dalam penyebaran informasi dan disinformasi. Media sosial, khususnya, telah menjadi saluran utama bagi penyebaran informasi politik, namun juga menjadi tempat di mana disinformasi dan *hoaks* dapat berkembang dengan cepat. Algoritma media sosial yang cenderung memperkuat konten yang sesuai dengan preferensi pengguna sering kali menciptakan "*echo chamber*" di mana pengguna hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan, memperkuat polarisasi dan mengurangi ruang untuk dialog yang konstruktif. Namun, di sisi lain, jurnalisme investigatif juga

berperan penting dalam memeriksa dan mengawasi proses pemilu. Peliputan yang mendalam dan investigatif dapat mengungkap praktik korupsi, pelanggaran etika, atau penyelewengan yang terjadi selama kampanye. Dalam Pilpres 2024, keberadaan jurnalisme investigatif yang bebas dan berdedikasi akan menjadi penjaga demokrasi yang penting, membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan memastikan integritas proses pemilihan.

d. Interaksi Agama, Politik, dan Media dalam Pilpres 2024

Interaksi antara agama, politik, dan media dalam konteks Pilpres 2024 membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika politik, persepsi publik, dan stabilitas sosial. Memahami bagaimana ketiga entitas ini saling berinteraksi menjadi kunci dalam mengelola polarisasi dan memastikan proses pemilihan yang adil dan demokratis. Sinergi antara agama, politik, dan media sering kali memberikan kekuatan tambahan bagi kandidat atau partai politik. Penggunaan media oleh tokoh agama untuk mendukung kandidat tertentu, misalnya, dapat memberikan kekuatan besar dalam memobilisasi massa dan menggalang dukungan. Namun, interaksi semacam ini juga dapat menimbulkan konflik, terutama jika penggunaan agama dalam politik dipandang sebagai manipulatif atau tidak etis oleh sebagian masyarakat.

Pemberitaan media juga berperan penting dalam membentuk persepsi publik tentang kandidat, partai politik, dan isu-isu politik yang terkait dengan agama. Cara media melaporkan isu-isu ini dapat mempengaruhi cara pandang dan sikap pemilih, yang pada gilirannya dapat memengaruhi hasil pemilihan. Oleh karena itu, penting bagi media untuk menjalankan tugas dengan integritas dan obyektivitas untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat dan berimbang. Namun, terdapat juga potensi risiko dalam interaksi antara agama, politik, dan media. Kampanye negatif yang memanfaatkan sentimen agama atau politik dapat memperdalam polarisasi dan menciptakan ketegangan sosial. Media sosial khususnya menjadi platform yang rentan untuk penyebaran ujaran kebencian dan *hoaks* yang dapat memperburuk situasi.

Pengawasan terhadap kampanye negatif dan upaya untuk mempromosikan kampanye yang bersifat inklusif dan positif akan sangat penting dalam mengelola risiko ini.

e. Mengatasi Polarisasi dalam Pilpres 2024

Mengatasi polarisasi dalam Pilpres 2024 memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu strategi utama adalah melalui dialog antar kelompok. Tokoh agama, politisi, dan media perlu secara aktif memfasilitasi dialog yang inklusif dan konstruktif antara berbagai kelompok masyarakat. Dalam dialog ini, perbedaan pendapat dapat dipertukarkan dengan saling mendengarkan dan memahami perspektif satu sama lain. Ruang dialog seperti ini dapat membantu meredakan ketegangan dan memperkuat pemahaman lintas kelompok. Selain itu, penting untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi dan inklusivitas sebagai bagian dari upaya mengatasi polarisasi. Kampanye publik dan program pendidikan dapat digunakan untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya menghargai keragaman dan membangun masyarakat yang inklusif. Pendidikan di sekolah-sekolah juga dapat berperan kunci dalam memperkenalkan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda.

Regulasi terhadap media sosial juga menjadi bagian penting dari upaya mengurangi polarisasi. Platform media sosial sering menjadi sumber utama penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian yang memperdalam jurang polarisasi. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan regulasi yang tepat sangat penting. Regulasi ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga mempromosikan kebebasan berbicara sambil melindungi masyarakat dari konten yang merugikan. Selanjutnya, peningkatan literasi politik di masyarakat juga menjadi kunci dalam mengatasi polarisasi. Masyarakat perlu dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai tentang sistem politik, hak-hak warga negara, dan pentingnya partisipasi politik yang sehat. Pendidikan politik yang komprehensif akan membantu masyarakat menjadi pemilih yang lebih kritis dan mampu memahami implikasi dari pilihan politik.

Penting untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi yang bertugas mengawasi proses pemilihan. Lembaga pemilu dan lembaga pengawas pemilu perlu diberdayakan untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil dan transparan. Pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran dan manipulasi selama kampanye akan membantu memperkuat integritas pemilihan dan mencegah polarisasi yang lebih lanjut. Selanjutnya, partai politik juga memiliki peran penting dalam mengatasi polarisasi perlu menghindari kampanye yang bersifat divisif dan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dalam berkomunikasi dengan pemilih. Kolaborasi antar partai politik untuk menciptakan platform yang lebih luas dan mengatasi isu-isu yang mendasar juga dapat membantu memperkuat persatuan di tengah masyarakat.

Penting juga untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam memantau dan memperjuangkan demokrasi yang sehat. Organisasi masyarakat sipil, seperti LSM dan kelompok advokasi, dapat membantu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan mengawasi perilaku politik yang merugikan. Melalui partisipasi aktif dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain, masyarakat sipil dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan proses pemilihan yang adil dan demokratis. Pendekatan yang berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi polarisasi dalam jangka panjang. Upaya-upaya ini harus terus dilakukan tidak hanya selama periode kampanye, tetapi juga dalam pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis. Dengan demikian, Pilpres 2024 dapat menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan merajut kembali jalinan sosial yang terkoyak oleh polarisasi politik.

## **2. Mengidentifikasi cara-cara menanggulangi polarisasi**

Menanggulangi polarisasi politik adalah tantangan yang kompleks, namun sangat penting untuk menjaga kohesi sosial dan stabilitas demokrasi. Berbagai ahli telah mengidentifikasi sejumlah strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi polarisasi. Berikut ini adalah uraian dari berbagai cara menanggulangi polarisasi politik berdasarkan referensi yang valid.

a. Pendidikan Politik dan Literasi Media

Pendidikan politik memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi polarisasi politik dalam masyarakat. Norris (2011) membahas bahwa pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik dan peran individu dalam proses demokrasi dapat membantu mengurangi ketegangan yang muncul dari perbedaan pandangan politik. Ketika warga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang proses politik, cenderung lebih mampu berpartisipasi secara efektif dan merespons isu-isu politik dengan lebih bijaksana. Selain itu, literasi media juga menjadi faktor penting dalam mengatasi polarisasi politik. Hobbs (2010) menekankan bahwa literasi media memungkinkan masyarakat untuk secara kritis mengevaluasi informasi yang diterima dari berbagai sumber media. Dengan kemampuan untuk mengidentifikasi bias dan disinformasi, individu lebih mungkin dapat menghindari jebakan berita palsu yang sering kali menjadi alat untuk memperdalam polarisasi.

Program pendidikan politik dan literasi media dapat diperkuat melalui berbagai strategi pendidikan formal dan informal. Di sekolah-sekolah, pendidikan politik dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik kepada generasi muda. Materi-materi tersebut dapat mencakup penjelasan tentang struktur pemerintahan, proses pemilihan, dan pentingnya partisipasi politik yang sehat. Di samping itu, program literasi media dapat diselenggarakan di sekolah-sekolah dan juga di luar lingkungan pendidikan formal. Kelompok-kelompok masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa dapat bekerja sama untuk menyelenggarakan *workshop* dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengevaluasi informasi yang diterima dari media.

Kampanye publik juga dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan politik dan literasi media. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat mengorganisir acara-acara penyuluhan dan menyebarkan materi-materi edukatif melalui media massa dan

platform *online*. Melalui kampanye yang terarah dan berkelanjutan, kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi politik dan media dapat ditingkatkan secara signifikan. Selanjutnya, kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta juga dapat memperkuat upaya dalam meningkatkan pendidikan politik dan literasi media. Program-program ini dapat didukung oleh sumber daya dan teknologi yang dimiliki oleh sektor swasta, sementara pemerintah dapat memberikan regulasi dan arahan untuk memastikan bahwa pendidikan politik dan literasi media mencapai target yang diinginkan.

b. Dialog dan Kolaborasi Antar Kelompok

Dialog dan kolaborasi antar kelompok memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi polarisasi politik dalam masyarakat. Menurut teori kontak sosial yang dikemukakan oleh Allport (1954), interaksi langsung antar kelompok yang berbeda dapat mengurangi prasangka dan meningkatkan pemahaman satu sama lain. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam berbagai konteks, termasuk dalam mengatasi polarisasi politik. Program dialog antar kelompok yang difasilitasi secara terstruktur dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi kontak sosial yang positif dan membangun saling pengertian. Misalnya, dalam konteks Pilpres 2024, program dialog antar kelompok politik yang berbeda pandangan dapat menjadi sarana untuk membuka ruang diskusi yang konstruktif dan mengurangi ketegangan antar kelompok. Melalui dialog ini, anggota masyarakat dari berbagai latar belakang politik dapat bertemu, berbagi pandangan, dan mencari titik-titik persamaan. Hal ini dapat membantu memperkuat rasa saling pengertian dan mengurangi ketegangan yang mungkin muncul akibat perbedaan pendapat politik.

Kolaborasi dalam proyek-proyek bersama juga dapat menjadi cara yang efektif untuk mengatasi polarisasi politik. Proyek-proyek ini dapat berupa kegiatan komunitas, proyek pembangunan, atau program sosial yang melibatkan partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat. Melalui kolaborasi ini, anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk bekerja sama secara langsung, membangun kepercayaan, dan menghargai

perbedaan satu sama lain. Penelitian oleh Hewstone dan Swart (2011) menunjukkan bahwa kerja sama dalam proyek-proyek komunitas dapat membantu mengurangi prasangka dan memperkuat hubungan antar kelompok yang berbeda. Dengan bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk melihat satu sama lain sebagai mitra dalam pembangunan masyarakat, bukan sebagai lawan politik yang harus dilawan.

c. Peran Media dalam Menyajikan Informasi yang Seimbang

Pada konteks Pilpres 2024, peran media dalam menyajikan informasi yang seimbang sangat penting untuk mengurangi polarisasi politik yang mungkin terjadi di masyarakat. Jurnalisme yang berkualitas dan independen merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai tujuan ini. Kovach dan Rosenstiel (2007) menekankan pentingnya jurnalisme yang berfokus pada verifikasi fakta dan penyajian konten yang mendalam serta berimbang. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip ini, media dapat membantu menghindari penyebaran informasi yang bias atau tidak akurat yang dapat memperdalam polarisasi. Regulasi media sosial juga menjadi faktor penting dalam upaya menyajikan informasi yang seimbang. Algoritma media sosial sering kali cenderung memperkuat bias pengguna dengan menampilkan konten yang sesuai dengan pandangan, menciptakan apa yang disebut sebagai "*echo chamber*". Sunstein (2017) menyarankan bahwa platform media sosial dapat memperkenalkan algoritma yang mempromosikan konten dari berbagai perspektif untuk menghindari efek ini. Dengan memastikan bahwa pengguna media sosial terpapar pada berbagai sudut pandang, dapat mengurangi polarisasi dan membantu menciptakan lingkungan informasi yang lebih seimbang.

Transparansi dalam penyajian informasi juga merupakan faktor penting. Media harus mengungkapkan sumber informasi dengan jelas dan memberikan konteks yang memadai untuk setiap berita yang disampaikan. Dengan demikian, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih berdasarkan fakta dan pemahaman yang komprehensif. Tidak hanya itu, partisipasi

masyarakat dalam mengonsumsi informasi juga sangat penting. Masyarakat harus dilatih untuk menjadi pembaca yang kritis, mampu mengevaluasi dan memilah informasi yang diterima. Pendidikan literasi media, seperti yang disarankan oleh Hobbs (2010), dapat membantu masyarakat mengembangkan kemampuan ini. Dengan meningkatkan literasi media, masyarakat dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi informasi yang tidak akurat atau bias, sehingga mengurangi dampak polarisasi.

Diversifikasi sumber informasi juga merupakan langkah yang penting dalam mengurangi polarisasi. Masyarakat harus diberikan akses pada berbagai sumber informasi yang dapat memberikan sudut pandang yang beragam. Pemerintah dan lembaga terkait dapat berperan penting dalam memfasilitasi akses ini, baik melalui kebijakan atau program-program pendidikan. Peran lembaga pemantau media juga tidak bisa diabaikan. Lembaga-lembaga ini dapat membantu memastikan bahwa media mematuhi standar etika jurnalistik dan menyajikan informasi secara berimbang. Dengan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada media, lembaga pemantau dapat membantu mendorong media untuk meningkatkan kualitas dan keberimbangan dalam penyajian informasi.

d. Kebijakan Publik yang Inklusif

Kebijakan publik yang inklusif adalah kunci dalam upaya mengurangi polarisasi dalam konteks Pilpres 2024. Menurut Putnam (2000), kebijakan yang adil dan inklusif membantu mengurangi rasa ketidakadilan yang sering kali menjadi sumber polarisasi dalam masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya menjamin keadilan sosial dan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa semua kelompok masyarakat merasa terwakili dan diperhatikan oleh pemerintah. Dengan demikian, kebijakan publik yang inklusif dapat membantu memperkuat kohesi sosial dan meminimalkan konflik yang mungkin timbul karena ketidakpuasan. Proses dialog kebijakan menjadi sangat penting dalam memastikan inklusivitas dalam pengambilan keputusan publik. Fung (2006) menekankan bahwa partisipasi publik yang terstruktur dengan baik dalam proses pembuatan kebijakan dapat

mengurangi polarisasi dengan memberikan kesempatan kepada berbagai kelompok masyarakat untuk menyuarakan kepentingan dan pandangan. Melalui dialog yang terbuka dan inklusif, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memperhitungkan berbagai perspektif dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Kebijakan yang berfokus pada peningkatan akses dan kesetaraan juga dapat membantu mengurangi polarisasi. Misalnya, kebijakan pendidikan yang inklusif, yang memastikan akses yang sama untuk semua individu tanpa memandang latar belakang atau status sosial, dapat membantu mengurangi kesenjangan dan memperkuat persatuan dalam masyarakat. Dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan negara, kebijakan ini dapat membantu mengurangi ketegangan sosial dan politik. Selanjutnya, kebijakan yang mempromosikan kerjasama antar kelompok masyarakat juga dapat membantu mengurangi polarisasi. Misalnya, program-program pembangunan yang melibatkan partisipasi lintas kelompok, seperti proyek-proyek pembangunan infrastruktur komunitas atau program-program pemberdayaan ekonomi yang inklusif, dapat membantu memperkuat hubungan antar kelompok dan membangun kepercayaan satu sama lain. Dengan meningkatkan interaksi positif antar kelompok masyarakat, kebijakan ini dapat membantu mengurangi konflik dan polarisasi yang mungkin terjadi.

e. Peran Pendidikan dan Sosialisasi di Keluarga

Pendidikan dan sosialisasi di keluarga berperan penting dalam membentuk sikap politik individu sejak dini. Menurut Dewey (1916), pendidikan di sekolah haruslah mencakup pembelajaran tentang pentingnya dialog, toleransi, dan kerjasama, sehingga siswa dapat memahami nilai-nilai demokratis dan menjadi warga negara yang aktif dan berpikiran terbuka. Selain itu, keluarga juga memiliki peran yang sangat penting dalam sosialisasi politik. Penelitian oleh Jennings dan Niemi (1974) menunjukkan bahwa orientasi politik orang tua sangat mempengaruhi pandangan politik anak-anak. Oleh karena

itu, orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak dalam mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan. Pendidikan politik di keluarga dapat dimulai dengan memberikan pemahaman dasar tentang sistem politik dan demokrasi kepada anak-anak. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi tentang berita politik atau peristiwa-peristiwa politik yang terjadi. Dengan memberikan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai demokrasi dan pentingnya partisipasi politik, keluarga dapat membantu membentuk sikap yang kritis dan terbuka terhadap berbagai pandangan politik.

Keluarga juga dapat membentuk sikap politik anak-anak melalui contoh yang diberikan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua dapat menunjukkan sikap yang toleran, terbuka, dan menghargai perbedaan pendapat. Dengan memberikan contoh yang baik, anak-anak akan lebih cenderung mengadopsi nilai-nilai tersebut dan menjadi individu yang lebih toleran dan terbuka terhadap perbedaan. Penting juga untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan di keluarga. Dengan melibatkannya dalam proses ini, anak-anak akan belajar tentang pentingnya mendengarkan pendapat orang lain, menghormati perbedaan pendapat, dan mencapai kesepakatan bersama.

Orang tua juga perlu memperhatikan dampak media massa terhadap sikap politik anak-anak. Menurut Wright *et al.* (1995), anak-anak rentan terhadap pengaruh media dalam membentuk sikap dan nilai-nilai. Oleh karena itu, penting untuk mengajarkan anak-anak tentang bagaimana menyaring informasi yang diterima dari media massa dan untuk mengajarkan untuk memiliki sikap yang kritis terhadap informasi yang diterima. Selanjutnya, penting untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya partisipasi politik yang sehat dan bertanggung jawab. Dalam masyarakat demokratis, partisipasi politik adalah hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. Dengan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya partisipasi politik, akan lebih cenderung menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.

# 2024

## BAB II

### KONTEKS PILPRES 2024

Pada konteks Pilpres 2024, di mana ketegangan politik dan polarisasi mencapai puncaknya, tantangan untuk mempertahankan stabilitas demokrasi dan memastikan proses pemilihan yang adil dan inklusif menjadi semakin mendesak. Dengan dinamika yang kompleks dari peran agama, politik, media, dan faktor sosial lainnya, upaya untuk mengatasi polarisasi dan mempromosikan dialog yang konstruktif menjadi esensial bagi kesejahteraan demokrasi Indonesia.

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Calon-Calon Presiden Dan Wakil Presiden

Pemilu Presiden 2024 di Indonesia menghadirkan tiga pasangan calon yang masing-masing membawa visi, misi, serta latar belakang yang berbeda. Para calon ini diharapkan dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Berikut adalah uraian lengkap mengenai para calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

###### a. Calon No Urut 1

###### **Anies Rasyid Baswedan - Calon Presiden**

Anies Rasyid Baswedan, lahir di Kuningan pada tanggal 7 Mei 1969, adalah seorang politisi dan akademisi dengan karir yang cemerlang. Pada usia 54 tahun, ia telah mengukir banyak prestasi, baik di bidang pendidikan maupun politik. Karir Anies dimulai dari dunia akademis. Ia pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina dari tahun 2007 hingga 2013. Di bawah kepemimpinannya, Universitas Paramadina berkembang pesat dengan berbagai program inovatif yang menghubungkan dunia akademik dengan praktik nyata di masyarakat. Pada tahun 2014, Anies diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Selama menjabat, Anies

dikenal dengan berbagai kebijakan progresifnya, seperti program "Indonesia Mengajar" yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil. Setelah itu, Anies terjun ke dunia politik praktis dengan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dan menjabat sebagai Gubernur dari 2017 hingga 2022. Selama masa jabatannya, Anies dikenal dengan berbagai kebijakan populis seperti revitalisasi trotoar, pembangunan stadion internasional, dan berbagai program sosial lainnya yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta.

### **Muhaimin Iskandar - Calon Wakil Presiden**

Abdul Muhaimin Iskandar, atau lebih dikenal sebagai Cak Imin, lahir di Jombang pada tanggal 24 September 1966. Usianya yang kini 57 tahun tidak menghalangi semangatnya dalam berpolitik. Muhaimin memiliki rekam jejak panjang di dunia politik Indonesia. Muhaimin memulai karir politiknya sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2004-2009. Dalam kapasitas ini, ia berperan penting dalam berbagai legislasi penting yang mengarah pada reformasi di berbagai sektor. Selanjutnya, ia diangkat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 2009 hingga 2014, di mana ia fokus pada peningkatan kesejahteraan pekerja dan program transmigrasi yang lebih berkelanjutan. Sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selama dua periode (2005-2010 dan 2019-2024), Muhaimin berhasil memperkuat posisi PKB di kancah politik nasional. Selain itu, ia kembali menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024, di mana ia berfokus pada pengawasan dan legislasi yang mendukung pemerintahan.

#### b. Calon No Urut 2

### **Prabowo Subianto - Calon Presiden**

Prabowo Subianto Djojohadikusumo, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1951, merupakan salah satu tokoh militer dan politik yang paling dikenal di Indonesia. Dengan usia 72 tahun, Prabowo memiliki pengalaman yang luas di bidang militer dan politik. Karir militer Prabowo dimulai dari Akademi Militer, dan ia kemudian menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan

Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) pada tahun 1998. Pengalamannya di militer memberinya wawasan mendalam tentang keamanan dan pertahanan negara. Setelah pensiun dari militer, Prabowo mendirikan Partai Gerindra dan menjabat sebagai Ketua Umum sejak 2014 hingga sekarang. Di bawah kepemimpinannya, Gerindra berkembang menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Pada tahun 2019, ia diangkat sebagai Menteri Pertahanan, di mana ia berperan dalam memperkuat pertahanan negara melalui modernisasi alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit.

### **Gibran Rakabuming Raka - Calon Wakil Presiden**

Gibran Rakabuming Raka, lahir di Surakarta pada tanggal 1 Oktober 1987, adalah sosok muda yang terjun ke dunia politik dengan membawa semangat perubahan. Pada usia 36 tahun, ia telah menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang patut diperhitungkan. Gibran adalah putra sulung Presiden Joko Widodo. Ia mulai dikenal publik ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo dari tahun 2021 hingga 2024. Selama masa jabatannya, Gibran fokus pada pengembangan infrastruktur kota, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan UMKM. Keberhasilannya dalam mengelola Kota Solo menjadikannya salah satu tokoh muda yang diperhitungkan dalam politik nasional.

#### c. Calon No Urut 3

### **Ganjar Pranowo - Calon Presiden**

Ganjar Pranowo, lahir di Karang Anyar pada tanggal 28 Oktober 1968, adalah seorang politisi yang dikenal luas berkat kiprahnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Pada usia 54 tahun, ia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengabdikan untuk masyarakat. Karir politik Ganjar dimulai sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, di mana ia menjabat dua periode dari 2004 hingga 2013. Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR, Ganjar aktif dalam berbagai komisi dan berperan dalam legislasi yang mendukung kesejahteraan rakyat. Pada tahun 2013, Ganjar terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah, posisi yang dipegangnya hingga 2023. Selama masa jabatannya, Ganjar dikenal dengan berbagai program inovatif yang bertujuan

meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah, seperti pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan pengentasan kemiskinan.

### **Mahfud MD - Calon Wakil Presiden**

Mohammad Mahfud Mahmodin, atau Mahfud MD, lahir di Madura pada tanggal 13 Mei 1957. Dengan usia 66 tahun, Mahfud memiliki pengalaman yang luas di bidang hukum dan politik. Mahfud MD pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia dari tahun 2000 hingga 2001, serta Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dari 2001 hingga 2002. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dari 2008 hingga 2013, di mana ia dikenal dengan integritas dan keberaniannya dalam menegakkan hukum. Pada tahun 2019, Mahfud diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di mana ia berperan dalam mengkoordinasikan berbagai kebijakan penting yang berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan nasional.

## **2. Isu-isu utama yang diangkat dalam kampanye**

Pemilu Presiden 2024 di Indonesia diwarnai oleh berbagai isu utama yang diangkat oleh para calon presiden dan wakil presiden dalam kampanye. Isu-isu ini mencerminkan tantangan yang dihadapi negara serta harapan masyarakat untuk masa depan yang lebih baik. Berikut adalah beberapa isu utama yang menjadi fokus dalam kampanye Pilpres 2024.

### **a. Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial**

Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial menjadi fokus utama dalam Pilpres 2024, dengan para calon presiden menawarkan berbagai solusi untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda secara global, Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam mengatasi konsekuensi ekonomi yang merugikan. Dalam upaya menjawab isu-isu ini, para calon membahas beberapa aspek utama, seperti pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas harga barang pokok. Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas pertama dalam kampanye

Pilpres 2024. Menurut Summers (2014), pertumbuhan ekonomi yang kuat merupakan kunci untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, para calon menawarkan berbagai rencana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti investasi dalam infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing, serta dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi domestik (*World Bank*, 2019).

Pengentasan kemiskinan tetap menjadi agenda utama dalam Pilpres 2024. Menurut Chen dan Ravallion (2013), pengurangan kemiskinan membutuhkan kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan perlindungan sosial yang efektif. Para calon presiden mengusulkan program-program yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada kelompok masyarakat yang paling rentan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta mengembangkan program-program sosial yang berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Isu stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok juga menjadi sorotan dalam kampanye Pilpres 2024. Menurut Blinder (2014), stabilitas harga barang-barang konsumsi sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah terjadinya inflasi yang merugikan. Para calon menekankan pentingnya kebijakan yang dapat memastikan harga yang stabil dan terjangkau untuk barang-barang penting seperti beras, minyak goreng, dan bahan bakar, serta upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor (Rosling, 2018).

b. Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu isu sentral dalam Pilpres 2024, dengan para calon presiden membahas pentingnya akses pendidikan yang merata dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan, beberapa aspek menjadi fokus utama. Akses dan kualitas pendidikan menjadi prioritas utama. Para calon berjanji untuk meningkatkan anggaran pendidikan guna memperbaiki infrastruktur sekolah dan memperluas program beasiswa.

Menurut Hanushek dan Woessmann (2015), investasi dalam pendidikan yang berkualitas berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial suatu negara. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan bahwa semua anak Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas akan menjadi langkah penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pentingnya pendidikan vokasional dan pelatihan keterampilan kerja juga diakui oleh para calon. Dalam era industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi digital dan otomatisasi, keterampilan kerja yang sesuai dengan tuntutan pasar sangat diperlukan. Melalui program pelatihan dan sertifikasi kerja, para calon berupaya untuk membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan dan dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja yang semakin kompetitif (*World Economic Forum*, 2018). Dengan menekankan pada akses, kualitas, dan relevansi pendidikan, para calon dalam Pilpres 2024 berkomitmen untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia demi masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Dengan mendasarkan pada penelitian dan referensi yang valid, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut dan memastikan bahwa pendidikan menjadi tonggak utama dalam pembangunan nasional.

c. Kesehatan

Kesehatan menjadi fokus utama dalam Pilpres 2024, dengan para calon presiden membahas pentingnya akses layanan kesehatan yang berkualitas dan kesiapsiagaan menghadapi tantangan seperti pandemi COVID-19. Beberapa aspek menjadi perhatian utama dalam diskusi mengenai kesehatan di Indonesia. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan merupakan tujuan utama. Menurut WHO (2010), akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Para calon berkomitmen untuk memperluas cakupan BPJS Kesehatan agar mencakup lebih banyak warga, terutama yang tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Selain itu, peningkatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil serta pemastian ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis

menjadi prioritas untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu.

Pandemi COVID-19 telah membahas pentingnya kesiapsiagaan kesehatan dalam menghadapi ancaman penyakit menular. Pembelajaran dari pandemi ini mendorong para calon untuk mengusulkan penguatan sistem kesehatan nasional. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas rumah sakit, pengembangan program vaksinasi yang lebih efektif, dan penelitian medis untuk memahami lebih lanjut tentang penyakit-penyakit menular dan cara penanganannya. Menurut Gupta *et al.* (2020), kesiapsiagaan kesehatan adalah kunci untuk melindungi masyarakat dari ancaman pandemi di masa depan. Selain itu, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah pendidikan dan promosi kesehatan. Program-program edukasi kesehatan yang terarah dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, dan pola makan yang baik. Menurut Nutbeam (2000), pendidikan kesehatan yang efektif dapat memberdayakan individu untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait kesehatan sendiri.

Tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk mengatasi masalah kesehatan mental. Penelitian oleh Patel *et al.* (2018) menunjukkan bahwa gangguan kesehatan mental merupakan beban kesehatan yang signifikan di banyak negara. Oleh karena itu, para calon menekankan perlunya peningkatan layanan kesehatan mental yang terjangkau dan terintegrasi dalam sistem kesehatan nasional. Selanjutnya, aspek regulasi dan pengawasan obat juga menjadi sorotan. Dengan meningkatnya kasus obat palsu dan penggunaan obat-obatan yang tidak teratur, perlu adanya upaya untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan penjualan obat-obatan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia untuk meningkatkan keamanan obat dan mengurangi risiko obat palsu (BPOM, 2020).

Pentingnya inovasi dalam bidang kesehatan juga ditekankan. Dengan kemajuan teknologi, inovasi seperti *telemedicine* dan

penggunaan teknologi AI dalam diagnosis dan perawatan kesehatan dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Menurut Topol (2019), penggunaan teknologi dalam kesehatan dapat mengubah paradigma pelayanan kesehatan tradisional dan membuka pintu bagi perawatan yang lebih personal dan terjangkau. Peran sektor swasta dan lembaga non-pemerintah (LSM) dalam mendukung upaya kesehatan juga sangat penting. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan LSM dapat memperkuat infrastruktur kesehatan, meningkatkan aksesibilitas layanan, dan memperluas cakupan program-program kesehatan masyarakat. Ini sejalan dengan konsep kemitraan untuk pembangunan yang diusung oleh PBB (United Nations, 2015), di mana kemitraan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil diakui sebagai kunci untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait kesehatan.

d. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur berperan krusial dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di Pilpres 2024, para calon presiden membahas berbagai aspek pembangunan infrastruktur untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara tetap menjadi prioritas utama. Menurut Aschauer (1989), infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan daya saing suatu negara. Oleh karena itu, para calon presiden berjanji untuk melanjutkan dan memperluas proyek-proyek infrastruktur besar guna mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi regional. Pembangunan jaringan transportasi yang efisien dapat mempermudah mobilitas barang dan orang, sehingga mempercepat distribusi produk dan memperluas pasar.

Pembangunan infrastruktur digital juga mendapatkan perhatian yang meningkat. Dalam era ekonomi digital, jaringan internet *broadband* di seluruh pelosok negeri menjadi sangat penting. Melalui pembangunan infrastruktur digital, diharapkan akses internet yang cepat dan handal dapat diperluas ke daerah-

daerah terpencil. Ini akan mendukung transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh *World Bank* (2016), infrastruktur digital dapat meningkatkan inklusi keuangan, akses ke informasi, dan ketersediaan layanan publik. Namun, pembangunan infrastruktur juga menimbulkan tantangan tertentu, terutama terkait dengan dampak lingkungan dan pembiayaan proyek. Pembangunan infrastruktur fisik sering kali berpotensi merusak lingkungan alam dan habitat satwa liar. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lingkungan yang cermat serta strategi mitigasi dampak untuk meminimalkan kerusakan lingkungan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur digital juga menghadapi tantangan terkait aksesibilitas dan kesetaraan. Beberapa daerah, terutama di pedesaan, mungkin masih belum terjangkau oleh jaringan internet yang memadai karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

Gambar 3. Internet *Broadband*



Sumber: *First Media*

Masalah pembiayaan menjadi perhatian utama dalam pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek infrastruktur membutuhkan investasi yang besar, dan seringkali pemerintah harus bergantung pada pinjaman atau investasi swasta untuk membiayai proyek-proyek tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa terlalu banyak ketergantungan pada pinjaman luar negeri dapat meningkatkan risiko utang luar negeri yang berpotensi

mengganggu stabilitas fiskal dan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang bijaksana dalam mengelola pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan aspek inklusivitas dan kesetaraan. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata dapat memperdalam kesenjangan regional dan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur mencakup daerah-daerah yang terpinggirkan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang rentan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan inklusi sosial dan memperkecil kesenjangan antar wilayah.

e. Lingkungan Hidup dan Energi

Isu lingkungan hidup dan energi telah menjadi pusat perhatian dalam Pilpres 2024, dengan penekanan khusus pada perubahan iklim, kelestarian lingkungan, dan ketahanan energi. Para calon presiden membahas pentingnya menghadapi tantangan lingkungan saat ini dan menciptakan kebijakan yang berkelanjutan untuk melindungi planet kita.

Gambar 4. *Intergovernmental Panel on Climate Change*



Perubahan iklim dan kelestarian lingkungan menjadi isu utama yang ditekankan oleh para calon, menyuarakan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi hutan, dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan. Menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC, 2018),

perubahan iklim telah mengakibatkan dampak yang merusak pada lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, upaya untuk memperlambat laju perubahan iklim dan menjaga keanekaragaman hayati menjadi prioritas yang mendesak. Dalam menghadapi isu perubahan iklim, para calon juga mengusulkan kebijakan untuk mengatasi polusi dan memastikan pembangunan berkelanjutan. Penanganan limbah plastik dan pengelolaan air limbah menjadi bagian integral dari upaya perlindungan lingkungan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan dan praktik hidup berkelanjutan juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang peduli lingkungan.

Ketahanan energi menjadi fokus penting dalam wacana pembangunan berkelanjutan. Para calon presiden berjanji untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan investasi dalam energi terbarukan. Dengan mengembangkan energi surya, angin, dan biomassa, Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan memperkuat ketahanan energinya. Upaya diversifikasi sumber energi juga dapat meningkatkan kemandirian energi negara dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga bahan bakar fosil di pasar global. Namun, transformasi menuju energi terbarukan juga menghadapi tantangan, termasuk dalam hal infrastruktur dan kebijakan. Pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transmisi dan penyimpanan energi, diperlukan untuk mendukung penggunaan energi terbarukan secara luas. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang mendukung, seperti insentif fiskal dan regulasi yang jelas, untuk mendorong investasi swasta dalam sektor energi terbarukan.

Selaras dengan upaya mengurangi emisi karbon, penting untuk mengembangkan transportasi yang ramah lingkungan. Investasi dalam transportasi massal dan kendaraan listrik dapat membantu mengurangi polusi udara dan memperbaiki kualitas udara perkotaan. Selain itu, pengembangan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan, seperti jalur sepeda dan trotoar yang ramah pejalan kaki, dapat mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya, pendidikan dan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi energi dan penggunaan sumber daya yang efisien juga sangat penting. Program-program edukasi publik dan kampanye kesadaran lingkungan dapat membantu mengubah perilaku konsumen dan membentuk masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan.

f. Hukum dan Keamanan

Pada konteks Pilpres 2024, isu hukum dan keamanan menjadi sorotan utama, dengan penekanan khusus pada reformasi hukum, pemberantasan korupsi, dan peningkatan keamanan dalam negeri. Para calon presiden membahas pentingnya memperkuat institusi hukum, memastikan kepatuhan terhadap hukum, dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Reformasi hukum menjadi fokus utama dalam visi para calon, menegaskan perlunya memperbaiki sistem peradilan yang terkadang lamban dan rentan terhadap intervensi politik. Menurut *World Justice Project (2020)*, kemandirian sistem peradilan dan kepatuhan terhadap aturan hukum merupakan aspek penting dari sebuah negara yang berkeadilan. Oleh karena itu, reformasi hukum yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan.

Pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalam agenda hukum para calon. Korupsi telah lama menjadi masalah serius di Indonesia, merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Menurut *Transparency International (2021)*, upaya pemberantasan korupsi harus didukung oleh penegakan hukum yang kuat dan transparan, serta ketersediaan sistem pengadilan yang independen. Selanjutnya, keamanan dan ketertiban dalam negeri juga menjadi perhatian serius. Ancaman terorisme, radikalisme, dan kejahatan siber semakin kompleks dan menuntut respons yang terkoordinasi dari aparat keamanan. Menanggapi tantangan ini, para calon mengusulkan berbagai langkah untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum, termasuk peningkatan pelatihan dan peralatan, serta peningkatan kerjasama antarlembaga dalam penanganan kejahatan lintas batas.

Pada upaya untuk memperkuat hukum dan keamanan, penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil. Tindakan yang otoriter atau melanggar hak-hak individu dapat mengancam keseimbangan antara keamanan dan kebebasan. Selain itu, upaya pencegahan dan rehabilitasi juga diperlukan dalam menangani masalah keamanan, terutama terorisme dan radikalisme. Pendekatan yang holistik, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan psikologis, dapat lebih efektif dalam mencegah ekstremisme dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman tersebut.

g. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Pada konteks Pilpres 2024, demokrasi dan hak asasi manusia menjadi dua aspek krusial yang harus diperhatikan dengan serius oleh para calon presiden. Penguatan demokrasi tidak hanya mencakup upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dalam proses politik. Salah satu poin utama yang disorot oleh para calon adalah perlindungan kebebasan pers. Kebebasan pers adalah fondasi dari sebuah demokrasi yang sehat, karena memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang independen dan kritis tentang kebijakan pemerintah dan kinerja publik. Dengan kebebasan pers yang kuat, masyarakat dapat membuat keputusan politik yang lebih berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang dihadapi.

Upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga demokratis seperti parlemen, pengadilan, dan badan pengawas pemilu juga menjadi sorotan dalam visi para calon. Memastikan independensi dan akuntabilitas lembaga-lembaga ini adalah langkah penting untuk memperkuat demokrasi dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan. Selain penguatan demokrasi, komitmen terhadap hak asasi manusia juga sangat penting. Hak asasi manusia adalah fondasi moral dari setiap sistem politik yang demokratis. Para calon berjanji untuk menegakkan hak asasi manusia untuk semua warga negara, termasuk hak-hak minoritas, perempuan, dan anak-anak. Ini mencakup hak atas

kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak atas keadilan yang adil, dan hak atas perlindungan dari diskriminasi.

Pentingnya perlindungan hak asasi manusia terutama terlihat dalam konteks minoritas dan kelompok rentan. Calon presiden membahas perlunya melindungi hak-haknya dan memastikan bahwa memiliki akses yang sama terhadap layanan publik dan kesempatan ekonomi. Perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan dan anak-anak juga menjadi perhatian utama, dengan penekanan khusus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap kekerasan gender. Dalam rangka mewujudkan visi demokrasi dan hak asasi manusia, para calon perlu menawarkan rencana konkret dan terperinci tentang langkah-langkah yang akan diambil jika terpilih. Ini termasuk reformasi hukum, peningkatan pengawasan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, dan pengembangan kebijakan yang memperkuat perlindungan hak asasi manusia di semua tingkatan pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat dapat memilih calon yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, yang merupakan landasan penting dari kemajuan dan keadilan dalam sebuah negara.

#### h. Pemberdayaan Masyarakat

Pada konteks Pilpres 2024, pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan dan pemuda, menjadi perhatian utama bagi para calon presiden. Pemberdayaan perempuan dan pemuda dianggap sebagai strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasinya dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi dan politik, serta untuk memastikan kesetaraan gender dan kesempatan yang adil bagi semua warga negara. Salah satu aspek utama dari pemberdayaan perempuan dan pemuda adalah menciptakan program-program yang mendukung partisipasinya dalam ekonomi dan politik. Para calon menawarkan berbagai inisiatif, seperti pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, dan pembangunan jaringan pendukung, untuk membantu perempuan dan pemuda mengembangkan potensi dan berperan aktif dalam pembangunan negara.

Pemberdayaan perempuan juga melibatkan upaya untuk memastikan kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi

terhadap perempuan. Para calon berjanji untuk mengembangkan kebijakan yang mempromosikan akses perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan reproduksi, dan peluang kerja yang setara dengan laki-laki. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik tanpa hambatan atau diskriminasi. Di samping itu, pemberdayaan pemuda juga menjadi perhatian serius. Para calon berkomitmen untuk memberikan pelatihan keterampilan, akses pendidikan yang lebih baik, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal dan nasional. Ini bertujuan untuk memberdayakan generasi muda sebagai agen perubahan yang aktif dan konstruktif dalam pembangunan negara.

Pemberdayaan daerah dan komunitas lokal juga menjadi fokus dalam visi para calon, menekankan pentingnya mengembangkan ekonomi regional dan meningkatkan akses terhadap layanan publik di daerah terpencil. Dengan cara ini, masyarakat di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga memperkuat kohesi sosial dan kesatuan bangsa. Dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat, para calon perlu mengembangkan rencana aksi konkret yang meliputi alokasi anggaran, pembentukan kebijakan yang mendukung, dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Hanya dengan langkah-langkah nyata ini, aspirasi untuk mewujudkan masyarakat yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya akan dapat terwujud, menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju dan adil bagi semua warganya.

## **B. Dinamika Politik**

Pada Pilpres 2024, dinamika politik Indonesia memasuki fase krusial yang tidak hanya dipengaruhi oleh profil dan visi para calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga oleh kompleksitas isu-isu yang dihadapi negara. Pertarungan politik ini mencerminkan pergeseran kekuatan, kepentingan partai politik, serta harapan masyarakat terhadap perubahan dan stabilitas. Di tengah berbagai tantangan, termasuk

ekonomi yang fluktuatif, infrastruktur yang memerlukan pembaruan, dan kebutuhan akan kesatuan di tengah keberagaman, para kandidat berusaha memanfaatkan strategi politik dan retorika untuk meraih simpati dan dukungan rakyat. Dinamika ini menandai periode yang penuh dengan kampanye intens, manuver politik, dan mobilisasi massa, yang semuanya bertujuan untuk memenangkan hati dan pikiran pemilih di seluruh penjuru nusantara.

## **1. Persaingan Antar Partai Politik**

Persaingan antar partai politik dalam Pilpres 2024 di Indonesia tidak hanya mencerminkan perjuangan untuk merebut kekuasaan, tetapi juga dinamika ideologis dan strategis yang mendalam. Persaingan ini dibentuk oleh sejarah panjang politik Indonesia, perubahan demografi pemilih, serta tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi negara. Berikut adalah uraian tentang persaingan antar partai politik di Pilpres 2024 berdasarkan referensi yang valid.

### **a. Sejarah dan Perkembangan Partai Politik di Indonesia**

Sejarah dan perkembangan partai politik di Indonesia telah menjadi bagian integral dari evolusi politik negara sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Partai politik telah berperan yang signifikan dalam membentuk dan mengarahkan arus politik Indonesia melalui berbagai fase penting dalam sejarahnya. Pada awal kemerdekaan, partai-partai politik terbentuk sebagai wadah perjuangan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan. Menurut analisis King (2003), era awal partai politik di Indonesia ditandai dengan keberagaman ideologi dan tujuan. Partai-partai seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, dan Nahdlatul Ulama (NU) mewakili spektrum politik yang luas, dari nasionalisme sekuler hingga Islam politik. Namun, periode awal ini juga melihat persaingan yang intens antara partai-partai yang berbeda, terutama antara PNI dan Masyumi.

Periode selanjutnya, yang dikenal sebagai era Demokrasi Terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, menyaksikan dominasi politik yang semakin kuat dari partai politik yang terkonsolidasi di bawah pemerintah. Soekarno berperan sentral dalam mengendalikan partai-partai politik dan

mengarahkan agenda politik negara, yang mengakibatkan penghapusan partai-partai oposisi dan konsolidasi kekuasaan di tangan pemerintah. Namun, pandangan politik berubah secara dramatis pada tahun 1966 dengan kudeta militer yang menggulingkan Soekarno dan mengakhiri era Demokrasi Terpimpin. Era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto ditandai dengan otoritarianisme politik yang ketat dan kendali yang kuat atas partai politik. Partai-partai yang ada dipaksa untuk tunduk pada rezim otoriter, dan partai politik menjadi lebih sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan daripada wadah perjuangan politik yang berarti.

Era Reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an membawa perubahan besar dalam politik Indonesia, termasuk dalam hal partai politik. Salah satu perubahan paling mencolok adalah beralihnya Indonesia ke sistem multi-partai yang memberikan lebih banyak ruang bagi partai-partai politik untuk berkompetisi secara bebas. Analisis Crouch (2010) membahas pentingnya sistem multi-partai dalam menciptakan lanskap politik yang lebih inklusif dan mewakili berbagai kepentingan masyarakat. Partai-partai besar seperti PDI-P, Golkar, dan Gerindra muncul sebagai kekuatan dominan dalam politik Indonesia, tetapi partai-partai kecil dan baru juga memiliki kesempatan untuk berperan dalam proses politik. Seiring dengan perkembangan politik, struktur dan komposisi partai politik juga mengalami perubahan. Beberapa partai politik mengalami perpecahan dan penggabungan, sementara yang lain tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan politik yang signifikan. Partai politik juga mengalami evolusi ideologis, dengan beberapa partai bergeser dari platform ideologis tradisional untuk mengakomodasi perubahan dalam tuntutan politik dan masyarakat.

Pemberlakuan undang-undang partai politik yang baru telah mempengaruhi dinamika internal partai dan sistem politik secara keseluruhan. Undang-undang ini menetapkan persyaratan baru untuk registrasi partai politik, mengatur pendanaan partai, dan menetapkan batasan-batasan untuk partisipasi partai dalam pemilihan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Di

tengah dinamika politik yang terus berubah, peran partai politik dalam masyarakat tetap menjadi subjek perdebatan yang penting. Sementara beberapa mengkritik partai politik karena kekurangan dalam mewakili kepentingan rakyat atau terlibat dalam praktik korupsi, yang lain menganggap partai politik sebagai sarana yang penting untuk memperjuangkan perubahan sosial dan politik. Dengan demikian, partai politik tetap menjadi elemen kunci dalam politik Indonesia, berperan vital dalam pembentukan kebijakan, penyampaian aspirasi publik, dan pembangunan demokrasi.

b. Strategi dan Manuver Politik

Aliansi dan koalisi antar partai politik telah menjadi strategi utama dalam Pilpres 2024, dengan tujuan meningkatkan peluang kemenangan dan memperluas basis dukungan. Pembentukan koalisi sering kali didasarkan pada kesamaan ideologi atau kepentingan strategis antara partai-partai yang terlibat. Sebagai contoh, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang dikenal dengan basis massa nasionalis dan pluralis, sering mencari mitra koalisi yang memiliki pandangan serupa untuk memperkuat posisinya dalam persaingan politik. Demikian pula, partai-partai lain yang memiliki orientasi politik atau ideologi yang sejalan sering kali membentuk aliansi untuk saling mendukung. Selain itu, mobilisasi massa menjadi strategi penting dalam Pilpres 2024. Partai-partai politik berupaya melakukan kampanye yang intensif untuk menarik perhatian masyarakat dan mendapatkan dukungan pemilih. Salah satu cara yang digunakan adalah melalui penggunaan media sosial. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aspinall (2015), partai-partai politik mengandalkan platform digital untuk menyebarkan pesan kampanye dan berinteraksi langsung dengan pemilih, terutama generasi muda yang lebih melek teknologi. Kampanye berbasis isu juga menjadi fokus utama, di mana partai-partai berusaha membahas masalah-masalah seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan untuk menarik simpati masyarakat dan memperoleh dukungan.

Strategi dan manuver politik dalam Pilpres 2024 juga melibatkan upaya untuk membangun citra dan *branding* yang

kuat. Partai-partai politik berusaha untuk memperkuat identitas dan memosisikan diri di mata publik sebagai pilihan yang paling baik untuk memimpin negara. Ini melibatkan upaya untuk menonjolkan pemimpin partai, mengkomunikasikan visi dan program partai dengan jelas, serta menjalankan kampanye yang efektif untuk memperkuat citra positif partai. Selain itu, strategi politik dalam Pilpres 2024 juga melibatkan upaya untuk meraih dukungan dari sektor-sektor kunci dalam masyarakat, seperti buruh, petani, pemuda, dan kelompok minoritas. Partai-partai politik berupaya untuk memahami kebutuhan dan kepentingan dari berbagai segmen masyarakat dan menyusun program-program yang dapat menarik dukungan dari kelompok-kelompok tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog, pertemuan, dan kegiatan-kegiatan lain yang memungkinkan partai politik untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Strategi politik juga melibatkan upaya untuk memantau dan menanggapi dinamika politik yang terus berubah. Partai-partai politik harus responsif terhadap perubahan-perubahan dalam opini publik, perkembangan politik domestik dan internasional, serta perubahan dalam preferensi pemilih. Fleksibilitas dan adaptabilitas menjadi kunci untuk memastikan bahwa strategi politik yang diterapkan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul selama kampanye. Strategi dan manuver politik dalam Pilpres 2024 juga melibatkan upaya untuk mempersiapkan diri untuk berbagai kemungkinan hasil dan skenario pasca-pemilu. Partai-partai politik harus memiliki rencana yang matang untuk menghadapi hasil yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, termasuk kemungkinan adanya koalisi pemerintahan atau oposisi, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi konsekuensi-konsekuensi politik dan sosial yang mungkin timbul. Dengan demikian, strategi politik yang matang dan terencana dengan baik menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan dalam Pilpres 2024.

c. Tantangan dan Dinamika Politik

Politik identitas tetap menjadi salah satu tantangan utama dalam Pilpres 2024. Penggunaan isu-isu sensitif seperti agama,

etnis, dan ras untuk meraih dukungan politik masih sering terjadi. Menurut Hadiz (2018), hal ini dapat memecah belah masyarakat dan menimbulkan ketegangan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas politik. Partai-partai politik diharapkan untuk berhati-hati dalam mengelola isu-isu ini agar tidak memperburuk polarisasi dan konflik di tengah masyarakat. Di samping itu, pengaruh media sosial menjadi faktor penting yang memengaruhi dinamika politik dalam Pilpres 2024. Media sosial memungkinkan partai politik untuk menjangkau pemilih dengan cepat dan efektif, memberikan platform bagi interaksi langsung antara politisi dan pemilih, serta memfasilitasi diskusi dan penyebaran informasi politik. Namun, di sisi lain, media sosial juga menjadi saluran utama penyebaran mis-informasi, *hoaks*, dan konten yang dapat memperdalam polarisasi dan memicu konflik sosial. Jenkins (2020) membahas pentingnya literasi media yang tinggi di kalangan masyarakat untuk dapat menyaring informasi yang benar dari yang salah, serta perlunya regulasi yang ketat terhadap platform-platform digital guna mengurangi dampak negatif media sosial terhadap proses demokrasi.

Tantangan dalam Pilpres 2024 juga terkait dengan kualitas dan independensi lembaga-lembaga demokratis, seperti badan pemilihan umum dan lembaga penegak hukum. Kredibilitas dan transparansi proses pemilu menjadi kunci untuk memastikan bahwa hasilnya diakui secara luas dan dapat diterima oleh semua pihak. Meningkatnya kecurangan pemilu, tekanan politik terhadap lembaga-lembaga demokratis, dan upaya untuk mengintervensi proses politik menjadi tantangan yang harus diatasi dalam upaya menjaga integritas demokrasi. Dinamika politik dalam Pilpres 2024 juga dipengaruhi oleh ketegangan antara kekuatan politik yang berbeda dan pergeseran dalam dinamika koalisi. Perubahan dalam preferensi pemilih, pergolakan dalam partai politik, serta dinamika personal dan kebijakan antar kandidat menjadi faktor-faktor yang membentuk lanskap politik yang kompleks dan berubah-ubah. Para pemimpin politik harus dapat menavigasi dinamika ini dengan bijaksana

untuk mempertahankan stabilitas politik dan mencapai tujuan politik.

d. Partai Politik dan Calon Presiden

Partai Politik dan Calon Presiden menjadi fokus utama dalam dinamika politik Pilpres 2024. Berbagai partai politik memiliki strategi dan calon presiden yang berbeda-beda untuk memenangkan pemilihan. Di antaranya, terdapat tiga pasangan calon yang menonjol, masing-masing didukung oleh partai politik yang kuat. PDI-P, sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia, mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ganjar, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, memiliki basis massa nasionalis yang kuat. Jones (2022) mencatat bahwa kebijakan pro-rakyat dan fokus pada pembangunan infrastruktur menjadi ciri khas dari Ganjar. Dukungan dari PDI-P dianggap krusial bagi Ganjar untuk meraih kemenangan, terutama dengan strategi mobilisasi massa yang efektif.

Partai Gerindra kembali menunjuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Prabowo, seorang tokoh militer yang memiliki pengalaman luas di pemerintahan, terutama sebagai Menteri Pertahanan, dikenal dengan sikap tegasnya terhadap isu-isu keamanan dan kedaulatan nasional. Kim (2021) membahas bahwa Partai Gerindra berupaya menarik dukungan dari kalangan konservatif dan nasionalis dengan kembali mengusung Prabowo. Di sisi lain, terdapat koalisi yang dipimpin oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Anies, yang diusung oleh koalisi yang melibatkan Partai NasDem dan PKB, dikenal dengan pendekatannya yang inklusif dan berorientasi pada pendidikan. Sementara Muhaimin, yang memiliki basis massa kuat di kalangan umat Islam, menjadi pasangan yang dapat mengimbangi pendekatan moderat Anies. Koalisi ini berusaha menarik dukungan dari pemilih moderat dan religius (Nguyen, 2022).

e. Peran Pemilih dalam Dinamika Politik

Peran pemilih dalam dinamika politik Pilpres 2024 sangatlah signifikan, terutama dengan munculnya segmen pemilih yang memiliki karakteristik dan preferensi yang beragam. Pemilih

milennial dan Gen Z, sebagai segmen penting dalam pemilihan tersebut, memiliki peran yang cukup besar. Menurut laporan dari *Pew Research Center* (2022), kelompok ini cenderung lebih peduli pada isu-isu seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan teknologi. Karena itu, partai politik yang mampu menarik perhatian dan simpati dari kelompok ini melalui kebijakan progresif dan kampanye digital yang efektif cenderung memiliki keunggulan dalam merebut dukungan.

Pemilih *swing*, yang tidak memiliki afiliasi tetap dengan partai politik mana pun, juga memiliki peran kunci dalam dinamika politik. Jennings (2019) menunjukkan bahwa pemilih ini sering kali dipengaruhi oleh isu-isu terkini dan kinerja kandidat selama kampanye. Fleksibilitas dan responsivitas terhadap perkembangan isu menjadi sangat penting dalam menarik dukungan dari segmen pemilih ini. Dengan demikian, pemilih memiliki kekuatan untuk memengaruhi arah politik dalam Pilpres 2024. Dengan menyadari perannya dalam proses demokratis ini, pemilih dapat memilih kandidat yang paling sesuai dengan nilai dan kepentingan, serta memperkuat integritas dan keberlanjutan sistem demokrasi Indonesia.

f. Tantangan dalam Mencapai Konsensus Politik

Tantangan dalam mencapai konsensus politik dalam konteks Pilpres 2024 sangatlah kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap dinamika politik yang ada. Dua tantangan utama yang muncul adalah fragmentasi politik dan polaritas ideologi. Fragmentasi politik menjadi salah satu hambatan utama dalam mencapai konsensus politik yang solid. Dalam kondisi di mana tidak ada partai atau koalisi yang dominan, negosiasi dan kompromi menjadi krusial untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Liddle (2021) mencatat bahwa partai-partai harus bersedia untuk bekerja sama dan menemukan titik temu demi stabilitas pemerintahan. Dalam konteks Pilpres 2024, dengan banyaknya partai politik yang berkompetisi, proses negosiasi akan menjadi lebih rumit dan memerlukan keterlibatan semua pihak secara aktif.

Polarisasi ideologi juga menjadi tantangan serius dalam upaya mencapai konsensus politik. Perbedaan pandangan yang

tajam mengenai isu-isu fundamental seperti ekonomi, agama, dan kebijakan luar negeri dapat memperumit upaya mencapai kesepakatan yang mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat. Norris (2022) membahas pentingnya pendekatan dialogis dan inklusif dalam menjembatani perbedaan ini. Diskusi terbuka dan kolaborasi antarpartai menjadi sangat penting dalam mengatasi polarisasi ideologi yang menghambat proses pembentukan konsensus. Selain itu, tantangan dalam mencapai konsensus politik juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti tekanan dari kelompok kepentingan tertentu, baik dari dalam maupun luar negeri. Tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan ini dapat memperumit proses negosiasi dan menghambat pencapaian kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan kebijakan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan seluruh masyarakat diwakili dengan baik.

g. Kebijakan dan Program Unggulan

Kebijakan dan program unggulan yang diajukan oleh partai politik dalam Pilpres 2024 mencakup berbagai aspek, mulai dari ekonomi hingga reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur. Dalam bidang ekonomi, setiap partai politik menawarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk pemulihan pasca-pandemi, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Lee (2023) mencatat bahwa kebijakan yang menekankan peningkatan investasi asing, dukungan terhadap UMKM, dan penguatan sektor pertanian menjadi sorotan utama. Kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat menarik dukungan luas dari masyarakat, karena memberikan jaminan terhadap pemulihan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Reformasi birokrasi menjadi fokus penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Thompson (2022) menekankan pentingnya upaya untuk memberantas korupsi dan meningkatkan akuntabilitas lembaga publik sebagai langkah krusial untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Program-program yang dirancang untuk

meningkatkan kapasitas dan integritas birokrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas utama dalam kebijakan dan program unggulan yang diusulkan oleh partai politik. Lanjutkan proyek-proyek infrastruktur besar yang dimulai pada pemerintahan sebelumnya dan inisiatif baru yang diusulkan bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Wilson (2022) membahas pentingnya transportasi dan infrastruktur digital dalam meningkatkan konektivitas dan produktivitas nasional. Pembangunan yang terencana dan berkesinambungan diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kebijakan yang berfokus pada sektor pendidikan juga diperlukan. Partai politik menawarkan berbagai program untuk memperbaiki sistem pendidikan, mulai dari peningkatan akses dan kualitas pendidikan hingga pengembangan pendidikan vokasional dan keterampilan kerja. Dengan memperkuat sektor pendidikan, diharapkan dapat diciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing dalam era globalisasi. Tidak kalah pentingnya, kebijakan yang berorientasi pada lingkungan juga mendapatkan perhatian dalam program unggulan partai politik. Perlindungan lingkungan dan upaya mitigasi perubahan iklim menjadi fokus dalam beberapa platform politik. Dukungan terhadap energi terbarukan, pelestarian hutan, dan penanganan polusi menjadi bagian dari agenda untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

## **2. Strategi Kampanye yang Digunakan**

Strategi kampanye yang digunakan dalam Pemilu 2024 di Indonesia mencerminkan evolusi media dan komunikasi politik serta upaya para kandidat untuk mencapai dan mempengaruhi pemilih yang semakin beragam.

### **a. Kunjungan Langsung**

Salah satu strategi utama dalam kampanye politik adalah kunjungan langsung ke konstituen. Kunjungan langsung ini menjadi sarana penting bagi para calon presiden dan wakil

presiden untuk berinteraksi langsung dengan pemilih, mendengarkan aspirasi, dan menjelaskan platform secara langsung. Kunjungan ini tidak hanya sekadar aktivitas simbolis tetapi juga menjadi momen penting untuk membangun kedekatan personal dengan pemilih. Menurut Smith (2023), kunjungan langsung ini memungkinkan para kandidat untuk merasakan langsung kondisi di lapangan dan memahami lebih dalam berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Interaksi langsung dengan pemilih melalui kunjungan ke daerah-daerah dapat menciptakan hubungan emosional yang kuat antara kandidat dan pemilih. Hal ini penting karena dalam politik, dukungan yang didasarkan pada ikatan emosional cenderung lebih kuat dan tahan lama. Pemilih yang merasa diperhatikan secara pribadi oleh calon pemimpin lebih mungkin memberikan dukungan penuh. Smith (2023) juga menekankan bahwa dalam kunjungan-kunjungan ini, calon presiden dan wakil presiden dapat menunjukkan sisi humanis, yang sering kali tidak terlihat dalam kampanye media massa yang lebih formal dan terkendali.

Kunjungan langsung juga memberikan kesempatan bagi para kandidat untuk memperbaiki citra diri dan merespons secara langsung berbagai isu negatif atau mispersepsi yang mungkin ada di masyarakat. Dengan berhadapan langsung dengan pemilih, para kandidat dapat menjelaskan posisinya, klarifikasi kebijakan, dan mengatasi berbagai rumor atau berita miring. Ini sangat penting dalam era di mana informasi dapat dengan mudah tersebar dan kadang-kadang disalahartikan atau sengaja dipelintir. Smith (2023) mencatat bahwa kemampuan untuk merespons secara langsung dan transparan terhadap isu-isu kritis dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik. Kunjungan langsung juga memungkinkan para kandidat untuk mengidentifikasi dan memobilisasi basis dukungan lokal. Dalam setiap kunjungan, calon presiden dan wakil presiden biasanya akan bertemu dengan tokoh-tokoh lokal, pemimpin komunitas, dan *influencer* setempat yang memiliki pengaruh signifikan di wilayahnya. Melalui interaksi ini, para kandidat dapat membangun jaringan dukungan yang lebih luas dan mendapatkan *endorsement* dari tokoh-tokoh berpengaruh. Smith (2023)

menekankan bahwa dukungan dari tokoh lokal sering kali membawa pengaruh besar karena memiliki kredibilitas dan kepercayaan dari komunitas.

Kunjungan langsung juga memberikan kesempatan bagi kandidat untuk memobilisasi pemilih secara efektif, dapat mengadakan rapat umum, diskusi kelompok kecil, dan sesi tanya jawab yang memungkinkan pemilih untuk lebih terlibat dalam kampanye. Ini bukan hanya tentang mengumpulkan massa tetapi juga tentang memberikan ruang bagi pemilih untuk menyuarakan pendapatnya, bertanya, dan mendapatkan jawaban langsung dari calon pemimpin. Smith (2023) menunjukkan bahwa pemilih yang merasa terlibat secara aktif dalam kampanye lebih mungkin untuk menjadi pendukung yang setia dan berpartisipasi dalam pemilu. Kunjungan langsung juga berperan penting dalam strategi komunikasi politik. Saat berada di lapangan, kandidat dapat menunjukkan secara nyata komitmen terhadap isu-isu lokal. Misalnya, dengan mengunjungi area yang terkena bencana, mengunjungi pabrik, atau sekolah, dapat menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Ini tidak hanya memberikan citra positif tetapi juga memperkuat pesan kampanye yang berfokus pada solusi nyata bagi masyarakat. Smith (2023) mencatat bahwa tindakan nyata yang dilakukan oleh kandidat selama kunjungan sering kali memiliki dampak yang lebih besar daripada sekadar pidato atau janji kampanye.

b. Pemasaran Politik

Strategi pemasaran politik adalah salah satu komponen kunci dalam kampanye politik modern yang melibatkan berbagai saluran dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang kompleks. Dalam konteks Pilpres 2024 di Indonesia, pemasaran politik mencakup upaya untuk memperluas jaringan dukungan dan mempengaruhi pemilih dari berbagai latar belakang. Johnson (2022) membahas bahwa pemasaran politik yang efektif sering kali memanfaatkan *endorsement* dari tokoh-tokoh terkemuka dan organisasi masyarakat, yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap citra dan pesan kampanye kandidat. *Endorsement* dari tokoh masyarakat dan pemimpin agama dapat

menjadi alat yang sangat ampuh dalam pemasaran politik. Tokoh-tokoh ini sering kali memiliki pengaruh besar dan dipercaya oleh komunitas, sehingga dukungannya dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap seorang kandidat. Johnson (2022) mencatat bahwa ketika seorang kandidat mendapatkan dukungan dari tokoh yang dihormati, hal ini dapat menciptakan efek bola salju yang menarik lebih banyak pendukung dan memperkuat kampanye secara keseluruhan. Di Indonesia, di mana masyarakat cenderung memiliki ikatan kuat dengan pemimpin agama dan tokoh masyarakat, strategi ini sangat relevan.

Pemasaran politik melalui media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar tetap menjadi strategi yang penting. Meskipun media digital semakin mendominasi, media tradisional masih memiliki jangkauan luas, terutama di daerah pedesaan dan di kalangan pemilih yang lebih tua. Iklan televisi, misalnya, dapat menjangkau jutaan pemirsa dan memberikan dampak visual yang kuat. Johnson (2022) menunjukkan bahwa iklan yang kreatif dan persuasif di media massa dapat membantu menyampaikan pesan-pesan kunci kampanye dan membentuk persepsi publik tentang seorang kandidat. Di era digital ini, media sosial juga berperan penting dalam pemasaran politik. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok memungkinkan kandidat untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih, menyebarkan pesan kampanye, dan membangun komunitas *online*. Menurut Johnson (2022), media sosial menawarkan fleksibilitas dan kecepatan dalam menyebarkan informasi, yang sangat penting dalam dinamika kampanye yang cepat. Selain itu, media sosial memungkinkan interaksi dua arah, di mana pemilih dapat memberikan umpan balik dan kandidat dapat menyesuaikan strategi secara *real-time*.

Pemasaran politik melalui media sosial juga memungkinkan penggunaan data analitik untuk mengidentifikasi dan menargetkan segmen pemilih tertentu. Dengan teknologi analitik yang canggih, tim kampanye dapat memetakan preferensi, perilaku, dan demografi pemilih, kemudian menyesuaikan pesan dan strategi kampanye untuk masing-masing kelompok. Johnson

(2022) mencatat bahwa pendekatan berbasis data ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kampanye tetapi juga memastikan bahwa pesan yang disampaikan relevan dan menarik bagi audiens yang dituju. Selain media tradisional dan digital, pemasaran politik juga melibatkan kegiatan di lapangan seperti rapat umum, diskusi panel, dan acara komunitas. Kegiatan-kegiatan ini memungkinkan interaksi langsung antara kandidat dan pemilih, yang penting untuk membangun hubungan emosional dan kepercayaan. Menurut Johnson (2022), kegiatan di lapangan ini sering kali dilengkapi dengan strategi media yang lebih luas, sehingga pesan yang disampaikan di acara-acara ini dapat diperkuat melalui liputan media dan distribusi di media sosial.

Peran partai politik dalam pemasaran politik juga tidak bisa diabaikan. Partai politik berfungsi sebagai platform yang mengorganisir dan mengkoordinasikan berbagai aktivitas kampanye, memiliki jaringan yang luas dan infrastruktur yang dapat mendukung upaya pemasaran kandidat. Johnson (2022) menunjukkan bahwa partai politik juga membantu mengembangkan strategi kampanye, mengelola sumber daya, dan memastikan bahwa pesan kampanye konsisten di seluruh wilayah. Dengan demikian, keberhasilan pemasaran politik sering kali bergantung pada seberapa baik partai politik dapat mendukung dan memfasilitasi kampanye kandidat. Pemasaran politik juga memerlukan penanganan yang cermat terhadap isu-isu yang sensitif dan kontroversial. Dalam kampanye politik, isu-isu seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebijakan luar negeri sering kali menjadi fokus utama. Namun, ada juga isu-isu lain seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan keberagaman yang dapat mempengaruhi persepsi pemilih. Johnson (2022) menekankan bahwa kandidat harus mampu mengkomunikasikan posisinya terhadap isu-isu ini dengan cara yang jelas dan meyakinkan, sambil tetap menjaga sensitivitas terhadap pandangan dan perasaan pemilih.

c. Debat

Partisipasi dalam debat calon presiden dan wakil presiden adalah komponen krusial dalam kampanye politik. Debat ini memberikan platform bagi para kandidat untuk secara langsung

mengomunikasikan visi dan misi kepada pemilih, memungkinkan untuk menyampaikan pandangan dan rencana secara terbuka dan transparan. Menurut Brown (2024), debat ini juga memberikan kesempatan bagi para kandidat untuk membahas perbedaan antara program dan pesaingnya, memberikan pemilih informasi yang jelas tentang pilihan yang ada. Dengan demikian, debat berperan penting dalam membentuk persepsi publik tentang para kandidat. Debat ini juga menawarkan peluang bagi pemilih untuk melihat bagaimana para kandidat menangani pertanyaan sulit dan situasi tekanan tinggi, yang merupakan indikator penting dari kemampuan kepemimpinan. Pemilih dapat melihat bagaimana kandidat merespons secara langsung, menunjukkan ketajaman intelektual, ketenangan di bawah tekanan, dan kemampuan untuk berpikir secara cepat. Menurut penelitian oleh Jamieson dan Birdsell (2019), kemampuan seorang kandidat untuk tampil baik dalam debat sering kali sangat memengaruhi persepsi publik tentang kompetensi dan kelayakan untuk memegang jabatan publik tertinggi.

Debat memungkinkan pemilih untuk membandingkan para kandidat secara langsung, memberikan konteks yang lebih kaya daripada sekadar iklan atau kampanye satu arah. Dalam debat, perbandingan antara kebijakan dan pendekatan masing-masing kandidat dapat dilihat dengan lebih jelas. Ini penting karena, menurut Norris (2021), perbandingan langsung ini membantu pemilih dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi. Pemilih tidak hanya mendengar janji kampanye tetapi juga menyaksikan bagaimana kandidat membela dan menjelaskan kebijakan ketika dihadapkan dengan pertanyaan dan kritik. Selain itu, debat sering kali menjadi momen penting dalam kampanye di mana isu-isu utama diperinci dan didiskusikan secara mendalam. Ini memberikan kesempatan bagi kandidat untuk memperjelas dan memperinci kebijakan, dan bagi pemilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana masing-masing kandidat berencana untuk menangani isu-isu kritis. Menurut Auerbach (2023), debat yang diatur dengan baik dan berfokus pada isu-isu yang relevan dapat

meningkatkan kualitas demokrasi dengan memfasilitasi diskusi yang substantif dan berbasis fakta.

d. TikTok

Pemanfaatan platform digital seperti TikTok menjadi bagian integral dari strategi kampanye modern, terutama dalam upaya menjangkau pemilih muda. TikTok, yang memiliki jutaan pengguna di Indonesia, menyediakan kesempatan unik bagi para kandidat untuk memperkenalkan diri dan membangun kesadaran politik di kalangan generasi muda. Platform ini memungkinkan para kandidat untuk menyampaikan pesan kampanye dengan cara yang lebih informal dan personal, yang sering kali lebih efektif dalam menarik perhatian pemilih muda dibandingkan dengan media tradisional. TikTok menawarkan berbagai fitur yang mendukung kreativitas dalam pembuatan konten, seperti penggunaan musik, efek visual, dan kemampuan untuk membuat video pendek yang menarik. Menurut Garcia (2024), konten yang kreatif dan menarik di TikTok dapat menjadi alat efektif untuk menarik perhatian dan dukungan pemilih muda. Misalnya, para kandidat dapat membuat video yang menunjukkan sisi personal, berbagi cerita inspiratif, atau menjelaskan kebijakan dengan cara yang mudah dipahami. Konten semacam ini tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik, membantu pemilih muda memahami isu-isu politik yang kompleks.

Algoritma TikTok yang canggih memungkinkan konten untuk dengan cepat menjadi viral, mencapai audiens yang jauh lebih luas dalam waktu singkat. Ini berarti bahwa pesan kampanye dapat disebarluaskan secara efisien tanpa memerlukan anggaran besar seperti yang dibutuhkan untuk iklan televisi atau cetak. Menurut Smith (2023), kampanye di TikTok dapat mengoptimalkan penggunaan *hashtag*, tren, dan tantangan yang sedang populer untuk meningkatkan visibilitas dan keterlibatan. Strategi ini dapat menciptakan momentum positif bagi para kandidat dan membantu membangun basis dukungan yang solid di kalangan pemilih muda. Interaksi langsung dengan pengguna juga merupakan aspek penting dari kampanye di TikTok. Para kandidat dapat menjawab pertanyaan, menanggapi komentar, dan berpartisipasi dalam tren yang sedang berkembang, yang

semuanya dapat menciptakan rasa kedekatan dan keterlibatan yang lebih besar dengan pemilih. Menurut Johnson (2023), interaksi semacam ini dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pemilih, karena merasa lebih terhubung dengan kandidat secara personal. Hal ini sangat penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pemilih muda, yang sering kali lebih skeptis terhadap politik tradisional.

e. Rapat Umum

Rapat umum tetap menjadi salah satu strategi kampanye yang penting dalam politik Indonesia, meskipun perkembangan teknologi telah menghadirkan berbagai platform digital untuk berkampanye. Rapat umum menawarkan kesempatan bagi para kandidat untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye secara langsung kepada pemilih dari berbagai latar belakang. Kehadiran fisik para kandidat di hadapan massa memungkinkan terjadinya interaksi langsung, yang dapat menciptakan ikatan emosional antara kandidat dan pemilih. Menurut Rodriguez (2023), rapat umum yang dihadiri oleh massa yang besar mampu menciptakan momentum politik yang signifikan. Momentum ini sangat penting untuk memperkuat citra dan popularitas para kandidat di mata publik. Dengan mengumpulkan ribuan pendukung dalam satu acara, para kandidat dapat menunjukkan dukungan luas yang dimiliki, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pemilih yang masih ragu-ragu. Rapat umum sering kali diliput oleh media massa, baik cetak maupun elektronik, sehingga pesan yang disampaikan dalam acara tersebut dapat menjangkau audiens yang lebih luas.

Rapat umum juga memberikan kesempatan bagi para kandidat untuk menampilkan sisi lain dari diri yang mungkin tidak terlihat dalam kampanye digital. Dalam rapat umum, kandidat bisa berbicara dengan penuh semangat, berinteraksi langsung dengan pendukung, dan menunjukkan kepemimpinan. Menurut studi yang dilakukan oleh Norris (2022), rapat umum yang diorganisir dengan baik dapat meningkatkan rasa solidaritas di antara pendukung dan membangun semangat kolektif untuk mendukung kampanye. Pendukung yang hadir dalam rapat umum cenderung merasa lebih terlibat secara emosional dan

komitmen untuk mendukung kandidat semakin kuat. Selain itu, rapat umum memberikan platform bagi para kandidat untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja secara rinci. Bisa menjawab pertanyaan dari audiens, menanggapi isu-isu lokal yang spesifik, dan menawarkan solusi yang langsung relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Menurut Johnson (2023), interaksi langsung semacam ini sangat efektif untuk mengklarifikasi misinformasi dan membangun kepercayaan. Pemilih cenderung lebih percaya kepada kandidat yang dilihat dan didengar secara langsung, dibandingkan dengan yang dikenal hanya melalui media massa atau kampanye digital.

f. Iklan

Pemanfaatan iklan di media massa tetap menjadi salah satu elemen kunci dalam strategi kampanye politik. Iklan televisi, radio, dan cetak masih menjadi sarana efektif untuk menjangkau pemilih di seluruh negeri dan menyampaikan pesan-pesan kampanye secara luas. Menurut Lee (2024), pentingnya iklan dalam kampanye politik tidak bisa diabaikan karena memiliki potensi besar untuk memengaruhi persepsi dan sikap pemilih terhadap para kandidat. Iklan televisi masih menjadi salah satu medium utama dalam kampanye politik karena dapat menjangkau audiens yang luas dan beragam. Dengan menggunakan iklan televisi, para kandidat dapat mempresentasikan pesan-pesan kampanye dengan gambar, suara, dan narasi yang menarik. Iklan televisi juga memiliki keunggulan dalam hal daya tarik visual dan emosional, yang dapat memengaruhi pemirsa secara langsung.

Iklan di radio juga tetap relevan dalam strategi kampanye politik. Radio masih menjadi sumber informasi utama bagi banyak pendengar, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh media lain. Melalui iklan radio, para kandidat dapat menyampaikan pesan-pesan kampanye kepada pemilih di berbagai lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Selain media elektronik, iklan cetak juga memiliki peran penting dalam kampanye politik. Meskipun tren konsumsi media beralih ke platform digital, iklan cetak masih memiliki dampak yang signifikan, terutama di kalangan pemilih yang lebih

tua atau yang memiliki akses terbatas ke media elektronik. Melalui iklan cetak di surat kabar, majalah, dan spanduk, para kandidat dapat menjangkau pemilih yang mungkin tidak terhubung secara *online*.

Untuk mencapai efektivitas yang maksimal, iklan politik haruslah kreatif dan persuasif. Dalam lingkungan media yang semakin kompetitif, iklan yang menonjol dan memikat dapat membedakan kandidat dari pesaing. Dengan menggunakan narasi yang kuat, gambar yang mengesankan, dan pesan yang relevan, iklan politik dapat membangun citra positif bagi para kandidat dan memengaruhi sikap pemilih. Dalam konteks Pilpres 2024 di Indonesia, pemanfaatan iklan politik di media massa akan menjadi salah satu strategi utama bagi para kandidat untuk mencapai kemenangan. Namun, penting untuk diingat bahwa keberhasilan iklan politik tidak hanya bergantung pada seberapa sering iklan tersebut ditayangkan, tetapi juga pada kreativitas, relevansi, dan daya persuasifnya.

g. Kemasan yang Relevan

Strategi kampanye yang sukses tidak hanya memperhitungkan pesan yang disampaikan, tetapi juga bagaimana pesan tersebut dikemas dan disesuaikan dengan karakteristik pemilih, terutama pemilih muda. Menurut Patel (2023), kemasan kampanye yang relevan dan empatik terhadap kebutuhan serta preferensi pemilih muda dapat meningkatkan daya tarik dan dukungan terhadap para kandidat. Pemilih muda memiliki preferensi yang unik dan seringkali lebih responsif terhadap pendekatan yang kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, penting bagi para kandidat untuk mengadaptasi strategi kampanye agar sesuai dengan preferensi dan gaya hidup generasi muda. Misalnya, penggunaan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube dapat menjadi cara yang efektif untuk menjangkau pemilih muda yang aktif secara *online*.

Konten kampanye juga harus relevan dengan isu-isu yang penting bagi pemilih muda, seperti pendidikan, lingkungan, pekerjaan, dan kesehatan mental. Para kandidat perlu menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah ini dan menyajikan solusi yang konkret dan inovatif.

Menurut Smith (2022), kandidat yang mampu mengartikulasikan visi dan misi secara jelas dan menarik akan lebih mungkin mendapatkan dukungan dari pemilih muda. Selain itu, kemasan kampanye juga mencakup gaya komunikasi dan bahasa yang digunakan oleh para kandidat. Pemilih muda cenderung lebih responsif terhadap pesan yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, santai, dan autentik. Oleh karena itu, para kandidat perlu berkomunikasi dengan cara yang bersahabat dan akrab, bukan hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai teman sebaya.

Kemasan kampanye yang relevan juga mencakup penekanan pada isu-isu yang dianggap penting oleh pemilih muda, seperti keberlanjutan lingkungan, inklusi sosial, dan kemajuan teknologi. Para kandidat perlu menunjukkan komitmen terhadap isu-isu ini dan menyajikan rencana tindakan yang konkret dan realistis untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh generasi muda. Dalam konteks Pilpres 2024 di Indonesia, kemasan kampanye yang relevan dan empatik terhadap pemilih muda akan menjadi kunci untuk meraih dukungan dari kelompok ini yang semakin berpengaruh. Dengan mengadopsi strategi kampanye yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan generasi muda, para kandidat dapat memperkuat citra sebagai pemimpin yang responsif dan memperoleh dukungan yang lebih besar dalam pertarungan politik.

#### h. Kreativitas

Kreativitas dalam menyusun strategi kampanye menjadi kunci dalam menarik perhatian dan dukungan pemilih. Kreativitas tidak hanya mencakup cara penyampaian pesan, tetapi juga bagaimana kandidat dapat membedakan diri dari pesaing dengan ide-ide inovatif yang menarik perhatian publik. Menurut Chen (2024), kontestan pemilu yang mampu menghadirkan ide-ide yang inovatif dan kreatif dalam kampanye memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan hati pemilih. Ini karena kreativitas dapat memecah kebosanan dan rutinitas kampanye tradisional, menawarkan sesuatu yang baru dan segar kepada pemilih. Salah satu cara untuk mengintegrasikan kreativitas dalam kampanye adalah melalui penggunaan

teknologi dan media digital. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube memungkinkan para kandidat untuk berinteraksi dengan pemilih melalui konten visual yang menarik dan mudah diakses. Misalnya, video pendek yang menampilkan visi dan misi kandidat dapat dengan cepat menyebar dan mencapai audiens yang lebih luas. Menurut Garcia (2024), konten yang kreatif dan menarik di platform digital dapat menjadi alat efektif untuk menarik perhatian dan dukungan pemilih muda. Dengan memanfaatkan fitur-fitur unik dari masing-masing platform, seperti filter kreatif di Instagram atau tantangan viral di TikTok, kandidat dapat menciptakan kampanye yang dinamis dan interaktif.

Kreativitas juga bisa diterapkan dalam bentuk kampanye fisik. Misalnya, mengadakan acara-acara yang tidak biasa seperti konser amal, festival seni, atau kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat. Acara-acara semacam ini tidak hanya menarik perhatian publik tetapi juga memberikan kesempatan bagi kandidat untuk berinteraksi langsung dengan pemilih dalam suasana yang lebih santai dan menyenangkan. Menurut Brown (2023), acara-acara kreatif seperti ini dapat menciptakan kenangan positif dan mendalam di benak pemilih, yang dapat meningkatkan loyalitas dan dukungan terhadap kandidat. Pendekatan kreatif lainnya adalah dengan mengadopsi isu-isu yang sedang tren dan relevan di kalangan masyarakat. Misalnya, kampanye yang fokus pada isu-isu lingkungan dan keberlanjutan dapat menarik perhatian pemilih muda yang peduli terhadap masa depan planet ini. Menurut Lee (2024), kampanye yang mengangkat isu-isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari pemilih akan lebih mudah resonan dan mendapatkan dukungan. Kandidat bisa mengadakan kegiatan seperti pembersihan pantai atau penanaman pohon yang tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap lingkungan tetapi juga melibatkan pemilih secara langsung.



# 2024

## BAB III

# PERAN AGAMA DALAM PILPRES 2024

---

---

Pada Pilpres 2024 di Indonesia, peran agama menjadi salah satu aspek penting yang memengaruhi dinamika politik dan preferensi pemilih. Agama tidak hanya menjadi faktor identitas, tetapi juga menjadi landasan bagi pemilih dalam menilai integritas, nilai, dan visi dari para calon presiden dan wakil presiden. Peran agama juga tercermin dalam strategi kampanye, di mana para kandidat berupaya untuk membangun citra yang Islami atau religius untuk menarik dukungan dari pemilih yang beragama Islam, mayoritas di Indonesia.

### A. Pengaruh Tokoh Agama

#### 1. Dukungan Dan Fatwa Politik

Tokoh agama di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk opini publik dan preferensi politik umat. Dukungan dan fatwa politik yang dikeluarkan oleh tokoh agama sering kali menjadi pedoman bagi banyak umat dalam menentukan pilihan politik.

##### a. Legitimasi Moral dan Spiritual

Legitimasi moral dan spiritual yang diberikan oleh tokoh agama memiliki pengaruh yang signifikan dalam konteks politik di Indonesia. Dukungan dari tokoh agama memberikan kandidat semacam sertifikasi yang menunjukkan bahwa memiliki integritas dan kejujuran. Menurut Fealy (2020), dukungan dari tokoh agama mampu meningkatkan citra kandidat di mata pemilih yang religius, karena tokoh agama dianggap sebagai figur moral yang memiliki otoritas spiritual. Dukungan ini tidak hanya membantu kandidat dalam mendapatkan kepercayaan dari pemilih tetapi juga memperluas basis dukungan. Organisasi besar

seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki sejarah panjang dalam mempengaruhi arah politik di Indonesia, dan dukungan sering kali menjadi penentu bagi banyak pemilih.

Ketika seorang kandidat mendapatkan dukungan dari tokoh agama yang dihormati, itu sering kali dianggap sebagai tanda bahwa kandidat tersebut berkomitmen pada nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Di negara dengan populasi mayoritas Muslim seperti Indonesia, di mana nilai-nilai agama sangat dijunjung tinggi, dukungan ini menjadi sangat penting. Kandidat yang didukung oleh tokoh agama sering kali dianggap lebih bermoral dan sesuai dengan ajaran agama, yang penting bagi pemilih yang religius. Fealy (2020) mencatat bahwa dalam beberapa pemilu sebelumnya, dukungan dari tokoh agama telah berperan penting dalam menentukan hasil pemilihan, menunjukkan seberapa besar pengaruh dalam politik Indonesia.

Dukungan dari tokoh agama juga membawa kekuatan jaringan dan komunitas yang dipimpin. Organisasi seperti NU dan Muhammadiyah memiliki jutaan anggota yang aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Dukungan dari tokoh-tokoh ini berarti bahwa kandidat tidak hanya mendapatkan dukungan dari individu-individu tetapi juga dari komunitas yang besar dan terorganisir. Fealy (2020) menunjukkan bahwa jaringan ini dapat digunakan untuk kampanye dan mobilisasi politik, meningkatkan efektivitas strategi kampanye kandidat. Dengan dukungan dari organisasi keagamaan besar, kandidat dapat lebih mudah menjangkau pemilih di berbagai lapisan masyarakat dan mendapatkan dukungan yang lebih luas.

Dukungan dari tokoh agama juga dapat mempengaruhi pandangan pemilih yang berada di tengah atau yang ragu-ragu. Banyak pemilih yang mungkin tidak memiliki preferensi politik yang kuat dapat dipengaruhi oleh pandangan dan rekomendasi tokoh agama yang dipercayai. Menurut penelitian Fealy (2020), tokoh agama memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan antara politik dan agama, memberikan panduan yang dapat membantu pemilih membuat keputusan yang lebih informasi. Dalam banyak kasus, pemilih yang ragu-ragu dapat beralih mendukung kandidat yang mendapatkan dukungan dari

tokoh agama yang dihormati, sehingga meningkatkan peluang kandidat tersebut untuk menang.

b. Fatwa Politik sebagai Alat Mobilisasi

Fatwa politik merupakan instrumen penting dalam mobilisasi politik di kalangan umat Islam, terutama di Indonesia. Pernyataan resmi dari tokoh agama yang mengarahkan umat untuk mendukung atau menolak seorang kandidat memberikan bimbingan moral dan spiritual yang diikuti oleh banyak pemeluk agama dengan serius. Menurut Van Bruinessen (2013), fatwa politik bukan hanya sekadar pernyataan, tetapi sebuah alat mobilisasi yang kuat. Fatwa ini mampu mengarahkan pilihan politik umat sesuai dengan ajaran agama dan memperkuat kohesi di antara pendukung kandidat yang didukung oleh tokoh agama tersebut. Fatwa politik bekerja efektif karena otoritas moral dan spiritual dari ulama yang mengeluarkannya. Dalam masyarakat yang sangat menghormati tokoh agama, fatwa dianggap sebagai bimbingan yang harus diikuti. Ulama yang berpengaruh memiliki kemampuan untuk menyatukan dan menggerakkan umat melalui fatwa, yang sering kali disampaikan dalam khutbah Jumat, pengajian, atau melalui media massa dan media sosial. Van Bruinessen (2013) mencatat bahwa pengaruh ulama dalam mengeluarkan fatwa politik dapat mengubah lanskap politik secara signifikan, terutama ketika fatwa tersebut menasar isu-isu yang relevan dan sensitif bagi komunitas keagamaan.

Fatwa politik juga memperkuat kohesi di antara pendukung kandidat tertentu dengan memberikan landasan moral yang kokoh untuk dukungan. Ketika sebuah fatwa dikeluarkan untuk mendukung atau menolak kandidat, umat merasa memiliki pembenaran moral dan spiritual untuk tindakan politik. Ini bukan hanya tentang memilih kandidat tertentu, tetapi juga tentang memenuhi kewajiban agama, yang memberikan motivasi tambahan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Van Bruinessen (2013) menunjukkan bahwa ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan umat yang sangat menghormati fatwa ulama. Lebih lanjut, fatwa politik dapat berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan massa dalam kegiatan kampanye dan mobilisasi pemilih. Ulama yang

mengeluarkan fatwa sering kali juga menggerakkan umat melalui berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, majelis taklim, dan pertemuan-pertemuan lain. Fatwa yang dikeluarkan dapat menjadi panggilan untuk tindakan, mendorong umat untuk terlibat lebih aktif dalam kampanye, menyebarkan pesan, dan mengajak orang lain untuk mendukung kandidat yang disetujui oleh ulama. Van Bruinessen (2013) menyatakan bahwa ini dapat menciptakan gerakan politik berbasis agama yang kuat dan berpengaruh dalam pemilu.

c. Dukungan dari Tokoh Agama Terkemuka

Dukungan dari tokoh agama terkemuka memiliki dampak yang signifikan dalam pemilihan presiden di Indonesia, terutama dalam Pilpres 2024. Tokoh agama seperti KH. Ma'ruf Amin, yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia, memiliki pengaruh besar karena kredibilitas dan reputasinya di mata masyarakat. Dukungan dari tokoh agama yang memiliki otoritas moral dan spiritual dapat memberikan dorongan signifikan bagi kandidat yang didukung. Seperti yang diungkapkan oleh Mietzner (2021), tokoh agama dengan kredibilitas tinggi dapat meningkatkan kepercayaan pemilih terhadap kandidat tersebut.

Ketika seorang tokoh agama terkemuka menyatakan dukungannya secara terbuka, hal ini tidak hanya menguntungkan secara moral tetapi juga strategis bagi kandidat tersebut. Dukungan ini sering kali diterima oleh pemilih sebagai rekomendasi yang harus dipertimbangkan dengan serius. Pemilih yang ragu-ragu atau berada di tengah-tengah bisa terpengaruh oleh pandangan tokoh agama yang dihormati. Dengan adanya dukungan dari tokoh agama, kandidat tersebut bisa mendapatkan lebih banyak simpati dan dukungan dari pemilih yang mungkin sebelumnya tidak yakin atau netral. Menurut Mietzner (2021), dukungan semacam ini sangat penting karena dapat mengubah dinamika pemilih dan meningkatkan peluang kemenangan kandidat.

Dukungan dari tokoh agama terkemuka juga memiliki dampak mobilisasi. Tokoh agama sering kali memiliki pengikut yang setia dan jaringan sosial yang luas melalui masjid,

pesantren, dan organisasi keagamaan lainnya. Ketika mendukung seorang kandidat, jaringan ini bisa digunakan untuk menyebarkan pesan kampanye dan menggerakkan pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tokoh agama dengan kredibilitas tinggi tidak hanya mempengaruhi pilihan individu tetapi juga mampu menggerakkan massa untuk mendukung kandidat yang dipilih. Ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan dari tokoh agama dalam memperkuat basis dukungan kandidat dan meningkatkan partisipasi pemilih.

Dukungan dari tokoh agama terkemuka juga bisa menambah dimensi kepercayaan pada kandidat terkait integritas dan moralitas. Dalam konteks politik Indonesia, di mana isu-isu keagamaan sering kali menjadi faktor penting dalam pemilihan, dukungan dari tokoh agama yang dihormati dapat membantu memperbaiki citra kandidat dan menangkis serangan politik dari lawan. Mietzner (2021) menekankan bahwa dukungan dari tokoh agama dapat memberikan keuntungan strategis dengan meningkatkan citra positif kandidat di mata pemilih yang religius, serta memperkuat pesan kampanye tentang kejujuran, keadilan, dan komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan.

d. Fatwa Politik dari Lembaga Agama

Fatwa politik yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga agama seperti Dewan Syariah Nasional memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah pilihan politik pemilih di Indonesia. Lembaga-lembaga ini sering kali dipandang sebagai otoritas yang memiliki legitimasi moral dan spiritual, dan fatwa yang dikeluarkan dianggap mencerminkan pandangan kolektif dari komunitas keagamaan. Woodward (2011) menyatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga agama dapat mengarahkan pemilih untuk mendukung kandidat yang dianggap paling sesuai dengan nilai-nilai agama.

Fatwa dari lembaga agama biasanya melalui proses konsultasi dan deliberasi yang melibatkan para ulama terkemuka. Proses ini memberikan legitimasi yang kuat terhadap fatwa yang dikeluarkan, karena dianggap sebagai hasil dari pemikiran mendalam dan kolektif yang berlandaskan pada ajaran agama. Dalam konteks ini, fatwa politik bukan hanya sekadar pendapat

individu, tetapi merupakan keputusan yang mencerminkan pandangan resmi dan kolektif dari sebuah lembaga keagamaan yang dihormati. Ini memberikan panduan yang jelas dan dapat dipercaya bagi pemilih yang ingin membuat keputusan politik yang sesuai dengan keyakinan agama.

Fatwa politik yang dikeluarkan oleh lembaga agama juga dapat berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik umat. Ketika sebuah lembaga agama mengeluarkan fatwa yang mendukung atau menolak seorang kandidat, ini sering kali diikuti oleh kampanye aktif di kalangan umat untuk mengikuti arahan tersebut. Fatwa ini bisa digunakan untuk memobilisasi pemilih melalui jaringan masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan lainnya. Dengan cara ini, fatwa politik berfungsi sebagai alat mobilisasi yang efektif, menggerakkan umat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan mendukung kandidat yang direkomendasikan oleh lembaga agama.

Fatwa politik dari lembaga agama juga dapat memperkuat kohesi di antara pemilih yang religius. Fatwa ini memberikan panduan yang jelas dan koheren tentang pilihan politik yang sesuai dengan nilai-nilai agama, sehingga membantu mengurangi kebingungan atau perbedaan pendapat di kalangan umat. Dengan mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga agama yang dihormati, pemilih merasa lebih yakin dan kompak dalam mendukung kandidat tertentu. Ini menciptakan kohesi yang lebih kuat di kalangan pemilih yang religius, yang pada gilirannya memperkuat basis dukungan bagi kandidat yang mendapatkan dukungan dari lembaga agama.

e. Pengaruh Jangka Panjang dan Jaringan Sosial

Dukungan dan fatwa politik dari tokoh agama tidak hanya memiliki dampak dalam jangka pendek saat pemilihan berlangsung, tetapi juga memiliki pengaruh jangka panjang yang signifikan dalam memperkuat jaringan sosial dan politik di masyarakat. Ketika sebuah tokoh agama mendukung atau mengeluarkan fatwa politik untuk mendukung seorang kandidat, hal itu tidak hanya memengaruhi pemilih secara individual, tetapi juga mempengaruhi komunitas yang lebih besar di sekitarnya. Jaringan sosial yang dibangun di sekitar masjid, pesantren, dan

organisasi keagamaan lainnya menjadi kanal penting untuk menyebarkan dukungan politik. Ketika seorang tokoh agama yang dihormati memberikan dukungannya kepada seorang kandidat, pesan tersebut akan tersebar melalui jaringan sosial yang ada dalam komunitas keagamaan tersebut. Para pengikut dan simpatisan tokoh agama tersebut akan memperkuat dukungan terhadap kandidat yang direkomendasikan, dan hal ini memperkuat solidaritas di antara umat.

Dukungan dari tokoh agama dan fatwa politik juga membantu membangun jaringan politik yang kuat di tingkat lokal. Dalam banyak kasus, tokoh-tokoh agama memiliki pengaruh yang luas dan dihormati di tingkat lokal, dan dukungan dapat mengarahkan umat untuk mendukung kandidat tertentu dalam pemilihan lokal, seperti pemilihan kepala daerah. Melalui jaringan sosial dan politik yang ada di tingkat lokal, dukungan dari tokoh agama dapat memobilisasi massa untuk berpartisipasi dalam proses politik lokal. Selain itu, pengaruh jangka panjang dari dukungan dan fatwa politik dapat membentuk hubungan yang langgeng antara kandidat politik dan komunitas keagamaan. Ketika seorang kandidat didukung oleh tokoh agama dan diterima dengan baik oleh komunitas keagamaan, hubungan tersebut cenderung bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kandidat yang mendapatkan dukungan dari tokoh agama memiliki kecenderungan untuk memperhatikan kepentingan dan aspirasi komunitas keagamaan tersebut dalam kebijakan dan program-program setelah terpilih.

## **2. Mobilisasi Umat**

Mobilisasi umat adalah strategi yang sering digunakan oleh tokoh agama untuk mempengaruhi hasil pemilu di Indonesia. Melalui jaringan masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan, tokoh agama dapat menggerakkan massa untuk mendukung kandidat tertentu.

### **a. Mobilisasi Melalui Khutbah, Pengajian, dan Kegiatan Keagamaan**

Mobilisasi umat melalui kegiatan keagamaan, seperti khutbah, pengajian, dan pertemuan keagamaan lainnya, telah menjadi strategi yang sangat efektif dalam menyebarkan pesan

politik di Indonesia. Terutama di tengah masyarakat yang mayoritas Muslim, kegiatan keagamaan menjadi platform penting di mana tokoh agama dapat berinteraksi langsung dengan umat dan mempengaruhi pemikiran terkait isu politik dan dukungan terhadap kandidat tertentu. Khutbah Jumat, sebagai salah satu contoh utama, adalah momen yang sangat signifikan dalam kehidupan umat Muslim. Ribuan umat berkumpul di masjid setiap Jumat untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam atau ulama setempat. Tokoh agama yang memiliki pengaruh dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan pesan politik dan mengajak umat untuk mendukung kandidat yang didukung. Pesan yang disampaikan dalam konteks keagamaan ini seringkali memiliki legitimasi yang tinggi di mata umat, karena dianggap berasal dari otoritas agama.

Pengajian rutin di masjid atau pesantren juga menjadi sarana penting dalam mobilisasi politik melalui kegiatan keagamaan. Pengajian adalah waktu di mana umat berkumpul untuk belajar agama dan mendiskusikan berbagai isu kehidupan, termasuk isu politik. Tokoh agama yang memiliki pengaruh dapat menggunakan pengajian ini sebagai kesempatan untuk menyampaikan pesan politik dan membahas pentingnya mendukung kandidat tertentu dalam pemilihan. Pertemuan keagamaan lainnya, seperti ceramah, diskusi, atau acara sosial di masjid atau lembaga keagamaan lainnya, juga menjadi ajang mobilisasi politik yang efektif. Di sini, umat dapat berinteraksi secara lebih langsung dengan tokoh agama dan mendengarkan pandangan tentang isu politik yang relevan. Keakraban dan keintiman dalam pertemuan keagamaan semacam ini memungkinkan pesan politik untuk disampaikan dengan lebih persuasif dan mendalam.

Kegiatan keagamaan juga menjadi forum untuk penyebaran informasi politik. Tokoh agama sering kali menyampaikan informasi tentang kandidat, program-program, dan urgensi mendukung dalam konteks agama. Informasi ini dapat membantu umat dalam membuat keputusan politik yang lebih terinformasi dan menyebarkan pesan politik lebih lanjut ke dalam komunitas.

Selain di masjid dan pesantren, kegiatan keagamaan juga dapat mencakup acara-acara sosial di luar ruangan, seperti penggalangan dana untuk kegiatan amal atau acara bersama di rumah-rumah umat. Melalui kegiatan semacam ini, tokoh agama dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan umat dan lebih mudah mempengaruhi secara politik. Acara sosial semacam ini juga dapat menjadi momen penting untuk membahas isu-isu politik dan mendapatkan dukungan untuk kandidat tertentu.

b. Penggunaan Media Sosial dan Platform Digital

Penggunaan media sosial dan platform digital telah menjadi bagian integral dari strategi mobilisasi politik, termasuk dalam konteks dukungan dari tokoh agama. Dengan pertumbuhan penggunaan media sosial di kalangan masyarakat, tokoh agama telah memanfaatkan platform-platform ini sebagai alat untuk menyebarkan pesan politik, memobilisasi umat, dan mempengaruhi opini publik. Menurut penelitian oleh Slama (2017), fenomena ini semakin terlihat signifikan dalam konteks Pilpres 2024 di Indonesia. Salah satu aspek penting dari penggunaan media sosial oleh tokoh agama adalah kemampuannya untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Dengan memiliki pengikut yang besar di platform seperti Facebook, Instagram, dan YouTube, tokoh agama dapat menyampaikan pesan politik kepada ribuan bahkan jutaan orang dengan cepat dan efektif. Hal ini menciptakan kesempatan untuk memperluas basis dukungan dan mempengaruhi opini publik secara signifikan.

Platform media sosial juga memberikan fleksibilitas dalam menyampaikan pesan politik. Tokoh agama dapat menggunakan berbagai jenis konten, mulai dari ceramah, diskusi, hingga postingan tulisan, untuk menyebarkan pandangan politik. Misalnya, dapat mengunggah video ceramah, gambar, atau meme yang relevan dengan isu politik tertentu untuk menarik perhatian dan mendapatkan respons dari pengikutnya. Selain menyampaikan pesan politik secara langsung, media sosial juga memungkinkan tokoh agama untuk berinteraksi secara langsung dengan pengikutnya, dapat merespons komentar, pertanyaan, atau masukan dari pengikutnya, menciptakan keterlibatan yang

lebih dalam dan memperkuat hubungan antara tokoh agama dan umatnya. Interaksi ini juga dapat digunakan untuk memperjelas pandangan politik, memberikan penjelasan tambahan, atau membangun dukungan lebih lanjut untuk kandidat yang didukung.

Tokoh agama dapat mengatur kampanye digital yang terkoordinasi melalui media sosial dapat menggunakan fitur-fitur seperti *hashtag* untuk menggerakkan kampanye spesifik, mengadakan siaran langsung untuk berbicara langsung kepada pengikutnya, atau mengorganisir acara virtual untuk memobilisasi dukungan. Pendekatan ini memungkinkan tokoh agama untuk secara aktif terlibat dalam proses politik dan meningkatkan visibilitas serta dampak dari pesan politik yang disampaikan. Namun, penggunaan media sosial oleh tokoh agama juga menimbulkan beberapa tantangan. Misalnya, penyebaran informasi yang tidak valid atau berita palsu dapat menyebabkan kebingungan atau kekacauan di antara pengikutnya. Oleh karena itu, penting bagi tokoh agama untuk memastikan bahwa pesan politik yang disampaikan didukung oleh fakta yang akurat dan dapat dipercaya.

c. Kerja Sama dengan Organisasi Keagamaan Besar

Kerja sama dengan organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah menjadi strategi penting dalam mobilisasi politik di Indonesia. Organisasi-organisasi ini memiliki pengaruh yang signifikan di kalangan umat Islam dan memiliki jaringan yang luas, mencakup berbagai lapisan masyarakat. Menurut Hefner (2018), kerja sama dengan organisasi keagamaan besar memberikan keuntungan strategis bagi para kandidat, terutama dalam menggerakkan massa dan meningkatkan partisipasi politik. Salah satu keunggulan kerja sama dengan organisasi keagamaan besar adalah struktur organisasi yang terorganisir dan disiplin. NU dan Muhammadiyah, sebagai contoh, memiliki struktur hierarki yang kuat, dengan pemimpin tertinggi yang dapat memberikan arahan kepada anggota. Hal ini memungkinkan untuk mobilisasi yang efisien dan terkoordinasi, di mana pesan politik dan dukungan

terhadap kandidat tertentu dapat disebarakan secara sistematis ke seluruh jaringan organisasi.

Organisasi keagamaan besar sering mengadakan berbagai acara dan kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung agenda politik. Seminar, *workshop*, diskusi panel, dan acara sosial lainnya menjadi wadah yang tepat untuk menyebarkan pesan politik dan memperkenalkan kandidat kepada anggota dan simpatisan organisasi. Dalam konteks ini, kerja sama dengan organisasi keagamaan besar memberikan akses yang lebih mudah bagi para kandidat untuk berinteraksi langsung dengan khalayak dan memperluas basis dukungan. Selain sebagai platform untuk menyebarkan pesan politik, kerja sama dengan organisasi keagamaan besar juga dapat meningkatkan citra kandidat di mata masyarakat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan amal yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut, para kandidat dapat menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari anggota organisasi serta masyarakat umum yang menghargai kontribusi sosial positif.

Kerja sama dengan organisasi keagamaan besar juga memberikan akses yang lebih mudah kepada para kandidat untuk mencapai lapisan masyarakat yang beragam. Sebagai lembaga yang merangkul berbagai kelompok sosial dan ekonomi, organisasi keagamaan besar dapat menjadi jembatan untuk menghubungkan para kandidat dengan beragam segmen masyarakat, termasuk yang berada di daerah pedesaan dan pinggiran kota yang sulit dijangkau. Namun, kerja sama dengan organisasi keagamaan besar juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah risiko terkait dengan politisasi agama dan potensi konflik antar-kelompok. Dalam beberapa kasus, dukungan dari organisasi keagamaan besar dapat memicu polarisasi dan konflik di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi para kandidat dan organisasi keagamaan untuk memastikan bahwa kerja sama didasarkan pada nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan kedamaian.

## **B. Potensi Polarisasi Agama**

Potensi polarisasi agama dalam pemilu di Indonesia merupakan fenomena yang telah muncul dalam beberapa pemilu sebelumnya, menyebabkan ketegangan sosial dan politik yang signifikan. Polarisasi ini sering kali dipicu oleh kampanye yang menggunakan identitas agama untuk menggalang dukungan, yang pada gilirannya dapat memperdalam perpecahan di masyarakat. Berikut adalah pembahasan tentang potensi polarisasi agama dengan contoh kasus dari pemilu sebelumnya.

### **1. Contoh Kasus dari Pemilu Sebelumnya**

#### **a. Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 menjadi sorotan internasional karena menggambarkan secara tajam bagaimana polarisasi agama dapat memengaruhi politik Indonesia. Kasus ini menjadi salah satu contoh paling menonjol dari konflik yang dipicu oleh isu agama dalam proses politik. Pilkada tersebut mempertemukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), seorang gubernur petahana beragama Kristen dan etnis Tionghoa, dengan Anies Baswedan, seorang politikus Muslim. Melalui kronologi peristiwa yang diawali dengan kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok, kemudian dilanjutkan dengan aksi bela Islam, dan terakhir dengan kampanye identitas yang mengedepankan narasi agama, kita dapat memahami secara lebih dalam dampak polarisasi agama dalam politik Indonesia.

Kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok menjadi puncak dari polarisasi agama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok didakwa melakukan penistaan agama setelah mengutip sebuah ayat dari Al-Qur'an dalam pidatonya di Kepulauan Seribu. Pidato ini dianggap menyinggung umat Islam dan memicu kemarahan di kalangan kelompok Islam konservatif. Menurut Mietzner (2018), kasus ini segera diambil alih oleh kelompok-kelompok Islam radikal yang memanfaatkan momen ini untuk menggalang kekuatan politik. Ahok dihadapkan pada tuntutan hukum dan tekanan sosial yang massif, yang mengarah pada polarisasi yang semakin dalam di masyarakat.

Respons terhadap kasus penistaan agama tercermin dalam serangkaian demonstrasi besar-besaran yang dikenal sebagai Aksi Bela Islam. Demonstrasi ini, yang diorganisir oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, sebuah koalisi organisasi Islam konservatif, menuntut agar Ahok diadili dan dipenjara. Aksi-aksi ini menunjukkan kekuatan mobilisasi kelompok Islam dan bagaimana isu agama dapat digunakan untuk mempengaruhi politik. Fealy dan White (2019) menjelaskan bahwa aksi-aksi ini menegaskan solidaritas umat Islam dan meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintah dan aparat hukum.

Selama kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, narasi agama menjadi salah satu elemen kunci yang digunakan oleh kedua kandidat untuk memenangkan dukungan. Kampanye Anies Baswedan didukung oleh beberapa organisasi Islam dan menggunakan narasi agama untuk menarik pemilih Muslim. Anies dan tim kampanyenya berhasil membangun citra sebagai calon yang lebih dekat dengan aspirasi umat Islam. Sementara itu, Ahok dihadapkan pada kampanye hitam yang menggambarkan dirinya sebagai anti-Islam. Aspinall (2017) membahas bahwa penggunaan narasi agama dalam kampanye ini memperdalam polarisasi di masyarakat, membagi pendukung antara kelompok yang pro dan kontra terhadap kedua kandidat.

Dampak dari polarisasi agama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 sangatlah signifikan. Polarisasi ini menyebabkan perpecahan sosial yang dalam di masyarakat. Hubungan antar kelompok etnis dan agama menjadi tegang, dan muncul ketidakpercayaan antara pendukung masing-masing calon. Pepinsky (2018) mencatat bahwa polarisasi ini menciptakan garis pemisah yang jelas antara kelompok Muslim konservatif dan kelompok pendukung pluralisme. Polarisasi semacam ini berpotensi merusak kerukunan sosial dan memperlebar kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat.

Polarisasi agama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 juga berdampak pada legitimasi demokrasi di Indonesia. Penggunaan isu agama dalam politik menciptakan preseden buruk dan meningkatkan risiko politisasi agama dalam pemilu mendatang.

Mietzner (2018) menunjukkan bahwa polarisasi semacam ini dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan memicu ketidakstabilan politik jangka panjang. Masyarakat menjadi lebih skeptis terhadap integritas pemilu dan proses politik secara keseluruhan, mengancam fondasi demokrasi di Indonesia.

Pilkada DKI Jakarta 2017 memberikan pelajaran berharga tentang bahaya polarisasi agama dalam politik. Kasus ini membahas pentingnya menjaga toleransi antar agama dan pluralisme dalam konteks demokrasi. Langkah-langkah untuk mengatasi polarisasi agama harus mencakup pendekatan yang inklusif dan dialog antar berbagai kelompok masyarakat. Hanya dengan membangun kesepahaman dan kerjasama antaragama, Indonesia dapat menghindari konflik yang merusak dan memperkuat fondasi demokrasi yang kokoh.

b. Kasus Pemilu Presiden 2019

Pemilihan Presiden Indonesia pada tahun 2019 antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto membahas dampak polarisasi agama dalam politik Indonesia. Isu-isu agama dan identitas digunakan sebagai alat kampanye oleh kedua kubu untuk menarik dukungan pemilih, menciptakan atmosfer politik yang tegang dan terkadang memicu konflik di antara masyarakat. Kampanye Prabowo Subianto banyak didukung oleh kelompok Islam konservatif, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. Prabowo memanfaatkan sentimen keagamaan untuk menarik dukungan dari umat Islam yang merasa terpinggirkan atau tidak terwakili secara politik. Menurut Warburton dan Aspinall (2019), kampanye Prabowo sering kali mengangkat isu-isu keagamaan dan identitas untuk memperkuat basis dukungan. Hal ini tercermin dalam retorika kampanye yang membahas perlindungan kepentingan Islam dan nilai-nilai tradisional.

Jokowi berusaha untuk menunjukkan identitas keislamannya dengan menggandeng Ma'ruf Amin, seorang ulama terkemuka dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai calon wakil presiden. Langkah ini diambil untuk menepis anggapan bahwa Jokowi anti-Islam dan untuk menarik pemilih dari kalangan Muslim moderat yang mungkin ragu untuk memberikan

dukungan kepada seorang presiden petahana. Menurut Fealy (2019), strategi ini mencerminkan upaya Jokowi untuk menanggapi isu-isu identitas dan agama yang diangkat oleh lawannya.

Dampak dari polarisasi agama dalam Pemilu 2019 sangatlah signifikan. Pertama, kampanye negatif dan penyebaran *hoaks* menjadi ciri khas dari polarisasi agama dalam pemilihan tersebut. Menurut Lim (2020), kedua kubu saling melontarkan tuduhan dan fitnah yang memperburuk polarisasi. Misalnya, beredar *hoaks* bahwa Jokowi adalah antek komunis dan tidak pro-Islam, sementara Prabowo dituduh sebagai calon yang didukung oleh kelompok radikal. Penyebaran *hoaks* dan kampanye negatif semacam ini tidak hanya memperdalam divisi di antara masyarakat, tetapi juga mengancam integritas proses demokratis.

Polarisasi agama dalam Pemilu 2019 memiliki dampak jangka panjang yang mengkhawatirkan. Menurut Hadiz (2020), penggunaan isu agama sebagai alat politik berpotensi memperdalam perpecahan di masyarakat dan merusak harmoni sosial. Polarisasi ini juga dapat memperkuat kelompok-kelompok ekstremis yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politik. Hal ini menciptakan lingkungan politik yang kurang stabil dan dapat mengganggu proses demokrasi jangka panjang di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk meredakan polarisasi agama dalam politik. Upaya untuk membangun dialog antar berbagai kelompok masyarakat, mendukung kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, dan memperkuat institusi-institusi demokratis adalah langkah-langkah penting yang dapat dilakukan untuk mengatasi polarisasi agama. Selain itu, pendekatan yang inklusif dan mengedepankan nilai-nilai pluralisme dan toleransi akan membantu memperkuat fondasi demokrasi Indonesia dan memastikan bahwa proses politik berlangsung secara damai dan bermartabat.

## **2. Upaya Mengatasi Politisasi Agama**

Politisasi agama dalam konteks pemilu dan politik di Indonesia telah menyebabkan ketegangan sosial dan potensi perpecahan. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai strategi dapat diterapkan.

a. Promosi Pendidikan Toleransi

Promosi pendidikan toleransi menjadi salah satu upaya utama dalam mengatasi politisasi agama di Indonesia. Dengan fokus pada nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan penghormatan terhadap perbedaan, pendidikan ini diharapkan dapat mengurangi sentimen sektarian dan polarisasi agama yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi pendidikan toleransi melibatkan berbagai strategi, mulai dari pengembangan kurikulum berbasis kebhinekaan hingga pelatihan guru dan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung dialog antaragama.

- 1) Pentingnya mengembangkan kurikulum berbasis nilai-nilai kebhinekaan tidak bisa diragukan lagi. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama untuk merancang kurikulum yang menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan mempromosikan toleransi. Program pendidikan semacam ini harus diperkenalkan sejak usia dini dan terus diperkuat hingga pendidikan tinggi. Mengutip Parker (2016), pendidikan multikultural dapat membantu membentuk generasi muda yang lebih menerima perbedaan dan menolak politisasi agama. Dengan mendalaminya sejak dini, anak-anak akan terbiasa dengan nilai-nilai toleransi dan memahami kepentingannya dalam masyarakat yang multikultural.
- 2) Pelatihan guru menjadi hal yang krusial dalam implementasi pendidikan toleransi. Guru adalah agen perubahan utama di sekolah, dan perlu dilatih untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi dengan sensitif. Pelatihan ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang isu-isu keagamaan, tetapi juga teknik untuk menangani perbedaan pandangan di kelas. Sebagaimana disebutkan oleh Baidhawry (2007), guru yang terlatih dalam pendidikan toleransi dapat berperan kunci dalam mencegah radikalisme di kalangan pelajar. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan guru yang komprehensif

dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan toleransi diterapkan secara efektif di sekolah.

- 3) Kegiatan ekstrakurikuler memiliki potensi besar dalam mempromosikan dialog antaragama dan kerjasama antar siswa dari latar belakang yang berbeda. Sekolah dapat mengadakan kegiatan seperti seminar, lokakarya, atau acara sosial yang melibatkan partisipasi siswa dari berbagai agama dan budaya. Dalam kegiatan semacam ini, siswa diajak untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, dan memahami pandangan yang berbeda secara terbuka dan toleran. Seperti yang diungkapkan oleh Hadi (2019), kegiatan semacam ini dapat membantu membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati di antara siswa. Dengan menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan mendukung, sekolah dapat menjadi tempat yang aman untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan mengatasi polarisasi agama.

b. Regulasi Kampanye Politik

Mengatur kampanye politik untuk mencegah penggunaan isu-isu agama sebagai alat politik adalah langkah yang penting dalam menjaga integritas proses demokrasi. Menurut Mietzner (2018), regulasi yang ketat dapat membantu meminimalisir penggunaan agama untuk tujuan politik. Dalam konteks ini, langkah-langkah regulasi termasuk penegakan hukum yang tegas, peraturan kampanye yang jelas, dan pengawasan media sosial yang efektif.

Gambar 5. Kampanye Politik



Sumber: *Humas Indonesia*

Lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus memiliki wewenang yang kuat untuk menindak tegas kampanye yang menggunakan isu agama secara negatif. Ini termasuk pemberian sanksi kepada kandidat atau partai politik yang melanggar aturan. Sebagaimana dikemukakan oleh Aspinall (2017), penegakan hukum yang konsisten dapat mengurangi insiden politisasi agama. Dengan menegakkan aturan dengan ketat, lembaga-lembaga ini dapat memberikan sinyal kuat bahwa penggunaan agama sebagai alat politik tidak akan ditoleransi dalam proses demokrasi. Peraturan kampanye harus diperjelas dan diperketat untuk melarang penggunaan agama sebagai alat kampanye. Ini mencakup larangan penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan politik dan penyebaran materi kampanye yang bersifat provokatif atau menghasut. Menurut Salim (2019), peraturan yang jelas dan tegas dapat membantu menjaga integritas proses pemilu. Dengan menetapkan batasan yang jelas, pihak berwenang dapat mencegah kampanye yang memanfaatkan isu agama untuk memecah belah masyarakat dan menghasut konflik.

Pengawasan media sosial menjadi aspek penting dalam mencegah politisasi agama. Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan politik yang mengandung unsur

agama. Oleh karena itu, pemerintah dan platform media sosial harus bekerja sama untuk memantau dan menghapus konten yang mempromosikan kebencian atau mempolitisasi agama. Menurut Lim (2020), pengawasan yang efektif terhadap media sosial dapat mencegah penyebaran *hoaks* dan kampanye negatif berbasis agama. Dengan mengawasi konten yang diposting secara *online*, pihak berwenang dapat menanggulangi upaya politisasi agama yang berpotensi merusak proses demokrasi. Selain langkah-langkah regulasi yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pemerintah, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran terkait penggunaan agama dalam kampanye politik. Pendidikan masyarakat tentang pentingnya menjaga netralitas agama dalam politik juga dapat menjadi langkah preventif yang efektif. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif politisasi agama, dapat menjadi garda terdepan dalam melawan upaya-upaya yang mengancam integritas proses demokrasi.

c. Dialog Antaragama

Memperkuat dialog antaragama merupakan langkah penting dalam mengatasi politisasi agama dan membangun pemahaman serta kerjasama di antara berbagai komunitas agama. Forum-forum komunikasi antaragama dapat menjadi wadah yang efektif untuk berdialog, menyelesaikan konflik, dan merancang program-program kerjasama. Ini dapat dilakukan mulai dari tingkat lokal hingga nasional, di mana berbagai pihak dapat saling berinteraksi dan memahami pandangan serta kepentingan masing-masing. Forum seperti ini dapat membantu memperkuat hubungan antar komunitas agama dan mengurangi ketegangan yang mungkin timbul. Selain forum komunikasi, kegiatan bersama antar berbagai komunitas agama juga penting dalam membangun rasa kebersamaan dan solidaritas. Gotong royong, perayaan hari besar keagamaan bersama, dan proyek sosial yang melibatkan berbagai komunitas agama dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan. Menurut Barton (2010), kegiatan bersama semacam ini dapat membantu mengatasi stereotip

negatif dan membangun saling pengertian di antara umat beragama.

Pemimpin agama juga memiliki peran yang sangat penting dalam mempromosikan dialog antaragama. Tidak hanya dapat menjadi mediator dalam konflik yang melibatkan berbagai komunitas agama, tetapi juga dapat mengadvokasi nilai-nilai perdamaian dan toleransi. Keterlibatan aktif pemimpin agama dalam dialog antaragama dapat memberikan pengaruh positif yang signifikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan toleran. Menurut Fealy (2018), pemimpin agama juga dapat menjadi contoh bagi umatnya dalam menjalin hubungan yang baik dengan komunitas agama lainnya. Dalam konteks Indonesia, dialog antaragama telah terbukti efektif dalam mengurangi konflik dan memperkuat kerukunan antar umat beragama. Misalnya, Program Pelayanan Sosial Bersama (PPSB) yang diinisiasi oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan salah satu contoh program yang berhasil dalam membangun dialog antaragama. Melalui program ini, berbagai komunitas agama bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dialog antaragama harus dilakukan dengan penuh rasa hormat dan kesetaraan. Dialog yang dilakukan dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan akan lebih efektif dalam mencapai pemahaman bersama. Menurut Woodward (2011), dialog yang dilandasi oleh rasa saling menghormati dapat membuka jalan bagi kerjasama yang lebih baik di masa depan. Dalam mengorganisir dialog antaragama, peran pemerintah juga sangat penting. Pemerintah dapat menjadi fasilitator yang mempromosikan dialog antaragama melalui kebijakan yang mendukung keragaman agama dan kepercayaan. Pemerintah juga dapat mengadakan program-program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman tentang agama-agama yang berbeda di kalangan masyarakat.

d. Penguatan *Civil society*

Penguatan organisasi masyarakat sipil (*civil society*) dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam melawan politisasi

agama dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi serta toleransi di Indonesia. *Civil society* yang kuat memiliki peran penting sebagai pengawas dan pengimbang dalam proses politik, sehingga langkah-langkah untuk memperkuatnya menjadi krusial. Salah satu langkah utama dalam penguatan *civil society* adalah melalui dukungan keuangan dan logistik. Organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam mempromosikan toleransi dan pluralisme membutuhkan sumber daya yang memadai untuk menjalankan program-program. Dukungan keuangan dapat datang dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, maupun donor internasional. Bantuan ini penting untuk memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung nilai-nilai demokrasi dan toleransi.

Pelatihan dan pemberdayaan merupakan langkah penting dalam memperkuat *civil society*. Pelatihan yang terarah dan pemberdayaan bagi aktivis dan anggota organisasi masyarakat sipil dapat meningkatkan kemampuan dalam advokasi, manajemen organisasi, dan mobilisasi massa. Dengan meningkatnya kapasitas individu-individu yang terlibat dalam *civil society*, dapat lebih efektif dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan toleransi serta mengatasi politisasi agama. Selanjutnya, membangun koalisi dan jaringan antar berbagai organisasi masyarakat sipil juga menjadi strategi penting dalam penguatan *civil society*. Kerjasama antar organisasi memungkinkan untuk saling mendukung, bertukar informasi, dan mengoordinasikan aksi-aksi. Dengan bergabung dalam koalisi dan jaringan, organisasi masyarakat sipil dapat meningkatkan suara dan memperkuat dampak dalam mempengaruhi kebijakan publik serta mengawasi proses politik.

Penguatan *civil society* bukan hanya tentang memperkuat organisasi secara individual, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan *civil society* secara keseluruhan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung keberadaan dan kegiatan organisasi masyarakat sipil. Dukungan dari pemerintah sangat diperlukan dalam memberikan

legitimasi dan perlindungan hukum bagi *civil society* , serta dalam memfasilitasi kerjasama antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, sektor swasta juga dapat berperan dalam penguatan *civil society* melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dukungan finansial dan teknis dari perusahaan-perusahaan dapat membantu meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan toleransi. Kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan *civil society* dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam mempromosikan masyarakat yang lebih inklusif dan toleran.

Penguatan *civil society* juga dapat didukung melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dan donor. Bantuan teknis dan finansial dari lembaga-lembaga ini dapat membantu memperluas jangkauan dan dampak organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional, maupun regional. Selain itu, kerjasama internasional juga dapat membuka akses bagi *civil society* untuk belajar dari pengalaman dan praktik terbaik di negara-negara lain dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan toleransi. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah penguatan *civil society* ini, Indonesia dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif, demokratis, dan toleran. *Civil society* yang kuat akan menjadi garda terdepan dalam melawan politisasi agama dan memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi serta toleransi sebagai fondasi utama bagi kemajuan bangsa.

# 2024

## **BAB IV**

# **PERAN POLITIK DALAM MENANGKAL POLARISASI**

---

---

Peran politik dalam menangkal polarisasi sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di tengah masyarakat yang semakin terfragmentasi. Di Indonesia, dengan keragaman etnis, budaya, dan agama yang begitu kaya, politisasi isu-isu sensitif kerap menjadi sumber perpecahan yang mendalam. Oleh karena itu, strategi politik yang inklusif dan kebijakan yang mempromosikan toleransi dan pluralisme menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya polarisasi yang dapat merusak tatanan demokrasi dan persatuan nasional.

### **A. Strategi Kampanye Anti-Polarisasi**

Pada konteks politik yang semakin terpolarisasi, strategi kampanye yang menekankan pada persatuan dan inklusivitas sangat penting. Kampanye positif dan inklusif serta kolaborasi antar partai merupakan dua pendekatan yang dapat membantu mengurangi ketegangan dan mempromosikan harmoni sosial.

#### **1. Kampanye Positif dan Inklusif**

Kampanye positif adalah pendekatan yang menekankan pada penyampaian pesan-pesan konstruktif, pencapaian, visi, dan rencana masa depan, daripada menyerang atau menjatuhkan lawan politik. Kampanye ini berfokus pada penguatan nilai-nilai positif dan meminimalisir retorika yang dapat memecah belah masyarakat. Kampanye inklusif, di sisi lain, berusaha melibatkan semua kelompok masyarakat, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau sosial, dalam proses politik.

a. Pentingnya Narasi Positif

Pentingnya narasi positif dalam kampanye politik telah menjadi fokus utama bagi para kandidat dalam berbagai kontes pemilihan, termasuk pemilihan di Indonesia. Menurut Fealy (2018), kampanye yang menekankan pencapaian dan visi positif dari calon pemimpin cenderung lebih efektif dalam membangun kepercayaan publik daripada kampanye yang didasarkan pada serangan terhadap lawan. Dalam konteks politik Indonesia, pendekatan ini berperan penting dalam membentuk suasana politik yang sehat dan mendorong diskusi konstruktif mengenai isu-isu yang penting bagi masyarakat. Kampanye politik yang mengusung narasi positif seringkali berhasil menarik perhatian pemilih karena menawarkan visi yang menjanjikan perubahan yang lebih baik. Dalam sebuah pemilihan, pemilih cenderung lebih responsif terhadap pesan-pesan yang memberikan harapan dan optimisme mengenai masa depan. Ketika kandidat mampu mengkomunikasikan visi secara jelas dan inspiratif, memiliki peluang yang lebih baik untuk memenangkan dukungan pemilih.

Kampanye positif juga membantu menciptakan iklim politik yang lebih harmonis dan meminimalisir polarisasi di tengah masyarakat. Ketika kandidat fokus pada pencapaian dan gagasan-gagasan yang membangun, cenderung mengurangi retorika yang berpotensi memecah belah masyarakat. Ini membantu menciptakan ruang bagi dialog yang lebih terbuka dan kolaboratif antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses politik. Kampanye yang didasarkan pada narasi positif juga memungkinkan kandidat untuk memperkuat citra sebagai pemimpin yang dapat dipercaya dan diandalkan. Dengan membahas prestasi dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat, kandidat dapat membangun reputasi yang kuat sebagai sosok yang peduli dan memiliki integritas. Ini sangat penting dalam memenangkan dukungan pemilih yang mencari pemimpin yang dapat dipercayai untuk mewakili kepentingan dengan baik.

Kampanye positif membuka ruang untuk diskusi yang lebih substansial mengenai isu-isu kebijakan yang relevan bagi masyarakat. Dengan memfokuskan perhatian pada solusi dan

gagasan inovatif untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, kandidat dapat mendorong pemilih untuk terlibat dalam pembicaraan yang lebih dalam tentang arah masa depan negara. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran pemilih tentang isu-isu yang penting dan memungkinkan untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi saat memberikan suara. Selain itu, narasi positif dalam kampanye politik juga berdampak positif pada atmosfer politik secara keseluruhan. Dengan mengurangi serangan dan retorika yang berpotensi merusak, kampanye positif membantu menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan inklusif bagi partisipasi publik. Ini penting untuk memperkuat fondasi demokrasi yang sehat dan mendorong partisipasi aktif dari berbagai segmen masyarakat.

b. Mempromosikan Kesatuan dan Toleransi

Mempromosikan kesatuan dan toleransi melalui kampanye politik yang inklusif merupakan langkah penting dalam mengatasi polarisasi berbasis identitas. Kampanye inklusif yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk minoritas, tidak hanya menciptakan suasana politik yang lebih harmonis tetapi juga membantu dalam membangun masyarakat yang lebih kuat dan bersatu. Mietzner (2018) menekankan bahwa strategi ini sangat penting untuk mengatasi polarisasi yang sering terjadi dalam konteks politik identitas. Kampanye inklusif yang aktif mengajak semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi mengirimkan pesan yang kuat tentang pentingnya persatuan. Ketika kandidat dan partai politik secara terbuka menyambut dan menghormati perbedaan, menunjukkan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan semua warga, terlepas dari latar belakang. Pendekatan ini membantu mengurangi ketegangan yang sering timbul akibat perpecahan identitas, baik itu berbasis agama, etnis, atau budaya.

Pada praktiknya, mempromosikan kesatuan dan toleransi dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menyertakan perwakilan dari kelompok minoritas dalam tim kampanye atau struktur organisasi partai. Ini memberikan kesempatan kepada berbagai kelompok untuk memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan dan membantu memastikan

bahwa kebijakan yang diusulkan mencerminkan keragaman masyarakat. Menurut Mietzner (2018), keterlibatan aktif dari berbagai kelompok ini dapat mengurangi rasa terpinggirkan dan meningkatkan rasa memiliki di kalangan minoritas. Selain itu, kampanye yang inklusif dapat diimplementasikan melalui program-program sosial yang mendukung kerjasama lintas komunitas. Misalnya, mengadakan acara-acara bersama yang melibatkan berbagai kelompok agama dan etnis dapat memperkuat hubungan antar komunitas. Kegiatan seperti dialog antaragama, proyek sosial, atau perayaan hari besar bersama dapat membantu mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan demikian, kampanye politik yang inklusif tidak hanya berfokus pada kemenangan elektoral, tetapi juga pada pembangunan masyarakat yang lebih harmonis dan toleran.

Kampanye yang mempromosikan kesatuan dan toleransi juga berperan penting dalam mencegah eksklusi sosial. Dalam konteks politik yang sering kali diwarnai oleh retorika divisif, penting bagi kandidat untuk menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan harus dihormati. Ini bisa dilakukan dengan membahas cerita-cerita positif tentang kontribusi kelompok minoritas kepada masyarakat dan negara. Menurut penelitian, narasi yang inklusif dapat membantu mengubah persepsi publik dan mengurangi prasangka terhadap kelompok minoritas. Lebih jauh, kampanye inklusif dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan struktural yang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Dengan mempromosikan kebijakan yang adil dan inklusif, kandidat dapat mengadvokasi reformasi yang menguntungkan semua segmen masyarakat. Misalnya, program-program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang dirancang untuk memberdayakan kelompok-kelompok minoritas dapat membawa perubahan positif yang signifikan. Dengan memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan, kampanye inklusif membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.

c. Penggunaan Media Sosial secara Positif

Penggunaan media sosial secara positif memiliki potensi besar dalam meredakan polarisasi dan mempromosikan inklusivitas dalam kampanye politik. Media sosial, sebagai platform komunikasi yang luas dan berpengaruh, memungkinkan penyebaran pesan yang cepat dan luas, menjangkau audiens dari berbagai latar belakang. Menurut Aspinall (2019), strategi ini sangat efektif dalam mencapai audiens yang lebih luas dan beragam, serta mempromosikan dialog dan saling pengertian antar kelompok yang berbeda. Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan inklusif yang menekankan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Kandidat politik dan tim kampanye dapat memanfaatkan platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube untuk berbagi cerita inspiratif, pencapaian positif, dan visi masa depan yang inklusif. Konten yang menyentuh aspek kemanusiaan dan menekankan kesamaan pengalaman dapat membantu membangun jembatan antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Salah satu cara efektif untuk menggunakan media sosial secara positif adalah dengan mengadakan kampanye dialogis yang mendorong interaksi dan diskusi konstruktif. Kandidat dapat mengadakan sesi tanya jawab, diskusi panel virtual, dan siaran langsung di mana menjawab pertanyaan dari berbagai lapisan masyarakat. Ini tidak hanya memberi kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi langsung dalam proses politik, tetapi juga memperlihatkan komitmen kandidat terhadap transparansi dan inklusivitas. Menurut Aspinall (2019), pendekatan ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan memperkuat rasa saling pengertian di antara kelompok yang berbeda. Selain itu, media sosial dapat digunakan untuk melawan misinformasi dan *hoaks* yang sering kali memperburuk polarisasi. Tim kampanye dapat aktif memantau dan mengoreksi informasi yang salah, serta menyediakan sumber informasi yang akurat dan terpercaya, juga dapat bekerja sama dengan platform media sosial untuk memastikan bahwa konten yang berbahaya dan memecah belah diidentifikasi dan dihapus dengan cepat. Menurut penelitian,

langkah-langkah ini sangat penting untuk menjaga integritas informasi dan mengurangi dampak negatif dari kampanye hitam yang sering muncul selama periode pemilu.

Kampanye di media sosial juga bisa membahas kolaborasi dan kerjasama antar komunitas yang berbeda. Misalnya, berbagi cerita tentang proyek-proyek komunitas yang melibatkan berbagai kelompok etnis dan agama dapat menunjukkan bahwa kerjasama dan persatuan adalah mungkin dan bermanfaat. Konten semacam ini dapat menginspirasi orang lain untuk melihat melampaui perbedaan dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Menurut Aspinall (2019), narasi kolaboratif ini dapat berperan penting dalam mengurangi polarisasi dan membangun masyarakat yang lebih inklusif. Untuk mencapai audiens yang lebih luas dan beragam, kampanye di media sosial juga harus memperhatikan bahasa dan gaya komunikasi yang digunakan. Pesan-pesan harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan bagi berbagai kelompok demografis. Penggunaan multimedia seperti video, infografis, dan gambar dapat membuat pesan lebih menarik dan mudah dibagikan. Selain itu, melibatkan *influencer* dan tokoh masyarakat yang dihormati dalam kampanye dapat membantu memperluas jangkauan pesan dan meningkatkan kredibilitasnya.

d. Pendidikan Politik yang Inklusif

Pendidikan politik yang inklusif adalah komponen krusial dalam upaya mengurangi polarisasi dan mempromosikan demokrasi yang sehat. Pendidikan yang menekankan pentingnya pluralisme dan kerjasama antar kelompok dapat membantu masyarakat memahami nilai-nilai fundamental dari demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi lebih peka terhadap isu-isu politik, tetapi juga lebih menghargai keragaman dan inklusivitas. Salah satu strategi untuk mewujudkan pendidikan politik yang inklusif adalah melalui integrasi materi tentang pluralisme dan inklusivitas dalam kurikulum pendidikan formal. Menurut Parker (2016), pendidikan multikultural yang dimulai sejak usia dini dapat membentuk generasi yang lebih terbuka dan menerima perbedaan. Kurikulum harus mencakup pelajaran tentang

berbagai budaya, agama, dan etnis yang ada di Indonesia, serta pentingnya hidup berdampingan dengan harmonis. Pelajaran ini bisa dilengkapi dengan studi kasus tentang bagaimana kerjasama antar kelompok telah berhasil dalam berbagai konteks, baik di Indonesia maupun secara global.

Program pendidikan politik yang inklusif juga dapat dijalankan melalui pendidikan non-formal dan informal. Misalnya, program-program pelatihan dan lokakarya yang diadakan oleh organisasi masyarakat sipil dapat memberikan pengetahuan tentang proses politik dan hak-hak warga negara. Pelatihan ini bisa mencakup topik seperti bagaimana berpartisipasi dalam pemilu, pentingnya partisipasi politik, dan cara mengadvokasi kepentingan komunitas. Menurut Santoso (2012), pendidikan non-formal ini sangat efektif dalam memberdayakan komunitas, terutama yang terpinggirkan, untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Peran guru dan pendidik juga sangat penting dalam mempromosikan pendidikan politik yang inklusif. Guru harus dilatih untuk mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dengan cara yang menarik dan relevan harus mampu mengajarkan siswa tentang pentingnya menghargai perbedaan dan bekerja sama meskipun ada perbedaan pendapat. Menurut Baidhawiy (2007), pelatihan guru yang berfokus pada pendidikan toleransi dapat membantu mencegah radikalisme dan mempromosikan sikap inklusif di sekolah-sekolah.

Penggunaan teknologi dan media digital juga dapat memperkuat pendidikan politik yang inklusif. Platform *online* dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang hak-hak politik, proses pemilu, dan pentingnya partisipasi dalam politik. *E-learning* dan aplikasi edukatif bisa dikembangkan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat tentang pendidikan politik. Selain itu, media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan diskusi yang konstruktif dan mendidik tentang isu-isu politik. Menurut Lim (2020), media digital memiliki potensi besar untuk menjangkau audiens yang luas dan beragam, sehingga memperluas dampak pendidikan politik yang inklusif. Kegiatan ekstrakurikuler juga berperan penting dalam

pendidikan politik yang inklusif. Klub debat, kelompok diskusi politik, dan organisasi siswa dapat memberikan ruang bagi siswa untuk berbagi pandangan dan belajar tentang berbagai perspektif politik. Kegiatan ini tidak hanya membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis tetapi juga mendorong untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Menurut Hadi (2019), kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan dialog dan kerjasama antar siswa dari latar belakang yang berbeda dapat membantu membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati.

e. Kampanye oleh Pemimpin yang Berkarakter Inklusif

Kampanye yang dipimpin oleh pemimpin yang berkarakter inklusif adalah salah satu strategi kunci dalam mengurangi polarisasi politik dan mempromosikan persatuan. Pemimpin politik yang menunjukkan komitmen untuk merangkul semua golongan masyarakat dan mendorong dialog antar kelompok dapat berperan penting dalam menciptakan iklim politik yang lebih damai dan konstruktif. Fealy (2018) menekankan bahwa pemimpin politik yang inklusif, seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi), mampu menciptakan suasana yang lebih harmonis dengan menampilkan kepemimpinan yang terbuka terhadap semua golongan. Jokowi dikenal dengan pendekatannya yang merangkul berbagai kelompok etnis, agama, dan sosial di Indonesia. Misalnya, dalam kampanyenya, Jokowi sering mengunjungi berbagai daerah dan berinteraksi langsung dengan masyarakat dari latar belakang yang beragam. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang inklusif bukan hanya soal retorika, tetapi juga tindakan nyata yang mengakui dan menghargai keragaman masyarakat.

Pemimpin yang inklusif juga berperan dalam mengurangi ketegangan melalui kebijakan yang adil dan merata. Misalnya, Jokowi sering kali mengeluarkan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan satu kelompok tetapi seluruh masyarakat. Ini termasuk kebijakan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia, yang tidak hanya berfokus pada pusat-pusat kota tetapi juga daerah terpencil. Dengan kebijakan semacam ini, pemimpin inklusif dapat menunjukkan bahwa

bekerja untuk kesejahteraan semua warga negara, bukan hanya konstituen tertentu. Dialog antar kelompok adalah aspek penting dari kampanye oleh pemimpin inklusif. Pemimpin yang berkarakter inklusif sering kali mengadakan pertemuan dan dialog dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk minoritas dan kelompok yang kurang terwakili. Menurut Mietzner (2018), dialog semacam ini membantu meredakan ketegangan dan membangun saling pengertian. Dalam konteks Indonesia, di mana keragaman adalah norma, dialog antar kelompok menjadi alat yang sangat penting untuk menjaga harmoni sosial.

Pemimpin inklusif juga harus menunjukkan toleransi dan menghargai perbedaan dalam setiap aspek kampanye. Ini termasuk cara berbicara, jenis kebijakan yang didukung, dan cara berinteraksi dengan publik. Misalnya, Jokowi sering kali berbicara tentang pentingnya persatuan dalam keragaman, dan dia menolak segala bentuk diskriminasi atau intoleransi. Dengan menampilkan sikap dan nilai-nilai yang inklusif, pemimpin politik dapat menginspirasi pendukung untuk mengikuti jejaknya. Selain itu, pemimpin yang inklusif juga sering kali menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan persatuan. Media sosial, misalnya, dapat digunakan untuk menyebarkan video, pidato, dan tulisan yang menekankan pentingnya hidup berdampingan dengan damai. Menurut Aspinall (2019), penggunaan media sosial untuk mempromosikan pesan-pesan positif dan inklusif dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan membantu mengurangi polarisasi. Jokowi, misalnya, sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan menyampaikan pesan-pesan yang menguatkan persatuan.

Peran pemimpin inklusif dalam kampanye juga terlihat dalam bagaimana menangani isu-isu sensitif. Pemimpin yang inklusif tidak akan menggunakan isu agama, etnis, atau ras untuk mendapatkan dukungan politik. Sebaliknya, akan berusaha untuk mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan bagi semua. Menurut Fealy (2018), pendekatan ini tidak hanya menciptakan iklim politik yang lebih sehat tetapi juga membantu membangun

kepercayaan publik terhadap pemimpin tersebut. Kepemimpinan inklusif juga melibatkan pemimpin dalam mengatasi ketidakadilan sosial dan ekonomi yang mungkin ada di masyarakat. Dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi ketidakadilan, pemimpin dapat menunjukkan bahwa peduli dengan kesejahteraan semua warga negara. Misalnya, kebijakan Jokowi tentang peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat menunjukkan komitmennya terhadap inklusivitas.

## **2. Kolaborasi Antar Partai**

Kolaborasi antar partai politik adalah strategi lain yang efektif dalam mengatasi polarisasi. Dengan bekerja sama, partai-partai politik dapat menunjukkan komitmen terhadap persatuan nasional dan mencegah retorika divisif yang sering kali muncul selama kampanye politik.

### **a. Membangun Koalisi dan Aliansi**

Kolaborasi antar partai politik melalui pembentukan koalisi atau aliansi telah menjadi strategi penting dalam politik Indonesia untuk mencapai tujuan politik bersama atau mendukung calon tertentu. Pembentukan koalisi ini sering kali dilakukan atas dasar kesepakatan programatik dan visi bersama yang dapat membantu mengurangi ketegangan politik dan mempromosikan stabilitas. Menurut Warburton dan Aspinall (2019), koalisi yang dibangun dengan fondasi kuat semacam ini menunjukkan kemampuan partai-partai politik untuk bekerja sama meskipun ada perbedaan ideologis yang signifikan. Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, koalisi antar partai politik sering kali terlihat menjelang pemilihan presiden. Pembentukan koalisi ini bukan hanya tentang menggabungkan suara untuk memenangkan pemilu, tetapi juga tentang menyusun strategi untuk pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Ketika partai-partai politik mampu mencapai kesepakatan tentang program-program kebijakan dan visi pemerintahan, dapat menawarkan alternatif yang lebih kuat dan stabil kepada pemilih. Ini membantu mengurangi polarisasi politik karena pemilih melihat bahwa

partai-partai dapat bekerja sama demi kepentingan negara, meskipun memiliki pandangan ideologis yang berbeda.

Salah satu contoh koalisi yang berhasil adalah koalisi yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019. Jokowi mampu menarik dukungan dari berbagai partai politik dengan latar belakang ideologis yang berbeda. Misalnya, dalam pemilu 2019, Jokowi berkoalisi dengan partai-partai seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Koalisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan ideologis, partai-partai ini dapat bekerja sama berdasarkan kesepakatan programatik dan visi bersama untuk pembangunan Indonesia. Koalisi semacam ini juga menunjukkan fleksibilitas dan pragmatisme dalam politik Indonesia. Partai-partai politik memahami bahwa untuk mencapai tujuan politik dan memerintah secara efektif, perlu berkolaborasi dan membangun aliansi yang luas. Ini mencerminkan realitas politik Indonesia yang kompleks, di mana keberagaman etnis, agama, dan budaya berperan penting. Dengan membangun koalisi yang inklusif, partai-partai politik dapat mencerminkan pluralitas masyarakat Indonesia dan bekerja untuk kepentingan semua kelompok.

Pembentukan koalisi juga dapat membantu dalam stabilitas politik jangka panjang. Ketika partai-partai politik memiliki komitmen untuk bekerja sama melalui koalisi, cenderung lebih stabil dalam pemerintahan dan dapat menghindari konflik internal yang bisa mengguncang pemerintahan. Stabilitas politik ini penting untuk menarik investasi dan pembangunan ekonomi, karena investor dan masyarakat umumnya lebih percaya pada pemerintahan yang stabil dan dapat diandalkan. Namun, membangun koalisi yang efektif tidak selalu mudah. Tantangan utama adalah memastikan bahwa semua pihak dalam koalisi merasa didengar dan dihargai. Ini memerlukan keterampilan negosiasi dan komunikasi yang baik dari para pemimpin politik. Menurut Warburton dan Aspinall (2019), keberhasilan sebuah koalisi sangat bergantung pada kemampuan para pemimpin untuk membangun kepercayaan dan menjaga komitmen bersama

meskipun ada perbedaan. Jika tidak dikelola dengan baik, koalisi bisa rentan terhadap perpecahan dan konflik internal, yang dapat merusak stabilitas politik.

Koalisi yang dibentuk hanya berdasarkan pragmatisme politik tanpa kesepakatan programatik yang kuat cenderung kurang efektif. Koalisi semacam ini mungkin berhasil dalam jangka pendek untuk memenangkan pemilu, tetapi sering kali gagal dalam pemerintahan karena kurangnya visi bersama. Oleh karena itu, penting bagi partai-partai politik untuk memastikan bahwa koalisi yang dibangun didasarkan pada kesepakatan programatik yang jelas dan komitmen untuk visi jangka panjang. Dalam beberapa kasus, koalisi juga dapat menjadi alat untuk memperkuat demokrasi. Dengan melibatkan berbagai partai dalam pemerintahan, koalisi dapat memastikan bahwa berbagai pandangan dan kepentingan terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat meningkatkan legitimasi pemerintah dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem politik. Menurut teori demokrasi, keberagaman pandangan dalam pemerintahan dapat mendorong debat yang konstruktif dan menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

b. Dialog dan Negosiasi Antar Partai

Kolaborasi antar partai politik sangat bergantung pada dialog dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Menurut Hadiz (2020), proses negosiasi ini esensial dalam politik untuk menemukan solusi kompromi yang dapat mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok. Dialog yang konstruktif memungkinkan partai-partai untuk mengurangi potensi konflik dan membangun konsensus, yang pada gilirannya memperkuat stabilitas politik dan pemerintahan. Proses dialog dan negosiasi antar partai biasanya dimulai dengan pembentukan agenda bersama yang mencakup isu-isu utama yang harus ditangani. Dalam konteks ini, partai-partai politik harus terbuka terhadap pandangan dan usulan dari partai lain, bahkan jika pandangan tersebut berbeda secara ideologis. Menurut Warburton dan Aspinall (2019), keberhasilan negosiasi sering kali bergantung pada kemampuan para pemimpin politik untuk mendengarkan dan berkompromi, serta kesediaan untuk

mengesampingkan kepentingan sempit demi kepentingan yang lebih luas.

Pada banyak kasus, negosiasi antar partai mencakup pembagian kekuasaan dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Ini bisa berarti penunjukan posisi kabinet atau pembagian tugas dalam legislasi dan implementasi kebijakan. Misalnya, dalam pemerintahan koalisi di Indonesia, partai-partai yang bergabung dalam koalisi sering kali mendapatkan posisi penting dalam kabinet atau lembaga pemerintah lainnya. Pembagian ini tidak hanya membantu dalam mengelola pemerintahan yang lebih inklusif tetapi juga memastikan bahwa semua partai merasa memiliki kepentingan dan tanggung jawab dalam keberhasilan pemerintahan. Selain itu, dialog antar partai juga sering melibatkan diskusi tentang kebijakan publik yang penting. Proses ini mencakup negosiasi mengenai prioritas anggaran, kebijakan ekonomi, dan program sosial. Menurut Fealy (2018), negosiasi yang berhasil dapat menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan inklusif, yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok masyarakat. Ini juga membantu dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki dukungan politik yang kuat dan berkelanjutan.

Untuk memfasilitasi dialog dan negosiasi yang efektif, sering kali diperlukan mediasi dari pihak ketiga. Ini bisa berupa individu atau lembaga yang memiliki kredibilitas dan netralitas untuk membantu partai-partai politik mencapai kesepakatan. Menurut Hadiz (2020), mediasi yang efektif dapat membantu mengatasi kebuntuan dan mendorong proses negosiasi menuju hasil yang positif. Dalam beberapa kasus, lembaga internasional atau organisasi non-pemerintah juga dapat berperan mediasi ini, terutama dalam konteks negosiasi yang melibatkan isu-isu kompleks atau sensitif. Pentingnya dialog dan negosiasi antar partai juga terlihat dalam upaya untuk membangun konsensus nasional dalam menghadapi krisis atau tantangan besar. Misalnya, dalam situasi pandemi atau krisis ekonomi, kolaborasi antar partai melalui dialog yang konstruktif dapat membantu merumuskan respon yang cepat dan efektif. Konsensus nasional semacam ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang

diambil memiliki dukungan luas dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Dialog dan negosiasi juga berperan penting dalam mengatasi konflik politik dan mempromosikan rekonsiliasi. Dalam banyak kasus, konflik politik yang berkepanjangan dapat merusak stabilitas dan kohesi sosial. Melalui dialog yang terbuka dan negosiasi yang tulus, partai-partai politik dapat mencari solusi damai dan membangun kembali hubungan yang rusak. Menurut Fealy (2018), rekonsiliasi politik yang sukses sering kali membutuhkan komitmen untuk dialog berkelanjutan dan keinginan untuk memaafkan dan melupakan masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya, keberhasilan dialog dan negosiasi antar partai bergantung pada niat baik dan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Ini mencakup kesediaan untuk mendengarkan, berkompromi, dan bekerja sama demi kepentingan yang lebih besar. Menurut Hadiz (2020), keberhasilan ini juga bergantung pada transparansi dan akuntabilitas dalam proses negosiasi, yang dapat membantu membangun kepercayaan di antara partai-partai politik dan masyarakat luas.

c. Penguatan Institusi Politik

Kerjasama antar partai politik berperan krusial dalam memperkuat institusi politik dan mekanisme demokrasi. Menurut Slama (2017), ketika partai-partai politik bekerja sama dalam kerangka institusi yang kuat, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan mengurangi polarisasi. Institusi yang kuat memiliki kapasitas untuk menegakkan aturan dan memastikan bahwa semua partai berkompetisi secara adil. Kerjasama antar partai politik dapat berkontribusi pada penguatan institusi politik melalui beberapa cara. Kolaborasi ini dapat mendorong reformasi institusional yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan. Misalnya, partai-partai yang bekerja sama dalam koalisi dapat mendorong reformasi hukum dan peraturan yang memperkuat mekanisme *check and balance* dalam pemerintahan. Reformasi ini bisa mencakup peningkatan transparansi dalam

proses pengambilan keputusan, peningkatan akuntabilitas pejabat publik, dan penguatan lembaga pengawas independen.

Kerjasama antar partai juga dapat memperkuat proses legislasi. Dalam sistem demokrasi, parlemen adalah institusi utama yang berfungsi sebagai tempat diskusi dan pengambilan keputusan tentang undang-undang dan kebijakan publik. Partai-partai yang bekerja sama dalam parlemen dapat mencapai kesepakatan tentang prioritas legislasi dan bekerja bersama untuk mengesahkan undang-undang yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Menurut Mietzner (2018), kolaborasi dalam legislasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, karena undang-undang yang disahkan memiliki dukungan luas dan lebih mudah diimplementasikan. Kerjasama antar partai dapat memperkuat lembaga eksekutif. Dalam sistem presidensial atau semi-presidensial, koalisi partai-partai dalam pemerintahan dapat membantu presiden atau perdana menteri mengelola pemerintahan yang lebih inklusif dan representatif. Koalisi yang kuat dapat memastikan bahwa berbagai kelompok kepentingan dan sektor masyarakat diwakili dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan legitimasi dan stabilitas pemerintahan.

Kerjasama antar partai juga penting dalam konteks pemilu. Institusi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memerlukan dukungan dari semua partai politik untuk berfungsi secara efektif. Ketika partai-partai bekerja sama untuk memastikan integritas dan transparansi dalam proses pemilu, ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan mengurangi risiko konflik pasca pemilu. Menurut Aspinall (2019), pemilu yang adil dan transparan adalah fondasi dari demokrasi yang sehat, dan kerjasama antar partai adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Selain memperkuat institusi pemerintahan, kerjasama antar partai juga dapat mendukung penguatan *civil society*. Organisasi masyarakat sipil yang kuat adalah elemen penting dalam demokrasi karena berfungsi sebagai pengawas independen dan advokat untuk berbagai kepentingan masyarakat. Ketika partai-partai politik bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil,

dapat membangun jaringan yang lebih luas untuk mendukung reformasi kebijakan dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik. Menurut Salim (2008), kolaborasi ini dapat membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

d. **Kampanye Bersama untuk Isu-isu Strategis**

Kerjasama antar partai politik dalam kampanye bersama untuk isu-isu strategis memiliki potensi besar untuk mengatasi polarisasi politik dan memperkuat demokrasi. Dengan berfokus pada tujuan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat luas, partai-partai dapat menunjukkan bahwa mampu mengesampingkan perbedaan ideologis demi kepentingan bersama. Menurut Warburton dan Aspinall (2019), kolaborasi semacam ini tidak hanya memperkuat pesan persatuan tetapi juga meningkatkan legitimasi partai-partai di mata publik. Partai-partai politik sering kali berfokus pada isu-isu yang bersifat mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Reformasi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan adalah contoh isu-isu strategis yang memerlukan perhatian khusus dan kolaborasi lintas partai. Ketika partai-partai politik bersatu dalam kampanye untuk reformasi ekonomi, misalnya, dapat bekerja sama untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Menurut penelitian oleh Fealy (2018), koalisi yang berfokus pada isu ekonomi dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Di bidang pendidikan, kampanye bersama dapat membahas pentingnya akses yang adil dan berkualitas terhadap pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Partai-partai yang bekerja sama dapat merancang program pendidikan yang inklusif, yang tidak hanya memperbaiki kualitas pendidikan tetapi juga memastikan bahwa semua anak, termasuk yang berasal dari latar belakang kurang mampu, memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Kolaborasi ini dapat mencakup advokasi untuk peningkatan anggaran pendidikan, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum yang relevan dan berorientasi pada masa depan.

Dalam sektor kesehatan, partai-partai politik dapat berkolaborasi untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Kampanye bersama dapat mencakup upaya untuk memperluas cakupan asuransi kesehatan, meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, dan memastikan ketersediaan obat-obatan yang terjangkau. Menurut Salim (2019), kolaborasi di bidang kesehatan dapat membantu mengatasi ketidakadilan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Kampanye bersama juga memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi politik dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ketika partai-partai politik menunjukkan komitmen terhadap isu-isu yang benar-benar penting bagi masyarakat, dapat membangun kepercayaan dan menginspirasi partisipasi yang lebih besar dari warga negara. Menurut Mietzner (2018), kampanye yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Selain itu, kampanye bersama dapat membantu menciptakan narasi positif tentang politik. Dalam konteks di mana politik sering kali dipandang sebagai arena konflik dan perpecahan, kolaborasi untuk isu-isu strategis dapat menunjukkan bahwa politik juga bisa menjadi alat untuk mencapai perubahan positif dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Narasi ini dapat mengurangi sinisme dan apatisme terhadap politik, yang sering kali menjadi penghalang partisipasi aktif dari warga negara.

e. Peran Pemimpin Partai dalam Mendorong Kolaborasi

Pemimpin partai memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong kolaborasi antar partai politik. Bukan hanya figur sentral yang menggerakkan arah dan kebijakan partai, tetapi juga agen utama yang dapat memfasilitasi kerjasama lintas partai. Hadiz (2020) menekankan bahwa pemimpin partai yang visioner dan terbuka terhadap kerjasama lintas partai dapat berkontribusi secara signifikan terhadap stabilitas politik dan pembangunan demokrasi yang inklusif. Pemimpin partai yang visioner mampu melihat melampaui kepentingan jangka pendek partainya dan

mengutamakan kepentingan nasional, memahami bahwa kolaborasi dengan partai lain dapat menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Menurut Warburton dan Aspinall (2019), pemimpin seperti ini biasanya memiliki kemampuan untuk merumuskan visi dan misi yang mengakomodasi berbagai kepentingan dan pandangan, sehingga memudahkan tercapainya kesepakatan dan kerjasama.

Keterbukaan terhadap kerjasama lintas partai memerlukan pemimpin yang mampu menjembatani perbedaan ideologis dan politik. Pemimpin yang efektif dalam hal ini biasanya memiliki keterampilan negosiasi dan diplomasi yang baik, dapat menemukan titik temu di antara berbagai pandangan dan merancang strategi yang bisa diterima oleh semua pihak. Ini bukan tugas yang mudah, mengingat kompleksitas dan dinamika politik, tetapi pemimpin yang sukses dalam hal ini mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog dan kompromi. Pemimpin partai yang mendorong kolaborasi juga harus mampu membangun dan memelihara koalisi yang kuat. Menurut Fealy (2018), pemimpin yang efektif sering kali memiliki jaringan yang luas dan dapat memobilisasi dukungan dari berbagai pihak. Tidak hanya fokus pada kepentingan partainya sendiri tetapi juga berusaha untuk membangun aliansi strategis yang dapat memperkuat posisi politik secara keseluruhan. Hal ini memerlukan keterampilan manajemen yang baik dan kemampuan untuk mempertahankan kerjasama dalam jangka panjang.

Peran pemimpin dalam menciptakan iklim politik yang inklusif sangat penting. Pemimpin yang inklusif biasanya menghargai keragaman dan berusaha untuk merangkul semua kelompok dalam masyarakat, memahami bahwa inklusivitas adalah kunci untuk mengurangi polarisasi dan ketegangan sosial. Dengan mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerjasama, pemimpin seperti ini dapat membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih damai dan konstruktif. Selain itu, pemimpin yang proaktif dalam mendorong kolaborasi juga dapat berperan penting dalam pendidikan politik, dapat menggunakan platform dan pengaruh untuk mendidik anggota partai dan publik tentang

pentingnya kolaborasi dan kerjasama lintas partai. Menurut Mietzner (2018), pemimpin yang memprioritaskan pendidikan politik biasanya mampu membangun basis pendukung yang lebih luas dan berkomitmen.

## **B. Kebijakan dan Regulasi**

Kebijakan dan regulasi yang diadopsi oleh pemerintah dan lembaga pemilu sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan mengurangi polarisasi. Ini termasuk kebijakan yang dirancang untuk menjaga ketertiban dan keadilan selama proses pemilu serta peran lembaga pemilu dalam mengawasi dan menegakkan aturan kampanye.

### **1. Kebijakan Pemerintah untuk Menjaga Stabilitas Politik**

Kebijakan pemerintah berperan kunci dalam menjaga stabilitas politik, terutama selama periode pemilu. Beberapa kebijakan penting yang telah diterapkan di Indonesia mencakup peraturan untuk menjaga ketertiban umum, mengurangi ketegangan sosial, dan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan damai dan adil.

#### **a. Kebijakan Ketertiban dan Keamanan**

Ketika sebuah negara menghadapi proses pemilihan umum, pemerintah seringkali harus mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama periode tersebut. Kebijakan semacam ini menjadi sangat penting mengingat adanya potensi gangguan dan ketegangan yang dapat muncul selama kampanye dan proses pemungutan suara. Menurut Mietzner (2018), kebijakan tersebut meliputi berbagai langkah proaktif untuk memastikan bahwa pemilu berjalan lancar dan aman bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, peningkatan patroli keamanan, pengawasan ketat terhadap kegiatan kampanye, dan pembatasan terhadap demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan menjadi bagian integral dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas selama proses pemilihan umum. Salah satu aspek utama dari kebijakan ketertiban dan keamanan selama pemilu adalah peningkatan patroli keamanan. Pemerintah sering kali memperkuat kehadiran aparat kepolisian dan pasukan keamanan lainnya untuk

mengawasi dan menanggapi potensi ancaman keamanan. Patroli keamanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan sekitar tempat pemungutan suara dan lokasi-lokasi kampanye tetap aman dari ancaman kekerasan atau gangguan. Langkah ini memberikan rasa aman bagi para pemilih dan memastikan bahwa proses pemilihan umum dapat berjalan dengan lancar tanpa intimidasi atau gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah juga menerapkan pengawasan ketat terhadap kegiatan kampanye. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kampanye dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar batas-batas hukum yang telah ditetapkan. Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap isi kampanye, penggunaan sumber daya, dan praktik politik lainnya yang mungkin memicu konflik atau polarisasi di antara masyarakat. Dengan mengawasi kegiatan kampanye secara ketat, pemerintah dapat mencegah penyebaran retorika yang merusak atau agresif yang dapat memperburuk suasana politik. Selain pengawasan kegiatan kampanye, pemerintah juga sering kali menerapkan pembatasan terhadap demonstrasi atau aksi protes yang berpotensi menimbulkan kekerasan atau ketegangan selama periode pemilihan umum. Pembatasan semacam ini bertujuan untuk mencegah gangguan terhadap proses pemilu dan memastikan bahwa lingkungan sekitar tempat pemungutan suara tetap kondusif bagi pemilih untuk melaksanakan hak suaranya tanpa tekanan eksternal. Meskipun pembatasan demonstrasi dapat menjadi kontroversial dan menimbulkan kritik dari sebagian masyarakat, namun pemerintah sering kali menganggapnya sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan selama periode pemilihan umum.

b. Program Pendidikan dan Dialog Sosial

Program pendidikan dan dialog sosial adalah dua elemen kunci dalam upaya mengurangi ketegangan dan mempromosikan pemahaman antar kelompok masyarakat selama periode pemilihan umum. Pendidikan menjadi instrumen penting dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat, sementara dialog sosial menjadi sarana untuk mengatasi perbedaan dan

membangun kebersamaan. Pemerintah sering mengadakan program pendidikan yang menekankan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan partisipasi politik yang damai. Program-program semacam ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam proses politik tanpa menimbulkan konflik. Misalnya, pemerintah dapat mengadakan seminar, *workshop*, atau pelatihan untuk memperkenalkan konsep-konsep tersebut kepada masyarakat, terutama generasi muda yang akan menjadi pemilih masa depan.

Dialog sosial juga merupakan strategi yang efektif dalam mengurangi ketegangan antar kelompok masyarakat. Dialog sosial difasilitasi oleh pemerintah atau lembaga non-pemerintah dengan tujuan untuk membuka ruang diskusi yang terbuka dan inklusif. Melalui dialog sosial, berbagai pihak dapat saling mendengarkan dan mencari solusi bersama untuk mengatasi perbedaan atau konflik yang ada. Dialog sosial juga dapat menjadi sarana untuk membangun jembatan antar kelompok yang berbeda agar lebih saling memahami dan menghargai. Pemerintah juga dapat memanfaatkan media massa sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan pendidikan dan mempromosikan dialog sosial. Menurut Fealy (2019), media massa memiliki potensi besar untuk mencapai audiens yang luas dan beragam, sehingga dapat menjadi alat efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kerjasama antar kelompok. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan media sosial untuk mengadakan dialog *online* dan membangun komunitas yang mendukung nilai-nilai toleransi.

Pentingnya program pendidikan dan dialog sosial juga diperkuat oleh fakta bahwa ketegangan antar kelompok seringkali disebabkan oleh ketidakpahaman atau stereotip yang keliru. Melalui program pendidikan yang baik, masyarakat dapat memahami bahwa perbedaan adalah hal yang alami dan bahkan dapat memperkaya kehidupan bersama. Sementara itu, dialog sosial membuka ruang untuk menggali akar permasalahan, mendengarkan berbagai sudut pandang, dan mencari solusi yang bersama-sama diterima oleh semua pihak. Selain itu, penting juga

untuk mencatat bahwa program pendidikan dan dialog sosial harus bersifat inklusif dan mengakomodasi berbagai kelompok masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa program-program ini tidak hanya menasar pada kelompok mayoritas, tetapi juga pada minoritas dan kelompok rentan lainnya. Hal ini penting untuk menciptakan iklim yang adil dan merata bagi semua warga negara dalam partisipasi politik dan kehidupan sosial.

c. Regulasi Media dan Informasi

Pada periode pemilihan umum, regulasi media dan informasi menjadi krusial dalam menjaga keamanan dan integritas proses demokrasi. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur media dan informasi untuk mencegah penyebaran berita palsu (*hoaks*) dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu stabilitas politik dan merusak proses pemilu. Langkah-langkah regulasi yang tepat dapat membantu memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada publik adalah akurat, obyektif, dan tidak memihak. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah adalah menerapkan kebijakan yang mengharuskan media untuk menyajikan informasi yang akurat dan tidak memihak. Kebijakan semacam ini dapat berupa peraturan yang mengatur standar profesionalisme bagi media massa, seperti kode etik jurnalistik yang melarang penyajian berita yang tendensius atau manipulatif. Dengan mewajibkan media untuk mematuhi standar kualitas tertentu, pemerintah dapat membantu mengendalikan penyebaran informasi yang tidak valid atau menyesatkan.

Pemerintah juga perlu menindak tegas penyebaran *hoaks* dan ujaran kebencian yang dapat merusak proses pemilu. Menurut Pepinsky (2018), langkah-langkah hukum yang efektif diperlukan untuk menghentikan penyebaran *hoaks* dan menghukum pelaku yang bertanggung jawab. Ini mencakup penegakan hukum terhadap individu atau organisasi yang sengaja menyebarkan informasi palsu dengan tujuan mempengaruhi opini publik atau menciptakan ketegangan sosial. Dengan memberlakukan sanksi yang tegas, pemerintah dapat mengirimkan sinyal bahwa penyebaran *hoaks* tidak akan

ditoleransi dan dapat berdampak negatif pada stabilitas politik. Selain regulasi hukum, pemerintah juga dapat memperkuat kerjasama dengan platform media sosial untuk mengawasi dan menghapus konten yang melanggar standar kebenaran dan menghasut kebencian. Media sosial sering menjadi media utama untuk penyebaran *hoaks* dan ujaran kebencian karena mudahnya akses dan kecepatan penyebarannya. Dengan bekerja sama dengan platform media sosial, pemerintah dapat menggunakan teknologi dan algoritma untuk mengidentifikasi konten yang merugikan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapusnya.

Penting juga untuk meningkatkan literasi media masyarakat sehingga dapat secara kritis menilai informasi yang diterima. Program-program pendidikan tentang literasi media dapat membantu masyarakat memahami bagaimana memverifikasi kebenaran informasi, mengenali *hoaks*, dan memahami dampak negatif dari penyebaran informasi yang tidak valid. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang media dan informasi, pemerintah dapat mengurangi kerentanan terhadap penyebaran *hoaks* dan ujaran kebencian. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa regulasi media dan informasi tidak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk menekan kebebasan berekspresi dan mengontrol narasi politik. Regulasi yang dibuat haruslah transparan, proporsional, dan berlaku adil bagi semua pihak tanpa memihak kepada kepentingan politik tertentu. Keseimbangan antara menjaga keamanan dan integritas informasi dengan menjaga kebebasan berekspresi adalah kunci dalam membangun lingkungan media yang sehat dan demokratis.

d. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu adalah langkah krusial dalam menjaga integritas dan stabilitas politik sebuah negara. Pemerintah harus memastikan bahwa semua aturan yang terkait dengan pemilu, seperti intimidasi pemilih, kecurangan pemilu, dan pelanggaran kampanye, ditegakkan dengan adil dan transparan. Tindakan hukum yang konsisten dan efektif terhadap pelanggaran pemilu adalah penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan

dengan lancar dan akuntabel. Penegakan hukum yang tegas harus diterapkan terhadap pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye. Kecurangan pemilu, seperti pembelian suara, penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan kampanye, atau penyebaran informasi palsu, harus diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Penerapan hukuman yang efektif dapat menjadi pelajaran bagi pelaku kecurangan di masa mendatang dan mencegah terulangnya tindakan serupa.

Pengawasan yang ketat terhadap proses pemungutan suara dan penghitungan suara juga sangat penting. Mietzner (2018) membahas pentingnya pengawasan independen dan transparan terhadap proses pemilu untuk menghindari manipulasi hasil. Pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga pemantau pemilu dan LSM yang independen untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan jujur dan adil. Selain itu, perlindungan terhadap pemilih juga harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum selama pemilu. Intimidasi pemilih atau upaya lain untuk mengganggu hak pilih seseorang harus ditindak dengan serius. Pemerintah harus menjamin keamanan pemilih dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku intimidasi atau ancaman terhadap pemilih.

Penting juga untuk menegakkan aturan yang melarang politik uang. Praktek politik uang dapat merusak proses demokrasi dengan mengubah preferensi pemilih melalui imbalan materi. Pemerintah harus menetapkan aturan yang tegas dan memberlakukan sanksi yang berat terhadap praktik politik uang agar pemilu dapat berlangsung secara adil dan demokratis. Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif selama periode pemilu tidak hanya penting untuk menjaga integritas proses pemilu, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Ketika masyarakat percaya bahwa pemilu berlangsung dengan adil dan transparan, lebih cenderung untuk menerima hasilnya, bahkan jika kandidat atau partai yang didukung kalah. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa semua pihak tunduk pada hukum dan tidak ada yang dikecualikan dari aturan yang berlaku.

e. Kebijakan Inklusivitas

Kebijakan inklusivitas politik, seperti penggunaan kuota untuk memastikan partisipasi perempuan dan minoritas dalam badan legislatif, memiliki peran penting dalam mengurangi polarisasi dan memperkuat demokrasi. Inisiatif semacam ini, seperti yang dinyatakan oleh Aspinall (2019), tidak hanya menciptakan representasi yang lebih inklusif tetapi juga membantu memastikan bahwa semua kelompok masyarakat merasa diakui dan memiliki suara dalam proses politik. Berikut adalah poin-poin utama dalam penerapan kebijakan inklusivitas politik:

- 1) Kuota untuk perempuan dalam badan legislatif adalah langkah penting untuk mendorong partisipasi politik yang lebih merata di antara gender. Meskipun perempuan sering kali merupakan mayoritas pemilih, sering kurang diwakili dalam kelembagaan politik. Dengan menerapkan kuota, baik dalam bentuk undang-undang atau kebijakan internal partai politik, perempuan memiliki akses yang lebih besar untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik. Hal ini tidak hanya meningkatkan inklusivitas politik tetapi juga memperkaya perspektif dan pengalaman yang dibawa ke meja pembahasan.
- 2) Kebijakan inklusif juga memperhitungkan partisipasi minoritas dalam badan legislatif. Minoritas etnis, agama, dan kelompok lainnya sering kali menghadapi hambatan dalam meraih posisi politik yang signifikan. Dengan memberlakukan kuota atau sistem preferensial lainnya, pemerintah dapat memastikan bahwa suara dan kepentingan minoritas juga terwakili secara proporsional dalam pembuatan keputusan politik. Ini tidak hanya menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif tetapi juga membantu mengatasi ketidakadilan struktural yang sering dialami oleh minoritas.
- 3) Kebijakan inklusif juga dapat mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok marginal dan rentan memiliki akses yang lebih besar ke proses politik. Misalnya, melalui program pelatihan dan

dukungan finansial, pemerintah dapat membantu memperkuat kapasitas kelompok-kelompok masyarakat yang kurang terwakili untuk terlibat dalam politik lokal dan nasional. Dengan cara ini, kebijakan inklusif tidak hanya berfokus pada hasil akhir dari representasi yang lebih merata tetapi juga pada kesempatan yang lebih luas bagi semua orang untuk terlibat dalam perjalanan politik negara.

- 4) Penting untuk memastikan bahwa kebijakan inklusif didukung oleh kerangka hukum yang kuat dan sistematis. Hal ini meliputi pengawasan dan pelaporan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap kuota yang telah ditetapkan dan sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran. Selain itu, evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan inklusif diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala yang mungkin timbul serta untuk membuat perubahan yang diperlukan agar kebijakan tersebut lebih efektif.
- 5) Penting untuk menggabungkan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dalam implementasi kebijakan inklusif. Sementara pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk menerapkan kebijakan inklusif, partisipasi aktif dari masyarakat sipil, LSM, dan kelompok advokasi lainnya juga penting. Kolaborasi antara pemerintah dan aktor non-pemerintah dapat meningkatkan kesadaran, memperkuat tekanan politik untuk perubahan, dan memastikan bahwa kebijakan tersebut direalisasikan dengan tepat.

## **2. Peran Lembaga Pemilu dalam Mengawasi Kampanye**

Lembaga pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Indonesia, memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan menegakkan aturan kampanye. memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil, bebas, dan transparan.

a. Penegakan Aturan Kampanye

Penegakan aturan kampanye oleh lembaga pemilu merupakan komponen vital dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran sentral dalam mengatur dan menegakkan aturan kampanye. Berdasarkan penjelasan Tapsell (2017), KPU memiliki sejumlah tugas kunci dalam hal ini. Pertama, KPU bertanggung jawab untuk mengatur jadwal kampanye, termasuk waktu mulai dan berakhirnya kampanye serta jadwal debat publik antar kandidat. Penjadwalan yang tepat dapat membantu menghindari konflik dan memastikan bahwa semua kandidat memiliki waktu yang sama untuk mengkampanyekan platform. Selain itu, KPU juga bertugas menetapkan zona-zona kampanye yang meliputi tempat-tempat yang dapat digunakan untuk kampanye, misalnya lokasi-lokasi untuk pertemuan umum atau pemasangan baliho. Penetapan zona ini haruslah adil dan merata, sehingga semua kandidat memiliki akses yang sama untuk melakukan kampanye di tempat-tempat strategis. Selanjutnya, KPU juga memiliki peran dalam memastikan bahwa semua kandidat memiliki akses yang sama ke media massa dan fasilitas kampanye lainnya. Ini termasuk memastikan bahwa media memberikan liputan yang adil dan seimbang terhadap semua kandidat tanpa adanya bias atau preferensi tertentu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan kampanye dan menindak pelanggaran. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah kampanye hitam, di mana kandidat atau tim kampanye menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan tentang lawan politik. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran semacam ini, termasuk memberikan sanksi kepada kandidat atau partai yang terlibat. Selain itu, politik uang juga seringkali menjadi masalah dalam kampanye politik. Praktik politik uang dapat merugikan proses demokrasi dengan membuat kandidat yang kurang mampu finansial kesulitan untuk bersaing secara adil. Bawaslu juga bertugas untuk mengawasi dan menindak

pelanggaran terkait politik uang, dengan harapan dapat mencegah distorsi dalam proses demokrasi.

b. Pengawasan Media dan Iklan Politik

Pengawasan terhadap media dan iklan politik merupakan aspek penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu. Lembaga pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), memiliki peran krusial dalam mengawasi penggunaan media serta iklan politik selama masa kampanye. Sebagaimana dijelaskan oleh Hadiz (2020), pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa semua kandidat mendapatkan cakupan yang adil dan bahwa tidak ada penyalahgunaan media untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan. Pengawasan media dilakukan untuk memastikan bahwa semua kandidat mendapatkan eksposur yang setara di media massa. Ini berarti bahwa setiap kandidat harus memiliki kesempatan yang sama untuk disajikan dalam liputan berita dan program-program yang disiarkan oleh stasiun televisi dan radio. KPU dan Bawaslu harus memastikan bahwa media tidak memihak atau memberikan keuntungan yang tidak adil kepada salah satu kandidat atau partai politik tertentu. Pengawasan ini melibatkan pemantauan kontinu terhadap liputan media selama periode kampanye dan menindaklanjuti jika ada bukti bahwa suatu media melakukan pelanggaran.

Pengawasan media juga mencakup pencegahan penyebaran informasi yang menyesatkan atau *hoaks* yang dapat mempengaruhi opini publik. Hal ini diperlukan untuk menjaga integritas proses pemilu dan memastikan bahwa pemilih membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang akurat. KPU dan Bawaslu harus memiliki mekanisme untuk merespons cepat ketika ada informasi yang disebarkan secara tidak benar atau tendensius, termasuk melalui media sosial dan platform daring lainnya. Selain pengawasan media, pengawasan terhadap iklan politik juga menjadi perhatian penting. Iklan politik dapat menjadi sarana penting bagi kandidat atau partai politik untuk menyampaikan pesan kepada pemilih. Namun, ada risiko bahwa iklan politik dapat digunakan untuk menyebarkan kampanye

negatif atau ujaran kebencian yang dapat memicu polarisasi dan ketegangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Bawaslu memiliki peran dalam memantau konten iklan politik dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap etika atau aturan kampanye yang terjadi.

c. Penyediaan Informasi Pemilih

Penyediaan informasi pemilih merupakan aspek penting dalam menjaga transparansi dan partisipasi dalam proses pemilu. Lembaga pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi pemilih. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil juga sering terjadi untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi tersebut, sebagaimana yang dicatat oleh Slama (2017). Penyediaan informasi pemilih mencakup penyebaran informasi mengenai hak-hak pemilih. Ini meliputi informasi tentang siapa yang memiliki hak untuk memberikan suara, bagaimana cara mendaftar sebagai pemilih, dan apa yang dapat dilakukan jika hak-hak pemilih seseorang dilanggar. Informasi ini penting untuk memastikan bahwa semua warga negara yang memiliki hak untuk memberikan suara dapat melakukannya tanpa hambatan atau diskriminasi.

Penyediaan informasi pemilih juga mencakup penjelasan tentang prosedur pemilu. Ini meliputi informasi tentang bagaimana cara memilih, di mana tempat pemungutan suara berada, dan apa yang harus dilakukan pada hari pemilihan. Penjelasan yang jelas tentang prosedur ini membantu memastikan bahwa pemilih memahami prosesnya dengan baik dan dapat melakukan partisipasi yang efektif dalam pemilu. Selanjutnya, penyediaan informasi pemilih juga mencakup penekanan pada pentingnya partisipasi politik. Informasi ini dapat mencakup penjelasan tentang pentingnya memberikan suara dalam memilih pemimpin yang mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat, serta dampak dari tidak berpartisipasi dalam proses demokratis. Melalui penyampaian informasi yang menyeluruh tentang pentingnya partisipasi politik, KPU dan

Bawaslu dapat mendorong tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam pemilu.

Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan efektivitas penyediaan informasi pemilih. Organisasi masyarakat sipil sering memiliki akses yang lebih baik ke berbagai segmen masyarakat dan dapat menyampaikan informasi dengan cara yang lebih terukur dan relevan. Selain itu, juga dapat membantu menyebarkan informasi secara luas melalui jaringan yang luas di tingkat lokal, regional, dan nasional. Melalui upaya penyediaan informasi pemilih yang komprehensif dan berkelanjutan, KPU dan Bawaslu dapat memastikan bahwa pemilih memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan partisipasi yang sadar dan efektif dalam proses pemilu. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemilih tentang hak-haknya, prosedur pemilu, dan pentingnya partisipasi politik, lembaga pemilu dapat memperkuat fondasi demokrasi dan menjaga integritas sistem pemilihan.

d. Menjaga Transparansi Proses Pemilu

Menjaga transparansi dalam proses pemilu merupakan salah satu aspek kunci dalam memastikan bahwa pemilu diakui sebagai sah dan adil. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas dan keabsahan hasil pemilu. Sebagaimana yang ditekankan oleh Tapsell (2017), lembaga pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), harus beroperasi dengan transparan mulai dari tahap persiapan hingga pengumuman hasil pemilu. Transparansi dalam proses pemilu mencakup beberapa aspek penting. Pertama-tama, transparansi harus terlihat dalam penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga proses pemungutan dan penghitungan suara. Semua tahap ini harus dijalankan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk peserta pemilu, pengamat pemilu, dan masyarakat umum.

Transparansi juga penting dalam proses penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilu. Penghitungan suara harus dilakukan secara terbuka di hadapan saksi dari masing-masing partai politik atau calon, serta dapat diakses oleh pengamat

pemilu dan media massa. Hasil penghitungan suara harus diumumkan secara cepat dan akurat, tanpa adanya intervensi atau manipulasi yang meragukan. Pengawasan independen juga merupakan bagian integral dari menjaga transparansi dalam proses pemilu. Pengamat pemilu yang independen, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, harus diberikan akses penuh untuk memantau seluruh tahapan pemilu, harus dapat mengawasi pelaksanaan pemilu, termasuk proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengumuman hasil pemilu, serta memberikan laporan yang objektif dan akurat.

Keterlibatan masyarakat dalam memantau pemilu juga penting. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk melaporkan adanya pelanggaran atau ketidakberesan dalam proses pemilu kepada lembaga pemilu atau Bawaslu. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan direspons secara cepat oleh pihak berwenang. Dalam konteks pengumuman hasil pemilu, transparansi juga harus diprioritaskan. Pengumuman hasil pemilu harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh tahapan pengumuman hasil, termasuk proses verifikasi dan penetapan hasil oleh lembaga pemilu, harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau oleh pengamat pemilu serta peserta pemilu yang terlibat.

e. Penanganan Sengketa Pemilu

Penanganan sengketa pemilu merupakan bagian penting dari mekanisme demokratis dalam menjaga integritas dan keabsahan proses pemilihan umum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadiz (2020), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam menerima, menyelidiki, dan memutuskan kasus-kasus sengketa pemilu. Proses ini harus dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Penting untuk memahami bahwa sengketa pemilu dapat timbul dari berbagai masalah, mulai dari pelanggaran aturan kampanye hingga dugaan kecurangan dalam proses penghitungan suara. Oleh karena itu, Bawaslu harus memiliki mekanisme yang canggih dan terpercaya untuk

menerima pengaduan, melakukan penyelidikan, dan memutuskan kasus-kasus sengketa ini.

Proses penanganan sengketa harus dimulai dengan penerimaan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau memiliki bukti yang mendukung terjadinya pelanggaran atau kecurangan pemilu. Pengaduan ini harus diajukan secara tertulis dan dilengkapi dengan bukti yang memadai agar dapat diproses lebih lanjut oleh Bawaslu. Setelah menerima pengaduan, Bawaslu harus melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam menangani sengketa tersebut. Proses penyelidikan harus dilakukan secara transparan dan independen, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan hak fair bagi semua pihak yang terlibat.

Setelah penyelidikan selesai, Bawaslu harus memutuskan kasus sengketa berdasarkan bukti-bukti yang ada dan aturan hukum yang berlaku. Keputusan Bawaslu harus didasarkan pada analisis yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun. Keputusan Bawaslu harus diumumkan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pihak yang tidak puas dengan keputusan Bawaslu memiliki hak untuk mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi atau lembaga peradilan lainnya. Proses banding harus dilakukan secara adil dan transparan, dengan memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

Bawaslu juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat umum tentang temuan-temuan yang dihasilkan dari proses penanganan sengketa. Hal ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperbaiki proses pemilu di masa mendatang. Pemerintah dan lembaga terkait juga harus memberikan dukungan yang cukup kepada Bawaslu untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Ini termasuk memberikan sumber daya manusia, anggaran, dan perlindungan hukum kepada anggota Bawaslu agar dapat bekerja secara efektif dan independen.

# 2024

## BAB V

# PERAN MEDIA DALAM PILPRES 2024

---

---

Peran media dalam Pilpres 2024 di Indonesia menjadi semakin krusial seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Media, baik tradisional seperti televisi dan radio, maupun media digital dan sosial, berperan penting dalam membentuk opini publik, menyebarluaskan informasi kampanye, serta mengawasi jalannya proses pemilu. Dalam konteks politik yang semakin kompleks dan terfragmentasi, media tidak hanya menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat, tetapi juga sebagai arena bagi berbagai aktor politik untuk mempengaruhi dan memobilisasi pemilih.

### A. Media Sebagai Pengawal Demokrasi

#### 1. Peliputan yang Berimbang dan Objektif

Peliputan yang berimbang dan objektif adalah salah satu peran fundamental media dalam menjaga kualitas demokrasi selama pemilu. Media berfungsi sebagai penjaga demokrasi dengan menyediakan informasi yang akurat dan tidak memihak, yang memungkinkan pemilih membuat keputusan yang berdasarkan fakta, bukan propaganda atau bias.

##### a. Signifikansi Peliputan Berimbang dan Objektif

Peliputan media yang berimbang dan objektif memiliki implikasi yang sangat penting dalam konteks proses politik, terutama dalam masa pemilihan umum. McNair (2018) menekankan bahwa media yang mampu memberikan ruang yang setara bagi semua calon dan partai politik untuk menyampaikan visi, misi, dan program berperan krusial dalam menjaga integritas proses pemilu dan memastikan bahwa pemilih memiliki akses

yang seimbang terhadap informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang cerdas. Pada dasarnya, peliputan yang berimbang dan objektif membantu menjaga keadilan dalam kompetisi politik dan mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan proses demokrasi. Ketika media memberikan ruang yang setara bagi semua pihak yang bersaing dalam pemilihan umum, hal itu memastikan bahwa tidak ada pihak yang mendominasi narasi atau pengungkapan informasi. Dengan kata lain, media tidak boleh menjadi alat yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memanipulasi opini publik atau mengarahkan pemilih ke arah tertentu. Karena itu, prinsip-prinsip objektivitas dan keadilan dalam peliputan menjadi kunci dalam menjamin bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil dan transparan.

Peliputan media yang berimbang dan objektif juga membantu mendorong diskusi yang sehat dan informatif di antara pemilih. Ketika media memberikan cakupan yang setara terhadap semua kandidat dan partai politik, pemilih memiliki kesempatan untuk membandingkan platform dan program yang ditawarkan oleh masing-masing pilihan. Ini memungkinkan untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan memilih calon yang paling sesuai dengan nilai dan kepentingan. Dengan demikian, media berperan sebagai penyedia informasi yang penting dalam memfasilitasi proses demokrasi. Namun, tantangan besar yang dihadapi oleh media dalam mencapai peliputan yang berimbang dan objektif adalah tekanan politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi independensi. Sebagaimana yang disoroti oleh McNair (2018), media sering kali menghadapi tekanan dari pihak-pihak dengan kepentingan politik atau ekonomi yang kuat, yang dapat mengarah pada pembatasan kebebasan pers dan manipulasi informasi yang disiarkan. Terutama dalam konteks pemilihan umum, di mana persaingan politik sangat tinggi, tekanan ini dapat meningkat dan mengancam integritas peliputan media.

Tekanan ekonomi juga dapat mempengaruhi peliputan media, terutama ketika media menghadapi ketergantungan pada iklan politik atau dukungan finansial dari pihak-pihak tertentu.

Dalam upaya untuk mempertahankan sumber pendanaan, media mungkin cenderung untuk memihak atau memberikan perlakuan yang tidak seimbang terhadap pihak-pihak yang mempengaruhi pendanaan. Hal ini dapat mengarah pada peliputan yang bias dan merugikan bagi proses demokrasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk media itu sendiri, pemerintah, dan masyarakat sipil. Pertama-tama, media harus memperkuat profesionalisme dan mengedepankan prinsip-prinsip jurnalisme yang etis, termasuk verifikasi fakta, penggunaan sumber yang kredibel, dan penyajian sudut pandang yang beragam. Selain itu, organisasi profesi seperti Dewan Pers Indonesia memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan standar etika jurnalistik untuk memastikan bahwa media tetap berimbang dan objektif dalam peliputannya.

b. Tantangan dalam Peliputan Berimbang

Pada perspektif media Indonesia, menghadapi tantangan dari tekanan politik dan ekonomi merupakan realitas yang tidak dapat dihindari. Pemilu, khususnya Pilpres 2024, menjadi momen krusial di mana media diuji dalam menghadapi berbagai tekanan ini. Tantangan utama yang dihadapi oleh media adalah bagaimana dapat tetap independen dan obyektif dalam peliputan, terlepas dari tekanan-tekanan eksternal yang mungkin dihadapi. Tekanan politik merupakan salah satu aspek yang paling signifikan dalam menentukan arah peliputan media. Menurut Tapsell (2015), pemilik modal dan kepentingan politik memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi konten berita yang disiarkan oleh media. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tekanan langsung terhadap jurnalis untuk melaporkan berita sesuai dengan kepentingan tertentu hingga pengaruh yang lebih terselubung dalam pemilihan topik berita, penyajian informasi, dan pemilihan naratif yang mendukung agenda politik atau bisnis tertentu.

Tekanan ekonomi juga menjadi tantangan serius bagi media. Dalam lingkungan media yang didominasi oleh persaingan bisnis yang ketat, media sering kali menghadapi kebutuhan untuk mempertahankan pendapatan melalui iklan dan dukungan

finansial dari berbagai pihak. Dalam upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan pendapatan, media mungkin cenderung untuk memihak kepada pihak-pihak yang berpotensi menjadi sumber pendanaan. Hal ini dapat mengarah pada penyesuaian peliputan atau pembatasan kebebasan pers demi mempertahankan hubungan dengan pihak-pihak tersebut. Peliputan yang tidak seimbang dan tidak independen dapat merugikan proses demokrasi. Ketika media tidak mampu melaporkan berita dengan bebas tanpa intervensi atau tekanan dari pihak luar, kebebasan berekspresi dan akses informasi masyarakat menjadi terbatas. Pemilih kemudian mungkin tidak dapat membuat keputusan yang informasional, karena mungkin tidak memiliki akses yang seimbang terhadap informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang cerdas.

Peliputan yang tidak berimbang juga dapat memengaruhi integritas proses pemilu itu sendiri. Ketika media memberikan porsi yang tidak proporsional terhadap berita yang menguntungkan satu pihak atau kandidat tertentu, hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik dan merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum. Namun, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan ini, media juga memiliki peran penting dalam mengatasi tekanan politik dan ekonomi untuk menjaga independensi. Sebagaimana disarankan oleh Tapsell (2015), media dapat mengadopsi pendekatan yang lebih profesional dan etis dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Ini mencakup memperkuat praktik-praktik jurnalisisme yang objektif, seperti verifikasi fakta, penggunaan sumber yang kredibel, dan penyajian sudut pandang yang beragam.

c. Strategi untuk Peliputan Berimbang

Untuk menanggulangi tantangan yang dihadapi oleh media dalam menjaga keseimbangan dan obyektivitas dalam peliputannya, beberapa strategi telah diadopsi oleh media-media yang berkomitmen untuk mempertahankan standar jurnalisisme yang tinggi. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi tekanan politik dan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik sesuai dengan

prinsip-prinsip etika dan integritas jurnalistik. Beberapa strategi yang telah diterapkan antara lain:

- 1) Standar Jurnalisme yang Ketat: Salah satu pendekatan utama dalam menghadapi tantangan peliputan yang tidak seimbang adalah dengan menerapkan standar jurnalisme yang ketat. Seperti yang disarankan oleh Norris (2000), media harus memprioritaskan verifikasi fakta yang cermat sebelum menyampaikan informasi kepada publik. Penggunaan sumber yang kredibel juga menjadi kunci dalam memastikan keakuratan dan keberimbangan berita. Dengan menerapkan standar ini, media dapat mengurangi risiko penyebaran berita palsu atau informasi yang tidak terverifikasi.
- 2) Penyajian Sudut Pandang yang Beragam: Dalam upaya untuk memastikan obyektivitas dalam peliputan, media juga perlu menyajikan sudut pandang yang beragam mengenai suatu isu. Hal ini penting untuk menghindari bias dalam penyajian berita dan memberikan ruang bagi berbagai perspektif yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, publik dapat diberikan informasi yang lebih komprehensif dan dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi.
- 3) Peran Organisasi Pengawas Profesi: Organisasi seperti Dewan Pers Indonesia memiliki peran yang penting dalam mengawasi dan menegakkan standar etika jurnalistik. Melalui pengawasan yang ketat terhadap praktik peliputan media, organisasi semacam ini dapat membantu memastikan bahwa media tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip jurnalistik yang adil dan berimbang. Tindakan disiplin terhadap pelanggar kode etik juga dapat memberikan sinyal bahwa pelanggaran terhadap integritas jurnalistik tidak akan ditoleransi.
- 4) Transparansi dalam Proses Peliputan: Media juga perlu meningkatkan transparansi dalam proses peliputan. Dengan memperlihatkan proses editorial dan kriteria seleksi berita kepada publik, media dapat membangun kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat. Dengan

demikian, publik dapat melihat bahwa berita disajikan berdasarkan fakta dan bukan atas dasar kepentingan politik atau ekonomi tertentu.

- 5) Pendidikan dan Pelatihan Jurnalis: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan jurnalis juga merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa media dapat tetap berada pada standar profesionalisme yang tinggi. Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, jurnalis dapat lebih mampu menghadapi tekanan eksternal dan menghasilkan konten yang berkualitas. Pelatihan juga dapat membantu jurnalis dalam memahami pentingnya integritas dan obyektivitas dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik.
- 6) Keterlibatan Masyarakat: Media juga dapat melibatkan masyarakat dalam proses peliputan dengan cara seperti menyediakan platform untuk umpan balik dan partisipasi publik dalam pembuatan berita. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, media dapat memperoleh perspektif yang lebih luas tentang isu-isu yang sedang diliput dan memperkuat akuntabilitas terhadap publik.

Dengan menerapkan berbagai strategi ini secara konsisten, media dapat memperkuat kualitas peliputan dan menjaga integritas profesi jurnalistik. Ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat, seimbang, dan obyektif, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan terinformasi.

d. Studi Kasus: Pemilu di Negara Lain

Pengalaman dari negara-negara lain, seperti Inggris dan Amerika Serikat, memberikan contoh tentang bagaimana regulasi yang kuat dan lembaga pengawas yang efektif dapat mendukung peliputan berimbang dan obyektif selama periode pemilu. Di Inggris, Ofcom berperan sebagai regulator komunikasi yang bertugas memastikan bahwa penyiaran berita selama pemilu harus adil dan tidak memihak. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi yang kuat dapat memberikan landasan hukum yang jelas bagi media dalam menjalankan tanggung jawab. Dengan adanya aturan yang tegas, media di

Inggris terdorong untuk memberikan ruang yang setara bagi semua kandidat dan partai politik untuk menyampaikan visi dan program kepada publik. Pendekatan yang diambil oleh Ofcom menunjukkan bahwa lembaga pengawas yang independen dan berwibawa dapat berperan penting dalam memastikan keberimbangan dan obyektivitas dalam peliputan pemilu. Demikian pula, di Amerika Serikat, *Federal Communications Commission* (FCC) memiliki peraturan yang memastikan akses yang adil bagi semua kandidat dalam penyiaran televisi dan radio selama masa kampanye. Aturan ini menciptakan kerangka kerja yang mengatur seberapa banyak waktu siaran yang harus dialokasikan kepada masing-masing kandidat atau partai politik, sehingga menghindari dominasi satu pihak dan memastikan bahwa suara semua kandidat didengar secara merata.

Gambar 6. *Federal Communications Commission*



Studi kasus ini membahas pentingnya regulasi yang kuat dan lembaga pengawas yang independen dalam mendukung peliputan berimbang dan obyektif selama pemilu. Pengalaman dari negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa ketika ada kerangka kerja yang jelas dan diawasi dengan baik, media lebih mungkin untuk menjalankan tugas dengan integritas dan menghindari bias yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pengalaman negara-negara ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi Indonesia dalam meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap media selama periode pemilu untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat, seimbang, dan obyektif.

## 2. Pengawasan terhadap Berita *Hoaks*

Pengawasan terhadap berita *hoaks* atau berita palsu merupakan aspek penting lain dari peran media sebagai pengawal demokrasi. Dalam era digital saat ini, penyebaran berita *hoaks* menjadi salah satu tantangan terbesar yang dapat merusak integritas proses pemilu dan memperburuk polarisasi politik.

### a. Dampak Berita *Hoaks*

Dampak dari penyebaran berita *hoaks*, terutama dalam konteks politik seperti Pilpres 2024, sangatlah signifikan. Penelitian oleh Allcott dan Gentzkow (2017) membahas bahwa *hoaks* dapat mempengaruhi persepsi pemilih dan menyebabkan disinformasi yang merugikan. Hal ini bisa berujung pada perpecahan sosial yang lebih dalam di masyarakat, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu. Studi oleh Vosoughi, Roy, dan Aral (2018) juga menunjukkan bahwa berita palsu menyebar lebih cepat dan lebih luas daripada berita yang benar, menekankan perlunya pengawasan dan penanggulangan terhadap *hoaks*. Dalam konteks Indonesia, penyebaran berita *hoaks* selama pemilu dapat memperburuk ketegangan politik dan sosial yang sudah ada. Dampaknya bisa sangat merugikan, seperti menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat, mengurangi partisipasi pemilih yang berdampak pada legitimasi hasil pemilu, dan merusak citra demokrasi Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, penting bagi media, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam mengatasi penyebaran berita *hoaks*.

Salah satu dampak langsung dari penyebaran berita *hoaks* adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap media. Jika media tidak mampu membedakan berita yang benar dan *hoaks*, maka akan kehilangan kepercayaan sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Hal ini dapat membahayakan kebebasan pers dan memperkuat narasi bahwa media hanya merupakan alat politik tertentu untuk memengaruhi opini publik. Dampak lainnya adalah terkikisnya kualitas diskusi publik. Berita *hoaks* cenderung menciptakan perdebatan yang tidak berdasar pada fakta dan logika. Hal ini dapat mengaburkan isu-isu nyata yang seharusnya dibahas dalam pemilihan umum, sehingga

mempersulit pemilih untuk membuat keputusan yang rasional. Ini berdampak pada kualitas demokrasi secara keseluruhan, karena diskusi publik yang berkualitas adalah salah satu pilar utama dari sistem demokrasi yang sehat.

Berita *hoaks* juga dapat menciptakan ketidakstabilan politik. Misinformasi yang menyebar luas dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat, terutama jika *hoaks* tersebut bersifat provokatif atau meresahkan. Hal ini bisa membahayakan keamanan negara dan mengganggu proses demokrasi yang seharusnya damai dan terkendali. Di sisi lain, masyarakat yang semakin cerdas dalam memilah informasi dapat menjadi lebih kritis terhadap berita yang diterima, menjadi lebih waspada terhadap berita *hoaks* dan cenderung mencari informasi dari berbagai sumber sebelum mempercayainya. Hal ini bisa menjadi efek positif dari penyebaran berita *hoaks*, di mana masyarakat menjadi lebih aware akan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya lebih lanjut.

b. Peran Media dalam Mengawasi Berita *Hoaks*

Peran media dalam mengawasi berita *hoaks* sangatlah penting dalam menanggulangi penyebaran disinformasi yang dapat merugikan masyarakat. Wardle dan Derakhshan (2017) membahas bahwa media memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan mekanisme yang efektif untuk melakukan *fact-checking* terhadap berita yang disajikan kepada publik. Ini mencakup langkah-langkah seperti verifikasi fakta, penggunaan sumber yang kredibel, dan penyajian sudut pandang yang beragam. Dengan menerapkan praktik jurnalisme yang ketat, media dapat membantu memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar dan dapat dipercaya. Salah satu strategi utama yang dapat digunakan oleh media adalah pengembangan tim khusus untuk memverifikasi fakta. Tim ini bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan terhadap informasi yang diterima sebelum disebarkan kepada publik, melakukan investigasi mendalam untuk memastikan kebenaran dan akurasi informasi, sehingga dapat meminimalkan risiko penyebaran berita *hoaks*.

Kolaborasi antara media dengan platform media sosial dan organisasi pemeriksa fakta juga merupakan langkah penting dalam memerangi *hoaks*. Media sosial sering menjadi media utama untuk penyebaran *hoaks*, oleh karena itu kerjasama antara media tradisional dan platform media sosial dapat membantu dalam mendeteksi, menanggulangi, dan menghapus konten yang menyesatkan atau palsu. Kolaborasi ini juga memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya yang dapat memperkuat upaya penanggulangan *hoaks*. Selain melakukan *fact-checking* secara internal, media juga memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi yang benar kepada publik. Ini mencakup memberikan liputan yang menyeluruh tentang kebenaran suatu berita, serta menyediakan konteks yang tepat agar masyarakat dapat memahami informasi secara lebih baik. Dengan menyediakan informasi yang akurat dan komprehensif, media dapat membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan rasional.

Media juga dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang cara membedakan berita yang benar dan *hoaks*, dapat menyediakan pedoman praktis atau tips bagi pembaca untuk mengidentifikasi berita palsu, serta menyediakan pelatihan atau *workshop* tentang literasi media. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *hoaks* dan memberikan keterampilan untuk memilah informasi, media dapat membantu memperkuat pertahanan masyarakat terhadap penyebaran *hoaks*. Selain mengidentifikasi dan memverifikasi *hoaks*, media juga harus aktif dalam menanggapi penyebaran informasi yang salah. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberitaan yang kritis terhadap *hoaks*, penyediaan klarifikasi atau fakta yang benar, serta memberikan peringatan kepada masyarakat tentang risiko dari *hoaks* tersebut. Dengan demikian, media tidak hanya bertindak sebagai filter informasi, tetapi juga sebagai agen yang aktif dalam melawan disinformasi dan melindungi kepentingan publik.



dan sumber daya antara media dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki keahlian dalam memerangi *hoaks*, sehingga dapat meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan *hoaks* secara keseluruhan.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen media Indonesia dalam memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada publik adalah akurat, terpercaya, dan bebas dari *hoaks*. Dengan membentuk tim khusus untuk memverifikasi fakta dan berkolaborasi dengan organisasi pemeriksa fakta seperti MAFINDO, media tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai penjaga kebenaran dan integritas informasi. Praktik baik ini memberikan dampak positif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap media dan mengurangi risiko penyebaran *hoaks* yang dapat merugikan. Lebih lanjut, langkah-langkah ini juga mencerminkan komitmen media terhadap prinsip-prinsip jurnalisme yang etis dan profesional. Dengan melakukan *fact-checking* secara menyeluruh sebelum menyebarkan informasi kepada publik, media memastikan bahwa memenuhi standar kebenaran dan akurasi yang tinggi dalam peliputannya. Selain itu, kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil seperti MAFINDO juga menunjukkan keterlibatan media dalam membangun ekosistem yang sehat untuk memerangi *hoaks* dan disinformasi.

d. Inisiatif Global dan Lokal

Inisiatif global seperti International *Fact-checking* Network (IFCN) telah menjadi sebuah tonggak penting dalam memerangi penyebaran berita *hoaks* di seluruh dunia. IFCN menetapkan standar dan sertifikasi bagi organisasi pemeriksa fakta, yang memberikan panduan yang jelas bagi media di Indonesia dan negara lain untuk meningkatkan kapabilitas dalam menangkal berita *hoaks* (Graves, 2016). Melalui standar dan sertifikasi yang ketat, IFCN membantu memastikan bahwa praktik pemeriksaan fakta yang dilakukan oleh media benar-benar terpercaya dan akurat, sehingga dapat menghasilkan informasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Di tingkat lokal, pemerintah dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat. Melalui program-program

pendidikan dan kesadaran, masyarakat dapat dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi lebih kritis dalam menerima informasi (Martens & Hobbs, 2015). Dengan meningkatkan pemahaman tentang cara membedakan informasi yang valid dari berita *hoaks*, masyarakat dapat lebih terlindungi dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyebaran *hoaks*.

Kerja sama antara pemerintah, media, dan organisasi masyarakat sipil juga merupakan kunci dalam memerangi berita *hoaks* secara efektif. Melalui kolaborasi ini, berbagai pihak dapat saling mendukung dalam upaya untuk menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan dan sumber daya untuk program-program pendidikan dan kesadaran, sementara media dapat berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang benar dan melakukan pemeriksaan fakta secara menyeluruh. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil seperti MAFINDO dapat membantu dalam mengidentifikasi dan melawan penyebaran *hoaks* melalui upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan yang terkoordinasi.

e. Regulasi dan Kebijakan

Regulasi dan kebijakan yang tepat sangat penting dalam memerangi penyebaran berita *hoaks*. Di Indonesia, langkah-langkah legislatif telah diambil untuk mengatasi masalah ini, dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya pemerintah untuk mengendalikan penyebaran *hoaks* dan disinformasi. Namun, seperti yang dinyatakan oleh Tapsell (2019), pelaksanaan dan pengawasan regulasi ini harus dilakukan secara adil dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat mengancam kebebasan pers. Pemerintah Indonesia, melalui UU ITE, telah memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku penyebaran berita *hoaks*. Namun, kebijakan ini juga harus diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas dan adil. Dalam menegakkan UU ITE, pemerintah harus memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan dan tidak diskriminatif. Penyalahgunaan UU ITE untuk membungkam kritik atau pendapat yang sah dapat merusak kebebasan berbicara dan

berpotensi menciptakan iklim ketakutan di antara wartawan dan pengguna internet.

Regulasi juga harus didukung oleh pendekatan yang holistik dan terpadu dalam mengatasi berita *hoaks*. Ini termasuk upaya pencegahan dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya kritis dalam mengonsumsi informasi. Pendidikan tentang literasi media menjadi kunci dalam membantu masyarakat memahami cara membedakan antara berita yang benar dan *hoaks* serta menjadi lebih skeptis terhadap informasi yang tidak diverifikasi. Regulasi yang efektif juga harus mampu menangani aspek-aspek teknis penyebaran *hoaks*, seperti penyebaran melalui platform media sosial. Platform media sosial berperan penting dalam menyebarkan berita *hoaks*, dan oleh karena itu, juga harus berbagi tanggung jawab dalam memerangi masalah ini. Kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengidentifikasi, menghapus, dan melaporkan konten yang melanggar.

Penting juga untuk meningkatkan kesadaran publik tentang risiko dan dampak negatif dari penyebaran *hoaks*. Program-program pendidikan dan kesadaran yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dapat membantu masyarakat memahami betapa pentingnya kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi. Tentu saja, dalam merumuskan dan melaksanakan regulasi terkait berita *hoaks*, prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berbicara harus selalu dijunjung tinggi. Regulasi yang berlebihan atau penegakan hukum yang tidak adil dapat membahayakan kebebasan pers dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil harus selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat dari berita *hoaks* dan kebebasan berekspresi.

## B. Tantangan Media

### 1. Pengaruh Media Sosial

Media sosial telah menjadi salah satu elemen dominan dalam penyebaran informasi dan opini politik, terutama selama periode pemilihan. Meskipun media sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi politik dan demokrasi, penggunaannya juga menghadirkan berbagai tantangan signifikan.

#### a. Peran Media Sosial dalam Politik

Media sosial telah membawa perubahan mendalam dalam dinamika politik global, termasuk di Indonesia. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram kini menjadi alat strategis yang digunakan oleh politisi dan partai politik untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih, menyebarkan pesan kampanye, dan menggalang dukungan. Howard dan Hussain (2013) menekankan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi, tetapi juga sebagai alat mobilisasi massa yang efektif, memungkinkan para pengguna untuk berbagi pandangan politik dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari banyak orang, termasuk generasi muda yang mendominasi demografi pengguna internet. Dalam konteks Pilpres 2024 di Indonesia, penggunaan media sosial oleh kandidat dan partai politik menunjukkan peningkatan yang signifikan. Platform ini memungkinkan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam dengan cara yang lebih efisien dan interaktif dibandingkan dengan media tradisional. Selain itu, media sosial memungkinkan komunikasi dua arah, di mana pemilih dapat memberikan umpan balik langsung, menanyakan pertanyaan, dan berinteraksi dengan kandidat secara *real-time*.

Salah satu keunggulan utama media sosial dalam konteks politik adalah kemampuannya untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Kampanye politik dapat memanfaatkan viralitas media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan dalam waktu singkat. Misalnya, sebuah postingan yang menarik atau kontroversial dapat dengan cepat menyebar

melalui jaringan berbagi, mencapai ribuan atau bahkan jutaan orang dalam hitungan jam. Hal ini memberikan peluang besar bagi kandidat untuk mempengaruhi opini publik dan memobilisasi dukungan di masa-masa kritis menjelang pemilu. Namun, di balik manfaatnya yang besar, penggunaan media sosial dalam politik juga menghadirkan tantangan yang signifikan. Kecepatan dan jangkauan penyebaran informasi di media sosial dapat menjadi pedang bermata dua. Menurut Vosoughi, Roy, dan Aral (2018), berita palsu dan informasi menyesatkan seringkali menyebar lebih cepat dan lebih luas dibandingkan dengan berita yang benar. Ini dapat mengakibatkan disinformasi yang merugikan, mempengaruhi opini publik, dan bahkan mengubah hasil pemilu. Dalam Pilpres 2024, risiko penyebaran *hoaks* dan kampanye hitam menjadi perhatian utama, mengingat dampaknya yang potensial terhadap stabilitas politik dan sosial.

Media sosial juga dikenal menciptakan "*echo chambers*" atau ruang gema, di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan pandangan sendiri. Fenomena ini dapat memperkuat bias konfirmasi dan meningkatkan polarisasi politik. Sunstein (2001) berpendapat bahwa ruang gema ini dapat mengisolasi pengguna dari perspektif yang berbeda, memperburuk ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda dan mengurangi kemungkinan dialog yang konstruktif. Di Indonesia, hal ini terlihat jelas selama periode pemilu, di mana pendukung kandidat tertentu hanya mengakses dan menyebarkan konten yang mendukung pandangannya, sambil mengabaikan atau menolak informasi yang bertentangan. Verifikasi fakta menjadi tantangan besar di era media sosial. Wardle dan Derakhshan (2017) menekankan bahwa kecepatan dan volume informasi yang beredar membuat proses verifikasi menjadi lebih sulit. Berita palsu yang menyebar dengan cepat dapat menyebabkan kerusakan reputasi kandidat dan merusak integritas proses demokrasi sebelum informasi yang benar dapat mengoreksi misinformasi tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara platform media sosial dan organisasi pemeriksa fakta menjadi sangat penting. Program seperti Third-

Party *Fact-checking* di Facebook, yang bekerja sama dengan organisasi pemeriksa fakta independen, merupakan langkah penting dalam memerangi penyebaran informasi palsu.

Pada upaya mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh media sosial, beberapa langkah telah diambil di berbagai negara. Misalnya, regulasi yang lebih ketat dan tanggung jawab yang lebih besar dari platform media sosial diperlukan untuk mengurangi penyebaran informasi palsu. Tambini (2017) membahas bahwa platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram harus mengambil langkah proaktif untuk memonitor dan menghapus konten yang menyesatkan. Ini termasuk mengembangkan algoritma yang lebih baik untuk mendeteksi *hoaks* dan menyediakan alat bagi pengguna untuk melaporkan informasi yang salah. Selain upaya dari pihak platform, literasi media di kalangan masyarakat juga harus ditingkatkan. Pendidikan media yang baik dapat membekali masyarakat dengan kemampuan kritis untuk menilai informasi yang ditemui di media sosial. Martens dan Hobbs (2015) menyarankan bahwa program literasi media dapat diterapkan di sekolah-sekolah dan melalui kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang jurnalisme yang berkualitas dan cara mengenali bias serta informasi palsu. Dengan meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam membedakan informasi yang valid, masyarakat dapat lebih terlindungi dari dampak negatif berita *hoaks*.

b. Penyebaran Informasi yang Cepat

Media sosial telah merevolusi cara informasi disebarkan dengan kecepatan dan jangkauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam hitungan detik, berita bisa menjangkau jutaan orang di berbagai penjuru dunia, berkat platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Kemampuan ini memungkinkan informasi politik dan kampanye pemilu untuk menyebar dengan cepat, menjadikan media sosial alat yang sangat efektif dalam mobilisasi dan komunikasi massa. Namun, kecepatan dan jangkauan penyebaran informasi ini juga membawa tantangan besar, terutama terkait dengan berita palsu dan informasi menyesatkan. Menurut penelitian yang dilakukan

oleh Vosoughi, Roy, dan Aral (2018), berita palsu cenderung menyebar lebih cepat dan luas dibandingkan dengan berita yang benar. Ini terjadi karena berita palsu sering kali memiliki elemen yang lebih sensasional, mengejutkan, atau emosional yang menarik perhatian pengguna media sosial. Dalam konteks politik, penyebaran informasi yang menyesatkan dapat memiliki dampak yang sangat merugikan. Berita palsu bisa mengubah persepsi publik, mempengaruhi opini pemilih, dan bahkan menentukan hasil pemilu sebelum informasi tersebut dapat diverifikasi atau dikontrol dengan memadai.

Salah satu aspek yang membuat berita palsu sangat efektif di media sosial adalah mekanisme "*like*," "*share*," dan "*retweet*" yang memungkinkan informasi menyebar secara viral. Pengguna media sosial cenderung membagikan konten yang menarik perhatian tanpa melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi tersebut. Hal ini diperparah oleh algoritma platform media sosial yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna dengan menampilkan konten yang kemungkinan besar akan mendapat respons emosional, tanpa memperhatikan akurasi informasi. Kecepatan penyebaran informasi ini menimbulkan tantangan besar dalam hal verifikasi dan pengendalian. Jurnalis dan organisasi pemeriksa fakta (*fact-checkers*) sering kali berada dalam posisi yang sulit untuk mengimbangi laju penyebaran informasi palsu. Wardle dan Derakhshan (2017) menekankan bahwa proses verifikasi informasi di era media sosial menjadi semakin sulit karena volume dan kecepatan aliran informasi yang sangat besar. Bahkan ketika berita palsu telah diidentifikasi dan dikoreksi, kerusakan yang ditimbulkan mungkin sudah tidak dapat diperbaiki karena informasi yang salah sudah tertanam dalam opini publik.

Dampak dari penyebaran informasi palsu ini sangat terlihat dalam konteks pemilu. Informasi yang menyesatkan bisa merusak reputasi kandidat, mengubah pandangan pemilih tentang isu-isu penting, dan bahkan memicu konflik sosial. Misalnya, kampanye hitam dan *hoaks* yang disebarluaskan melalui media sosial selama periode pemilu dapat menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok pendukung yang

berbeda, mengganggu stabilitas sosial, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah perlu diambil. Kolaborasi antara platform media sosial dan organisasi pemeriksa fakta sangat penting dalam memerangi penyebaran informasi palsu. Program *Third-Party Fact-checking* yang dijalankan oleh Facebook, misalnya, bekerja sama dengan berbagai organisasi pemeriksa fakta untuk menandai dan mengurangi penyebaran berita palsu. Selain itu, platform media sosial perlu mengembangkan algoritma yang lebih cerdas dan etis untuk mendeteksi dan mengurangi visibilitas konten yang menyesatkan.

Pendidikan literasi media juga sangat penting. Masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan kritis untuk menilai informasi yang diterima di media sosial. Martens dan Hobbs (2015) menyarankan bahwa program literasi media dapat diterapkan di sekolah-sekolah dan melalui kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara mengenali bias, sensasionalisme, dan informasi palsu. Dengan meningkatkan kesadaran dan keterampilan ini, masyarakat dapat lebih terlindungi dari dampak negatif berita palsu. Regulasi yang mendukung juga diperlukan untuk mengawasi penyebaran informasi di media sosial. Pemerintah dapat menetapkan aturan yang mewajibkan platform media sosial untuk lebih transparan dalam algoritma dan lebih bertanggung jawab dalam menangani konten yang menyesatkan. Misalnya, regulasi yang mewajibkan platform untuk menyediakan laporan rutin tentang upaya dalam memerangi *hoaks* dan informasi palsu bisa menjadi langkah yang efektif.

c. *Echo chambers* dan Polarisasi

Media sosial telah menjadi ruang utama di mana orang mencari informasi dan berinteraksi dengan pandangan politik yang sesuai dengan keyakinan sendiri. Fenomena "*echo chambers*" atau ruang gema mengacu pada lingkungan ini di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan sendiri. Dalam konteks politik, ruang gema ini dapat memperkuat bias konfirmasi dan berkontribusi terhadap polarisasi politik. Menurut Sunstein (2001), ruang gema ini

memungkinkan individu untuk hidup dalam gelembung informasi yang memperkuat keyakinan sendiri dan menghalangi pandangan yang berbeda. Di Indonesia, fenomena ini menjadi sangat nyata selama periode pemilu. Pendukung kandidat tertentu sering kali hanya mengakses dan berbagi konten yang mendukung pandangan, sementara mengabaikan atau menolak informasi yang bertentangan. Algoritma media sosial, yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna dengan menampilkan konten yang kemungkinan besar akan disukai, semakin memperkuat kecenderungan ini. Hasilnya, pengguna media sosial terperangkap dalam lingkaran umpan balik yang memperkuat keyakinan sendiri dan mengisolasi dari pandangan yang berbeda.

Ruang gema ini memiliki dampak signifikan terhadap polarisasi politik. Ketika individu terus-menerus terpapar pada informasi yang mendukung keyakinan tanpa tantangan atau kontradiksi, cenderung menjadi lebih yakin dan ekstrem dalam pandangan. Ini dapat menyebabkan perpecahan yang lebih dalam masyarakat, di mana kelompok-kelompok yang berbeda semakin terpisah dan saling tidak percaya. Dalam konteks pemilu, hal ini dapat menciptakan lingkungan yang penuh dengan konflik dan ketegangan. Menurut penelitian, ruang gema tidak hanya memperkuat pandangan yang ada tetapi juga mengurangi kemampuan individu untuk menerima informasi baru atau mengubah pandangan. Ketika individu hanya mendengar satu sisi dari argumen, kurang mungkin untuk mempertimbangkan sudut pandang lain atau berpartisipasi dalam diskusi yang konstruktif. Ini mengarah pada polarisasi yang lebih besar dan mengurangi peluang untuk dialog yang produktif antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Ruang gema juga dapat memperburuk masalah berita palsu dan disinformasi. Ketika pengguna hanya terpapar pada informasi yang mendukung keyakinan, lebih mungkin untuk mempercayai dan menyebarkan berita palsu yang sesuai dengan pandangan. Disinformasi dapat menyebar dengan cepat dalam ruang gema karena kurangnya paparan terhadap informasi yang bertentangan dan kurangnya verifikasi independen. Hal ini dapat

memperburuk polarisasi politik dan mengganggu proses demokrasi yang sehat. Untuk mengatasi masalah ruang gema dan polarisasi, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat. Dengan kemampuan untuk secara kritis menilai informasi dan mengenali bias, individu dapat lebih baik dalam menavigasi informasi di media sosial dan menghindari perangkap ruang gema. Martens dan Hobbs (2015) menyarankan bahwa pendidikan literasi media harus menjadi bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah dan juga diperkenalkan melalui kampanye publik.

Platform media sosial juga perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengatasi ruang gema. Algoritma yang mendorong keterlibatan dengan menampilkan konten yang mungkin disukai pengguna perlu diubah untuk mempromosikan keragaman informasi dan pandangan. Ini bisa termasuk menampilkan lebih banyak konten dari sumber yang berbeda dan menyediakan konteks yang lebih luas untuk berita dan informasi. Langkah-langkah seperti ini dapat membantu pengguna mendapatkan pandangan yang lebih seimbang dan mengurangi polarisasi. Selain itu, kolaborasi antara platform media sosial dan organisasi pemeriksa fakta sangat penting untuk mengatasi disinformasi dalam ruang gema. Dengan menandai dan mengurangi visibilitas berita palsu, serta menyediakan sumber yang dapat dipercaya, platform media sosial dapat membantu memitigasi efek negatif dari ruang gema. Program *Third-Party Fact-checking* yang dijalankan oleh Facebook adalah contoh bagaimana kolaborasi ini dapat bekerja.

d. Upaya Mengatasi Tantangan

Mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh media sosial dalam penyebaran informasi palsu merupakan tugas yang kompleks dan berkelanjutan. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah kolaborasi antara platform media sosial dan organisasi pemeriksa fakta. Contohnya, Facebook bekerja sama dengan *Third-Party Fact-checking* Program untuk menilai dan menandai konten yang berpotensi menyesatkan. Upaya ini menunjukkan pengakuan atas masalah serius yang ditimbulkan

oleh informasi palsu dan merupakan langkah penting dalam memitigasi dampaknya. Program pemeriksa fakta ini tidak hanya memverifikasi informasi tetapi juga memberikan konteks tambahan kepada pengguna, membantu memahami mengapa suatu konten dianggap menyesatkan. Kolaborasi ini, meskipun penting, tidak cukup untuk sepenuhnya mengatasi masalah penyebaran informasi palsu. Tambini (2017) menekankan bahwa regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk memaksa platform media sosial bertanggung jawab lebih besar. Pemerintah dan lembaga regulasi perlu mengembangkan kebijakan yang mendesak platform untuk mengambil tindakan lebih proaktif dalam memantau dan mengendalikan konten. Regulasi ini bisa mencakup persyaratan transparansi lebih besar tentang bagaimana algoritma bekerja dan bagaimana memutuskan untuk menghapus atau menandai konten tertentu. Selain itu, diperlukan sanksi yang jelas dan tegas bagi platform yang gagal mematuhi standar tersebut.

Pendidikan literasi media bagi pengguna juga menjadi komponen penting dalam upaya mengatasi tantangan ini. Literasi media mencakup kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi secara kritis, sehingga pengguna dapat membedakan antara informasi yang valid dan yang menyesatkan. Program pendidikan ini bisa dijalankan di sekolah-sekolah, universitas, dan melalui kampanye publik yang disponsori oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Literasi media yang baik tidak hanya membantu individu dalam mengenali informasi palsu tetapi juga memperkuat keseluruhan ekosistem informasi dengan mendorong perilaku berbagi yang lebih bertanggung jawab. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memerangi informasi palsu. Algoritma pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mendeteksi pola penyebaran informasi palsu dan menandainya secara otomatis. Misalnya, penggunaan analitik canggih dapat membantu mengidentifikasi akun atau jaringan yang menyebarkan informasi palsu secara sistematis. Platform media sosial dapat mengembangkan alat-alat ini untuk memberikan peringatan dini dan mencegah penyebaran konten yang salah sebelum menjadi viral. Namun, penggunaan

teknologi ini harus disertai dengan pengawasan manusia untuk memastikan akurasi dan menghindari sensor yang berlebihan atau salah.

Tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait dengan teknologi dan regulasi tetapi juga dengan aspek sosial dan budaya. Misalnya, bias konfirmasi membuat orang lebih cenderung menerima dan menyebarkan informasi yang sesuai dengan keyakinan, meskipun informasi tersebut salah. Oleh karena itu, upaya mengatasi informasi palsu juga harus mencakup strategi untuk mengatasi bias kognitif ini. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mempromosikan dialog yang inklusif dan terbuka tentang isu-isu kontroversial, serta mendorong masyarakat untuk terbuka terhadap pandangan yang berbeda. Upaya lain yang dapat diambil adalah memperkuat peran jurnalisme yang bertanggung jawab. Media massa tradisional memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dengan meningkatnya prevalensi informasi palsu, media yang kredibel harus memperkuat komitmen terhadap jurnalisme investigatif dan pelaporan yang berbasis bukti. Selain itu, media massa harus berkolaborasi dengan platform media sosial untuk memastikan bahwa konten yang dihasilkan tidak disalahgunakan atau dipelintir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

## **2. Ketergantungan pada *Clickbait* dan Sensasionalisme**

Ketergantungan pada *clickbait* dan sensasionalisme adalah tantangan signifikan lain yang dihadapi oleh media dalam melaksanakan perannya sebagai pengawal demokrasi. Dalam upaya menarik perhatian pembaca dan meningkatkan pendapatan iklan, banyak media tergoda untuk mempublikasikan konten yang sensasional dan memicu klik, sering kali dengan mengorbankan akurasi dan kualitas jurnalistik.

### **a. Definisi dan Dampak *Clickbait***

*Clickbait* adalah fenomena yang semakin merajalela dalam dunia jurnalisme digital dan pemasaran konten. Istilah ini mengacu pada judul atau konten yang dirancang untuk menarik perhatian pembaca dengan cara yang berlebihan atau menyesatkan, dengan tujuan utama untuk mendapatkan klik

sebanyak mungkin. Menurut Chesney (2018), meskipun *clickbait* dapat secara efektif meningkatkan jumlah pengunjung situs web, konten yang seringkali disajikan tidak memenuhi janji yang dibuat dalam judul, sehingga dapat merusak kepercayaan pembaca terhadap media yang menggunakannya. Asal-usul *clickbait* dapat ditelusuri kembali ke model bisnis media digital yang bergantung pada pendapatan iklan. Dalam model ini, lebih banyak klik berarti lebih banyak pendapatan iklan. Oleh karena itu, media dan pembuat konten sering kali terpaksa menggunakan taktik *clickbait* untuk menarik perhatian dan memaksimalkan klik. Namun, pendekatan ini memiliki banyak konsekuensi negatif yang melampaui peningkatan sementara dalam jumlah pengunjung.

Salah satu dampak utama dari *clickbait* adalah erosi kepercayaan. Ketika pembaca merasa ditipu oleh judul yang berlebihan atau menyesatkan, cenderung kehilangan kepercayaan pada media tersebut. Ini bisa berdampak jangka panjang pada reputasi media, karena pembaca yang merasa dikhianati kemungkinan besar akan mencari sumber informasi lain yang dianggap lebih dapat dipercaya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi basis pembaca setia dan berdampak negatif pada kredibilitas media. Selain itu, *clickbait* sering kali berkontribusi pada penyebaran informasi yang tidak akurat atau dangkal. Konten yang dirancang hanya untuk menarik klik seringkali mengorbankan kedalaman dan kualitas informasi. Ini berarti bahwa pembaca mungkin tidak mendapatkan pemahaman yang komprehensif atau akurat tentang topik yang sedang dibahas. Dalam konteks berita politik atau informasi penting lainnya, hal ini bisa sangat merugikan, karena dapat mengarah pada pembentukan opini yang tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya.

*Clickbait* juga dapat memperburuk masalah disinformasi. Dengan menarik perhatian pada konten yang sensasional atau menyesatkan, *clickbait* dapat memperkuat narasi yang salah dan menyebarkan informasi yang tidak benar. Ini bisa sangat berbahaya dalam konteks politik atau kesehatan masyarakat, di mana informasi yang akurat dan dapat dipercaya sangat penting.

Misalnya, dalam situasi pandemi, penyebaran informasi yang menyesatkan tentang kesehatan melalui *clickbait* dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi kesehatan masyarakat. Dampak negatif dari *clickbait* juga dirasakan dalam ekosistem media secara lebih luas. Ketika banyak media menggunakan taktik ini, standar jurnalisme secara keseluruhan bisa menurun. Media yang mencoba mempertahankan integritas jurnalistik mungkin merasa tertekan untuk mengikuti tren ini demi bertahan dalam persaingan. Hal ini dapat menciptakan siklus di mana kualitas jurnalisme menurun secara keseluruhan, karena lebih banyak media yang mengorbankan kualitas untuk klik.

Pembaca juga memiliki peran dalam masalah ini. Konsumsi konten *clickbait* oleh pembaca menunjukkan adanya permintaan untuk jenis konten ini. Oleh karena itu, pendidikan dan literasi media menjadi sangat penting. Meningkatkan kemampuan pembaca untuk mengenali *clickbait* dan memahami dampak negatifnya dapat membantu mengurangi permintaan untuk konten semacam itu. Dengan demikian, literasi media tidak hanya melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi informasi tetapi juga untuk membuat pilihan yang lebih bijaksana tentang konten yang dikonsumsi. Untuk mengatasi dampak negatif *clickbait*, beberapa media telah mulai mengadopsi model bisnis yang lebih berkelanjutan. Salah satu pendekatan adalah beralih ke model langganan berbayar, di mana pendapatan tidak hanya bergantung pada iklan tetapi juga pada kontribusi langsung dari pembaca yang menghargai konten berkualitas tinggi. Model ini memungkinkan media untuk fokus pada pembuatan konten yang mendalam dan akurat, tanpa harus terlibat dalam praktik *clickbait* untuk menarik klik.

b. Sensasionalisme dalam Peliputan Politik

Sensasionalisme dalam peliputan politik adalah fenomena yang telah lama ada dan terus berkembang seiring dengan perubahan dalam teknologi dan konsumsi media. Sensasionalisme merujuk pada praktik jurnalistik yang menekankan elemen dramatis, emosional, atau mengejutkan dari sebuah berita untuk menarik perhatian pembaca atau penonton. Bird (2009) menjelaskan bahwa sensasionalisme cenderung

mengorbankan kedalaman dan konteks untuk memprioritaskan aspek yang paling menghebohkan dari sebuah peristiwa. Dalam konteks politik, terutama selama periode pemilu seperti Pilpres 2024, praktik ini bisa memiliki dampak yang signifikan dan seringkali merugikan. Dalam era digital, di mana informasi menyebar dengan cepat dan luas melalui berbagai platform media sosial dan situs berita *online*, sensasionalisme telah menjadi strategi umum bagi banyak *outlet* berita. Tujuannya adalah untuk menarik klik dan perhatian dalam lanskap media yang sangat kompetitif. Namun, Bird (2009) menegaskan bahwa pendekatan ini bisa mengalihkan perhatian publik dari isu-isu politik yang penting dan mendalam, seperti kebijakan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, menuju skandal atau insiden yang bersifat sementara dan kurang relevan. Akibatnya, pemilih mungkin tidak mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat.

Selama periode kampanye Pilpres 2024, penggunaan sensasionalisme dapat memperkeruh suasana politik dengan menciptakan ketegangan yang tidak perlu di antara pendukung kandidat. Liputan yang berfokus pada kontroversi, serangan pribadi, dan insiden kecil dapat memanaskan suhu politik dan membuat dialog yang konstruktif menjadi sulit. Misalnya, alih-alih membahas program atau visi kandidat untuk masa depan negara, media mungkin lebih memilih untuk melaporkan pernyataan kontroversial atau pertikaian antar kandidat. Hal ini tidak hanya mengalihkan perhatian dari substansi debat politik tetapi juga dapat memperburuk polarisasi di kalangan pemilih. Polarisasi politik adalah salah satu dampak utama dari sensasionalisme dalam jurnalisme. Ketika media terus-menerus membahas perbedaan dan konflik antar kandidat atau partai politik, hal ini dapat memperkuat pandangan yang ada dan membuat kompromi atau pemahaman yang lebih mendalam semakin sulit dicapai. Sunstein (2001) menyatakan bahwa media yang sensasionalistik berkontribusi pada terciptanya "*echo chambers*", di mana individu hanya terpapar pada informasi yang mengkonfirmasi bias sendiri. Dalam konteks ini, pendukung kandidat tertentu mungkin menjadi semakin terisolasi dalam

pandangan, menolak informasi yang bertentangan dan hanya memperkuat keyakinan sendiri.

Sensasionalisme juga dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kredibilitas media itu sendiri. Ketika pembaca atau penonton merasa bahwa berita yang dikonsumsi lebih berfokus pada drama daripada fakta, mungkin mulai meragukan integritas dan keandalan sumber berita tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengikis kepercayaan publik terhadap media sebagai institusi yang seharusnya menyediakan informasi yang akurat dan objektif. Kepercayaan yang menurun ini dapat berdampak buruk pada demokrasi, di mana media yang bebas dan independen berperan penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah dan institusi lainnya. Dari perspektif jurnalisme, sensasionalisme juga dapat merusak etika dan standar profesional. Jurnalis yang merasa tekanan untuk menghasilkan konten yang sensasional mungkin tergoda untuk mengabaikan prinsip-prinsip dasar seperti verifikasi fakta, keseimbangan, dan akurasi. Ini bisa mengarah pada penyebaran informasi yang tidak benar atau setengah benar, yang selanjutnya dapat menyesatkan publik dan merusak proses demokrasi. Dalam konteks Pilpres 2024, ini bisa berarti bahwa pemilih tidak mendapatkan gambaran yang sebenarnya tentang kandidat dan kebijakan, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil pemilu secara negatif.

Untuk mengatasi dampak negatif dari sensasionalisme, penting bagi media untuk menegakkan standar jurnalisme yang tinggi dan berkomitmen pada peliputan yang bertanggung jawab. Ini termasuk fokus pada isu-isu yang relevan dan mendalam, serta memberikan konteks yang cukup bagi pembaca untuk memahami implikasi dari berita yang disajikan. Media juga harus berusaha untuk menghindari pemberitaan yang hanya bertujuan untuk memicu emosi atau kontroversi tanpa memberikan nilai informatif yang sebenarnya. Peningkatan literasi media di kalangan masyarakat juga merupakan langkah penting dalam mengatasi sensasionalisme. Pembaca dan penonton yang lebih terdidik tentang bagaimana berita diproduksi dan disajikan akan lebih mampu mengenali taktik sensasional dan mencari informasi dari sumber yang lebih dapat dipercaya. Pendidikan literasi

media dapat membantu masyarakat memahami pentingnya jurnalisme yang berkualitas dan mendukung media yang berkomitmen pada integritas dan objektivitas.

c. Pengaruh Terhadap Persepsi Publik

Ketergantungan pada *clickbait* dan sensasionalisme dalam peliputan berita politik memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi publik, terutama selama periode pemilu. Dalam konteks Pilpres 2024, fenomena ini bisa mempengaruhi cara masyarakat melihat kandidat, partai politik, dan proses pemilu itu sendiri. *Clickbait*, yang menggunakan judul atau konten yang menyesatkan untuk menarik klik, dan sensasionalisme, yang menekankan aspek dramatis dan menghebohkan dari sebuah berita, keduanya berkontribusi pada distorsi informasi yang diterima oleh publik. Tapsell (2015) membahas bahwa jenis konten ini cenderung menarik lebih banyak perhatian dibandingkan berita yang objektif dan mendalam, sehingga mengaburkan isu-isu penting dan menyesatkan pemilih. Ketika media menggunakan *clickbait*, sering kali mengorbankan akurasi dan kedalaman demi mendapatkan klik dan perhatian. Hal ini mengakibatkan konten yang dangkal dan tidak informatif, yang pada akhirnya dapat membentuk persepsi publik yang salah tentang kandidat atau isu politik tertentu. Misalnya, sebuah artikel dengan judul yang sensasional mungkin menarik pembaca untuk mengklik, tetapi jika isinya tidak memberikan informasi yang akurat atau berimbang, pembaca bisa mendapatkan kesan yang salah. Akibatnya, mungkin membuat keputusan pemilu berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan.

Sensasionalisme dalam pemberitaan politik dapat memperkuat stereotip dan prasangka yang sudah ada. Ketika media membahas skandal, pertikaian, atau pernyataan kontroversial, sering kali memberikan lebih banyak perhatian pada elemen-elemen ini daripada pada diskusi yang substansial tentang kebijakan dan visi kandidat. Ini bisa membuat publik lebih fokus pada drama politik daripada pada isu-isu penting yang seharusnya menjadi dasar dari proses pemilu. Tapsell (2015) menunjukkan bahwa hal ini dapat menyesatkan pemilih dan mengaburkan prioritas yang sebenarnya dalam pemilu.

Pengaruh *clickbait* dan sensasionalisme juga terlihat dalam bagaimana media menggambarkan kandidat. Kandidat yang menjadi sasaran pemberitaan sensasional mungkin dipersepsikan secara negatif, tidak peduli seberapa valid atau relevan isu yang diangkat. Misalnya, sebuah laporan tentang kehidupan pribadi seorang kandidat yang digelembungkan secara berlebihan untuk menarik perhatian bisa merusak reputasi kandidat tersebut, meskipun tidak ada relevansi langsung dengan kapabilitas atau platform politik. Ini dapat menyebabkan pemilih menilai kandidat berdasarkan informasi yang tidak relevan atau berlebihan.

Kandidat yang sering muncul dalam berita sensasional, meskipun dalam konteks negatif, masih bisa mendapatkan keuntungan dari peningkatan visibilitas. Prinsip "*there's no such thing as bad publicity*" kadang berlaku di sini, di mana sering muncul dalam berita, meskipun kontroversial, bisa membuat kandidat lebih dikenal oleh publik. Namun, ini tidak selalu mengarah pada persepsi yang positif dan bisa meningkatkan polarisasi di kalangan pemilih. Pendukung setia mungkin menjadi lebih termotivasi untuk mendukung kandidat, sementara lawan politik bisa menjadi semakin terpolarisasi. Selain mempengaruhi persepsi terhadap kandidat, ketergantungan pada *clickbait* dan sensasionalisme juga merusak kepercayaan publik terhadap media. Ketika pembaca atau penonton merasa bahwa media lebih tertarik pada mendapatkan klik dan perhatian daripada memberikan informasi yang akurat dan berguna, mungkin mulai meragukan kredibilitas dan integritas media tersebut. Kepercayaan yang menurun terhadap media dapat berdampak buruk pada proses demokrasi, karena media berperan penting dalam menyediakan informasi yang diperlukan bagi pemilih untuk membuat keputusan yang berpengetahuan.

Ketergantungan pada *clickbait* dan sensasionalisme dapat mengurangi kualitas debat publik. Alih-alih mendiskusikan isu-isu yang kompleks dan penting dengan cara yang mendalam dan bernuansa, publik mungkin terjebak dalam diskusi yang dangkal dan penuh dengan kontroversi yang dibuat-buat. Ini bisa menghalangi kemampuan masyarakat untuk memahami isu-isu

yang sebenarnya dan membentuk opini yang berdasarkan pada fakta dan analisis yang cermat. Untuk mengatasi dampak negatif ini, media perlu kembali fokus pada prinsip-prinsip jurnalisme yang bertanggung jawab. Ini termasuk memastikan bahwa konten yang diproduksi didasarkan pada fakta, disajikan dengan cara yang berimbang, dan tidak semata-mata dirancang untuk menarik klik. Media juga perlu berinvestasi dalam pendidikan literasi media bagi masyarakat, membantu pembaca dan penonton untuk mengembangkan keterampilan kritis dalam menilai informasi dan mengenali *clickbait* serta sensasionalisme.

d. Tekanan Ekonomi dan Media Digital

Tekanan ekonomi yang dihadapi oleh industri media digital merupakan salah satu pendorong utama di balik maraknya penggunaan *clickbait* dan sensasionalisme. Dalam era di mana pendapatan iklan menjadi salah satu sumber pendanaan utama bagi banyak *outlet* berita, jumlah klik dan tingkat keterlibatan pengguna sering kali menjadi metrik utama kesuksesan. Napoli (2019) membahas bahwa model bisnis berbasis iklan di era digital mendorong media untuk memproduksi konten yang dapat menarik perhatian secara cepat. Ini sering kali mengakibatkan pengabaian terhadap standar jurnalistik dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi. Salah satu aspek utama dari tekanan ekonomi ini adalah perubahan drastis dalam cara media menghasilkan pendapatan. Di masa lalu, banyak media mengandalkan langganan dan penjualan fisik sebagai sumber pendapatan utama. Namun, dengan migrasi pembaca ke platform digital, model bisnis ini mengalami tekanan yang signifikan. Iklan digital, yang pada awalnya dianggap sebagai solusi, ternyata membawa tantangan baru. Pendapatan dari iklan digital sering kali bergantung pada jumlah klik dan tayangan halaman, sehingga mendorong media untuk memproduksi konten yang dapat memaksimalkan metrik tersebut.

Banyak *outlet* berita merasa terdorong untuk memanfaatkan taktik *clickbait*. Judul yang sensasional dan menyesatkan menjadi alat untuk menarik klik, meskipun sering kali konten yang disajikan tidak sesuai dengan janji yang dibuat dalam judul. Meskipun taktik ini mungkin berhasil meningkatkan lalu lintas

situs dalam jangka pendek, efek jangka panjangnya bisa merugikan. Pembaca yang merasa tertipu oleh judul yang menyesatkan kemungkinan akan kehilangan kepercayaan terhadap media tersebut, yang pada akhirnya dapat mengurangi basis pembaca setia. Selain itu, sensasionalisme juga menjadi strategi yang umum digunakan untuk menarik perhatian di tengah persaingan yang ketat. Berita yang dramatis atau kontroversial cenderung menarik lebih banyak perhatian dibandingkan laporan yang mendalam dan analitis. Hal ini menciptakan lingkungan di mana berita yang sebenarnya penting dan relevan sering kali terabaikan atau disajikan dengan cara yang berlebihan. Misalnya, liputan tentang skandal atau konflik sering kali mendapat lebih banyak sorotan daripada diskusi mendalam tentang kebijakan publik atau masalah sosial yang kompleks.

Dilema yang dihadapi oleh jurnalis dalam situasi ini cukup signifikan. Di satu sisi, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat, berimbang, dan mendalam kepada publik. Di sisi lain, tekanan untuk memastikan kelangsungan ekonomi media membuatnya harus memproduksi konten yang dapat menarik perhatian dalam waktu singkat. Ketidakseimbangan ini sering kali mengarah pada kompromi terhadap integritas jurnalistik. Jurnalis mungkin merasa terpaksa untuk memprioritaskan konten yang dapat menarik klik daripada konten yang benar-benar informatif dan bermanfaat. Tekanan ekonomi ini juga berpengaruh pada kualitas pekerjaan jurnalistik itu sendiri. Dalam upaya untuk memproduksi konten dengan cepat dan dalam jumlah banyak, jurnalis sering kali tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penelitian mendalam atau verifikasi fakta yang memadai. Ini dapat mengakibatkan peningkatan jumlah kesalahan dan informasi yang tidak akurat dalam laporan berita. Selain itu, pemotongan anggaran yang dilakukan oleh banyak media untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit sering kali berarti bahwa ada lebih sedikit sumber daya yang tersedia untuk mendukung jurnalisisme investigatif dan analisis yang mendalam.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa *outlet* media mulai mencari model bisnis alternatif yang lebih berkelanjutan. Salah

satu solusi yang muncul adalah model langganan berbayar, di mana pembaca membayar biaya berlangganan untuk mengakses konten premium. Model ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pendapatan iklan dan memungkinkan media untuk fokus pada kualitas konten daripada kuantitas klik. Namun, transisi ke model ini tidak mudah dan memerlukan perubahan signifikan dalam cara media beroperasi dan berinteraksi dengan pembacanya. Selain itu, ada juga upaya untuk meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat. Dengan membekali pembaca dengan keterampilan kritis untuk mengevaluasi informasi, diharapkan akan menjadi lebih selektif dalam mengonsumsi konten dan lebih cenderung mendukung media yang menjunjung tinggi standar jurnalistik. Program literasi media dapat mencakup pendidikan di sekolah-sekolah, kampanye publik, dan inisiatif komunitas untuk membantu masyarakat memahami pentingnya jurnalisme yang berkualitas.

e. Upaya untuk Mengurangi Ketergantungan

Untuk mengurangi ketergantungan pada *clickbait* dan sensasionalisme, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa langkah penting dapat diambil oleh media, pembaca, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan ini. McNair (2018) menekankan pentingnya adopsi model bisnis yang lebih berkelanjutan oleh media. Ini termasuk penerapan model langganan berbayar atau pendanaan publik yang tidak bergantung pada jumlah klik. Dengan demikian, media dapat lebih fokus pada kualitas konten daripada kuantitas klik. Model langganan berbayar menjadi salah satu solusi yang banyak diadopsi oleh media internasional dan nasional. Langganan berbayar memberikan sumber pendapatan yang stabil dan memungkinkan media untuk tidak terlalu bergantung pada pendapatan iklan. Hal ini memberi ruang bagi media untuk memproduksi konten yang lebih mendalam dan berkualitas tinggi tanpa harus memikirkan cara untuk menarik klik secara cepat. Contoh sukses dari penerapan model ini dapat dilihat pada media seperti The New York Times dan The Washington Post, yang telah berhasil meningkatkan jumlah

pelanggan membayar secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pendanaan publik juga menjadi opsi yang patut dipertimbangkan. Di beberapa negara, media publik yang didanai oleh pemerintah atau sumbangan masyarakat dapat memproduksi konten berkualitas tinggi tanpa tekanan komersial yang signifikan. Model ini memungkinkan jurnalis untuk fokus pada peliputan isu-isu yang benar-benar penting dan relevan bagi masyarakat. Di Indonesia, meskipun belum banyak media yang mengadopsi model ini, ada potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut dengan dukungan kebijakan yang tepat. Peningkatan literasi media di kalangan masyarakat juga merupakan langkah krusial. Literasi media membantu pembaca mengembangkan kemampuan kritis dalam menilai informasi dan mengenali konten yang sensasional dan tidak akurat. Martens dan Hobbs (2015) menekankan pentingnya pendidikan media yang baik dalam membekali masyarakat dengan alat untuk mengenali bias, sensasionalisme, dan berita palsu. Program literasi media dapat diterapkan di sekolah-sekolah dan melalui kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang jurnalisme yang berkualitas.

Program literasi media bisa mencakup berbagai aspek, mulai dari pengenalan dasar tentang cara kerja media, hingga keterampilan praktis dalam mengevaluasi sumber informasi. Misalnya, siswa dapat diajarkan untuk membedakan antara sumber yang dapat dipercaya dan yang tidak, memahami bagaimana bias dapat mempengaruhi peliputan berita, dan mengenali tanda-tanda *clickbait* dan sensasionalisme. Program semacam ini tidak hanya membantu generasi muda menjadi konsumen media yang lebih cerdas, tetapi juga dapat mengurangi penyebaran informasi menyesatkan dalam jangka panjang. Kolaborasi antara media dan platform teknologi juga berperan penting dalam mengurangi penyebaran *clickbait* dan sensasionalisme. Platform media sosial, yang sering kali menjadi saluran utama penyebaran konten tersebut, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa algoritma tidak mendorong konten yang menyesatkan. Kerjasama dengan organisasi

pemeriksa fakta dan penerapan algoritma yang lebih cerdas untuk mengurangi penyebaran informasi palsu adalah langkah penting yang bisa diambil. Misalnya, Facebook telah mulai bekerja sama dengan berbagai organisasi pemeriksa fakta untuk menandai dan mengurangi penyebaran berita palsu di platform.

Regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang efektif juga diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam peliputan berita. Ini bisa mencakup regulasi yang mengharuskan media untuk mematuhi standar etika tertentu dan menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi publik yang merasa dirugikan oleh laporan yang tidak akurat atau menyesatkan. Penegakan regulasi ini harus dilakukan secara adil dan transparan untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat menghambat kebebasan pers. Di sisi lain, media juga perlu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas jurnalisme. Ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan berkelanjutan bagi jurnalis tentang pentingnya verifikasi fakta, etika jurnalistik, dan peliputan yang mendalam. Selain itu, media juga harus berusaha untuk membangun kepercayaan dengan pembaca melalui transparansi dalam proses peliputan dan penyajian informasi. Misalnya, media bisa menyediakan penjelasan tentang metode peliputan, sumber informasi yang digunakan, dan cara verifikasi yang dilakukan.

f. Pendidikan dan Literasi Media

Meningkatkan literasi media menjadi kunci utama dalam membekali masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai informasi yang diterima. Pendidikan literasi media yang baik sangat diperlukan untuk membekali masyarakat dengan alat yang dapat membantu mengenali bias, sensasionalisme, dan berita palsu. Menurut Martens dan Hobbs (2015), literasi media tidak hanya penting untuk individu sebagai konsumen informasi, tetapi juga penting bagi kesehatan demokrasi secara keseluruhan. Literasi media perlu diterapkan dalam sistem pendidikan formal. Sekolah-sekolah dapat mengintegrasikan literasi media ke dalam kurikulum. Mata pelajaran ini dapat mengajarkan siswa bagaimana mengenali sumber informasi yang dapat dipercaya,

memahami cara kerja media, serta mengidentifikasi bias dan propaganda. Sebagai contoh, siswa dapat diajarkan untuk memeriksa kredibilitas sumber informasi, mencari tanda-tanda bias, dan memahami teknik-teknik yang digunakan oleh media untuk menarik perhatian.

Penting juga untuk mengajarkan siswa tentang etika jurnalistik dan pentingnya verifikasi fakta, harus memahami bahwa tidak semua informasi yang tersedia secara *online* adalah benar dan bahwa verifikasi informasi adalah langkah penting sebelum menyebarkannya. Siswa juga harus diajarkan tentang dampak dari menyebarkan informasi palsu dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi opini publik dan keputusan politik. Di luar lingkungan sekolah, program literasi media juga dapat dilakukan melalui kampanye publik. Kampanye ini dapat dilakukan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan media itu sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi media dan memberikan alat yang dibutuhkan untuk menilai informasi secara kritis. Kampanye ini bisa berbentuk iklan layanan masyarakat, *workshop*, seminar, dan penyebaran materi edukasi melalui media sosial dan platform digital lainnya.

Salah satu contoh sukses kampanye literasi media adalah proyek "*News Literacy Project*" di Amerika Serikat. Proyek ini menyediakan sumber daya pendidikan bagi guru dan siswa untuk membantu mengembangkan keterampilan kritis dalam menilai berita dan informasi. Program ini juga bekerja sama dengan jurnalis untuk memberikan wawasan langsung tentang proses jurnalistik dan pentingnya etika dalam peliputan berita. Di Indonesia, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat berkolaborasi untuk mengembangkan program serupa. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), misalnya, telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat. Dengan dukungan yang lebih luas dan sumber daya yang memadai, inisiatif ini dapat diperluas untuk mencakup lebih banyak komunitas dan demografi.

Literasi media juga dapat ditingkatkan melalui penyediaan alat bantu digital yang memudahkan masyarakat untuk

memeriksa kebenaran informasi. Platform pengecekan fakta yang mudah diakses dan digunakan oleh publik dapat membantu dalam proses verifikasi informasi. Misalnya, aplikasi *mobile* yang dirancang untuk memeriksa kebenaran berita atau situs web yang menyediakan layanan pengecekan fakta secara cepat dan akurat. Peran media juga sangat penting dalam meningkatkan literasi media. Media yang bertanggung jawab harus berkomitmen untuk menyediakan konten yang berkualitas tinggi dan mendidik publik tentang cara kerja jurnalistik yang baik, juga dapat menyertakan segmen atau program khusus yang membahas tentang literasi media dan mengajarkan pemirsa tentang cara menilai informasi secara kritis. Media yang transparan tentang proses peliputan dan yang secara aktif berpartisipasi dalam pendidikan literasi media akan membantu membangun kepercayaan dengan audiens.

## **C. Inisiatif Media dalam Menangkal Polarisasi**

### **1. Program Literasi Media**

Program literasi media menjadi salah satu inisiatif penting yang dilakukan oleh media dan berbagai organisasi untuk meningkatkan pemahaman publik tentang bagaimana mengonsumsi dan menilai informasi dengan kritis. Literasi media berfungsi untuk memberdayakan masyarakat agar lebih sadar dan mampu membedakan antara berita yang akurat dan *hoaks*, serta mengurangi dampak polarisasi yang sering diakibatkan oleh penyebaran informasi palsu.

#### **a. Pentingnya Literasi Media**

Pentingnya literasi media tidak bisa diragukan lagi dalam era informasi yang modern. Dalam konteks ini, literasi media mengacu pada kemampuan individu untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan bijaksana dari berbagai sumber media. Sebagaimana disampaikan oleh Hobbs (2010), literasi media bukan hanya tentang memahami cara kerja media, tetapi juga tentang mengembangkan keterampilan analisis kritis yang memungkinkan individu untuk menyaring dan menilai informasi yang diterima. Dengan demikian, literasi media memberdayakan masyarakat untuk

menjadi konsumen informasi yang lebih cerdas dan kritis. Implementasi program-program literasi media telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang media. Salah satu pendekatan yang efektif adalah menyertakan literasi media dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah. Rekomendasi dari UNESCO (2011) menekankan pentingnya menyelipkan literasi media dalam pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian, generasi muda akan dibekali dengan keterampilan kritis yang diperlukan dalam menghadapi informasi yang kompleks dan beragam.

Langkah-langkah konkret telah diambil untuk mengimplementasikan program literasi media di berbagai tingkatan pendidikan. Di sekolah-sekolah, materi literasi media telah diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk mengajarkan siswa tentang cara menilai kebenaran dan keandalan informasi, serta cara mengenali bias dalam berita. Program-program ini sering kali melibatkan pelatihan bagi guru agar dapat mengajar materi literasi media dengan efektif. Selain itu, organisasi-organisasi non-pemerintah dan lembaga pendidikan juga turut berperan dalam mempromosikan literasi media. Sering mengadakan *workshop*, seminar, dan pelatihan untuk masyarakat umum agar dapat memahami peran media dalam masyarakat dan mengembangkan keterampilan untuk mengonsumsi informasi dengan bijaksana. Kolaborasi antara media, pemerintah, dan lembaga pendidikan merupakan kunci keberhasilan dalam memperluas cakupan program literasi media dan mencapai audiens yang lebih luas.

Kampanye publik juga berperan penting dalam meningkatkan literasi media di masyarakat umum. Penggunaan berbagai platform media, seperti televisi, radio, dan media sosial, digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif tentang pentingnya literasi media dan bagaimana cara mengembangkan keterampilan tersebut. Metode ini memungkinkan pesan-pesan tersebut mencapai audiens yang beragam dan menjangkau lebih banyak orang. Teknologi juga menjadi alat yang efektif dalam upaya meningkatkan literasi media. Penggunaan video, infografis, dan konten interaktif lainnya dapat membuat materi

literasi media menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Melalui platform digital, informasi tentang literasi media dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sehingga dapat belajar kapan pun dan di mana pun.

b. Peran Media dan Organisasi Non-Pemerintah

Peran media dan organisasi non-pemerintah dalam mempromosikan literasi media sangatlah penting dalam konteks meningkatkan pemahaman masyarakat tentang media dan informasi. Media arus utama, seperti Kompas dan The Jakarta Post, memiliki kapasitas yang besar untuk mencapai audiens yang luas, telah meluncurkan berbagai inisiatif literasi media, seperti *workshop* dan seminar, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya literasi media. Melalui kegiatan ini, media membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana media bekerja dan mengajarkan keterampilan untuk menilai informasi secara kritis. Dengan demikian, tidak hanya menjadi konsumen pasif informasi, tetapi juga menjadi konsumen yang lebih sadar dan kritis terhadap berbagai konten media. Selain media, organisasi non-pemerintah juga berperan penting dalam mempromosikan literasi media di masyarakat. Organisasi-organisasi ini sering kali memiliki fokus khusus dalam mendidik masyarakat tentang media dan informasi. Mengadakan berbagai kegiatan, seperti seminar, pelatihan, dan kampanye, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara menggunakan media dengan bijaksana. Selain itu, organisasi-organisasi ini juga dapat menyediakan sumber daya dan dukungan bagi individu atau kelompok yang ingin meningkatkan literasi media.

Kolaborasi antara media, pemerintah, dan lembaga pendidikan juga merupakan langkah penting dalam memperkuat upaya literasi media. Dengan bekerja sama, dapat menciptakan program-program yang lebih efektif dan menjangkau audiens yang lebih luas. Media dapat membantu menyebarkan informasi tentang literasi media, sementara pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan dan sumber daya yang diperlukan. Di sisi lain, lembaga pendidikan dapat menyelaraskan kurikulum untuk

memasukkan pendidikan literasi media sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Dengan cara ini, literasi media tidak hanya akan menjadi bagian dari pembelajaran formal di sekolah, tetapi juga akan ditanamkan sebagai nilai dan keterampilan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Inisiatif kolaboratif ini juga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya dan pelatihan literasi media yang berkualitas. Dengan adanya kerja sama antara berbagai pihak, masyarakat dapat lebih mudah mengakses program-program literasi media yang diselenggarakan oleh media, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Ini akan membantu memastikan bahwa literasi media tidak hanya menjadi hak istimewa dari segelintir orang yang mampu, tetapi juga tersedia bagi semua lapisan masyarakat. Sebagai hasilnya, masyarakat akan lebih mampu memahami peran media dalam masyarakat dan mengonsumsi informasi dengan bijaksana.

c. Kampanye Publik dan Penggunaan Teknologi

Kampanye publik dan penggunaan teknologi merupakan dua aspek yang saling terkait dalam upaya meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat. Kampanye publik, yang dilakukan melalui berbagai platform media dan teknologi, telah terbukti menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan kesadaran tentang literasi media dan memperkuat keterampilan kritis masyarakat dalam mengevaluasi informasi. Pendekatan yang kreatif dan inovatif dalam penggunaan teknologi digital, seperti video, infografis, dan artikel edukatif, memungkinkan kampanye literasi media untuk mencapai audiens yang lebih luas dan beragam. Melalui kampanye publik, masyarakat diberi kesempatan untuk belajar tentang konsep literasi media dan pentingnya mengembangkan keterampilan analisis kritis dalam menilai informasi. Penggunaan teknologi digital memperkaya pengalaman belajar dengan menyediakan konten yang menarik dan mudah diakses. Video pendek, misalnya, dapat menyajikan informasi dengan cara yang lebih visual dan menarik, sementara infografis dapat merangkum konsep-konsep kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami.

Kampanye publik yang menggunakan teknologi digital juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan interaktif. Masyarakat dapat terlibat dalam diskusi *online*, berbagi pengalaman, dan bertukar informasi dengan sesama pengguna media sosial. Ini tidak hanya memfasilitasi pertukaran pengetahuan, tetapi juga mendorong kolaborasi antarindividu dalam membangun keterampilan literasi media yang kuat. Selain itu, penggunaan teknologi digital memungkinkan kampanye literasi media untuk menjangkau kelompok-kelompok yang mungkin sulit diakses secara tradisional, seperti yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. Melalui akses internet dan perangkat teknologi, informasi dan sumber daya pendidikan dapat diakses secara mandiri, tanpa terbatas oleh batasan geografis atau waktu. Hal ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi individu untuk meningkatkan keterampilan literasi media sesuai dengan kebutuhan dan minat sendiri.

## **2. Kampanye Anti-*Hoaks* dan Verifikasi Fakta**

Kampanye anti-*hoaks* dan verifikasi fakta adalah langkah-langkah penting yang diambil oleh media untuk melawan penyebaran informasi palsu dan menurunkan tingkat polarisasi. Inisiatif ini tidak hanya membantu menjaga integritas informasi yang diterima publik, tetapi juga berperan dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.

### **a. Kampanye Anti-*Hoaks* oleh Media**

Kampanye anti-*hoaks* yang diluncurkan oleh media di Indonesia merupakan respons proaktif terhadap meningkatnya penyebaran informasi palsu atau *hoaks* yang dapat merugikan masyarakat. Dalam upaya ini, media telah mengadopsi berbagai strategi untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya *hoaks* dan memberikan keterampilan untuk mengidentifikasi serta menanggulangi informasi yang tidak benar. Kalsnes (2018) membahas pentingnya kampanye semacam ini dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi dampak negatif dari penyebaran *hoaks*. Salah satu strategi yang sering digunakan dalam kampanye anti-*hoaks* adalah penyebaran pesan edukatif melalui berbagai platform media. Media arus utama

seperti televisi, radio, dan surat kabar seringkali menyediakan ruang untuk konten-konten yang membahas tentang cara mengenali *hoaks*, risikonya, dan pentingnya verifikasi informasi sebelum membagikannya. Melalui pesan-pesan ini, media berusaha membangun kesadaran masyarakat akan peran dalam menghentikan penyebaran *hoaks*.

Media juga sering kali menyelenggarakan acara-acara khusus, seperti seminar atau *workshop*, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena *hoaks* kepada masyarakat luas. Dalam acara ini, narasumber dari berbagai bidang, termasuk jurnalis, akademisi, dan praktisi media, berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi *hoaks*. Ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya, berdiskusi, dan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk melawan *hoaks*. Selain itu, pelatihan khusus juga diberikan kepada para jurnalis dan profesional media tentang bagaimana cara mengidentifikasi, memverifikasi, dan menanggulangi *hoaks*. Ini penting karena media memiliki peran yang sangat vital dalam menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Dengan meningkatkan kapabilitas jurnalis dalam mengelola informasi, diharapkan media dapat menjadi garda terdepan dalam memerangi *hoaks*.

Kampanye anti-*hoaks* juga sering kali melibatkan kolaborasi antara media dan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran sumber daya, pengalaman, dan pengetahuan untuk menciptakan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi *hoaks*. Menurut Gruszczynski (2019), kerja sama lintas sektoral ini diperlukan untuk mencapai dampak yang signifikan dalam memerangi *hoaks*. Pentingnya kampanye anti-*hoaks* juga tercermin dalam upaya media untuk memberikan penekanan khusus pada pendidikan literasi media di kalangan masyarakat. Program-program literasi media, baik yang diselenggarakan oleh media itu sendiri maupun lembaga lain, menjadi bagian penting dalam membekali masyarakat dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan informasi yang kompleks di era digital ini.

b. Peran Organisasi Pemeriksa Fakta

Organisasi pemeriksa fakta seperti Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) dan *Turn Back Hoax* berperan yang sangat penting dalam memerangi *hoaks* di Indonesia. Bertindak sebagai garda terdepan dalam memeriksa kebenaran klaim-klaim yang beredar di media sosial dan platform lainnya, dengan tujuan menyediakan informasi yang akurat kepada masyarakat (Graves, 2016). Salah satu fungsi utama organisasi pemeriksa fakta adalah melakukan penelusuran terhadap klaim atau informasi yang diragukan kebenarannya, menggunakan berbagai sumber dan metode untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut, seperti penelusuran internet, kontak langsung dengan sumber informasi, dan pemeriksaan terhadap data atau bukti yang tersedia.

Setelah melakukan verifikasi fakta, organisasi pemeriksa fakta kemudian mempublikasikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat. Informasi yang telah diverifikasi dinyatakan sebagai "benar", "salah", atau "diragukan". Melalui publikasi hasil verifikasi ini, organisasi tersebut membantu masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebenaran informasi yang diterima. Selain melakukan verifikasi fakta secara proaktif, organisasi pemeriksa fakta juga berperan sebagai agen pendidikan publik, menyediakan sumber daya pendidikan tentang cara mengidentifikasi *hoaks*, memahami teknik manipulasi informasi, dan memverifikasi kebenaran informasi sebelum dibagikan. Hal ini membantu meningkatkan literasi media masyarakat dan membangun kewaspadaan terhadap *hoaks*.

Organisasi pemeriksa fakta juga berperan dalam memberikan rekomendasi atau nasihat kepada media dan pemerintah terkait penanganan *hoaks*, dapat memberikan saran tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi penyebaran *hoaks*, baik melalui peningkatan kesadaran masyarakat maupun dengan perubahan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, organisasi-organisasi pemeriksa fakta juga sering kali melakukan kerja sama dengan media, platform media sosial, dan lembaga pemerintah dalam upaya memerangi *hoaks*.

Kolaborasi ini dapat berupa pertukaran informasi, penggunaan teknologi untuk mendeteksi *hoaks* secara cepat, atau pengembangan kampanye bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *hoaks*.

c. Kolaborasi dengan Platform Media Sosial

Kerja sama antara media dan platform media sosial telah menjadi salah satu strategi kunci dalam upaya memerangi penyebaran *hoaks*. Bradshaw dan Howard (2018) membahas bahwa platform-media-sosial besar seperti Facebook, Twitter, dan Google telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi *hoaks* dengan mengembangkan algoritma dan alat yang bertujuan untuk mendeteksi dan menghapus konten yang menyesatkan dari platform. Alat-alat ini menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami dan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola dan ciri-ciri yang sering terkait dengan konten yang tidak benar. Salah satu contoh konkret kolaborasi antara platform media sosial dan organisasi pemeriksa fakta adalah program verifikasi fakta pihak ketiga yang diperkenalkan oleh Facebook. Menurut Bradshaw dan Howard (2018), program ini mengundang organisasi pemeriksa fakta terkemuka untuk memeriksa kebenaran konten yang dibagikan di platform Facebook. Jika konten ditemukan tidak benar, maka Facebook akan menandai konten tersebut sebagai "konten yang dipertanyakan" dan memberikan informasi tentang hasil pengecekan fakta yang dilakukan oleh organisasi pemeriksa fakta.

Platform media sosial juga telah meningkatkan upaya dalam menyediakan alat untuk melaporkan konten yang mencurigakan. Pengguna dapat dengan mudah melaporkan konten yang dicurigai sebagai *hoaks* atau informasi yang menyesatkan kepada administrator platform tersebut. Tim moderator platform kemudian akan meninjau laporan tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, seperti menghapus konten atau membatasi distribusinya jika ditemukan melanggar kebijakan platform. Kerja sama antara media dan platform media sosial juga melibatkan pertukaran informasi dan sumber daya. Platform-media-sosial menyediakan data dan wawasan tentang

tren penyebaran *hoaks* kepada media dan organisasi pemeriksa fakta, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menanggulangi *hoaks* dengan lebih efektif. Sebaliknya, media dan organisasi pemeriksa fakta juga memberikan umpan balik kepada platform-media-sosial tentang kinerja algoritma dan alat deteksi *hoaks*, sehingga platform dapat terus meningkatkan kemampuannya dalam memerangi *hoaks*.

Media dan platform-media-sosial juga bekerja sama dalam menyelenggarakan kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya *hoaks*, mengadakan seminar, *workshop*, dan acara publik lainnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara mengidentifikasi dan menghindari *hoaks*. Kolaborasi semacam ini menciptakan sinergi antara sektor media dan teknologi dalam memerangi *hoaks* secara holistik. Namun, meskipun telah ada kerja sama yang signifikan antara media dan platform-media-sosial dalam memerangi *hoaks*, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah masalah kecepatan respons terhadap *hoaks* yang baru muncul. *Hoaks* dapat menyebar dengan sangat cepat di media sosial, dan seringkali dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi platform-media-sosial untuk merespons laporan dan mengambil tindakan yang diperlukan. Oleh karena itu, perlu terus ditingkatkan agar respons terhadap *hoaks* dapat lebih cepat dan efisien.

# 2024

## **BAB VI**

# **SINERGI ANTAR AGAMA, POLITIK, DAN MEDIA**

---

---

Sinergi antara agama, politik, dan media merupakan faktor kunci dalam menciptakan stabilitas sosial dan politik yang berkelanjutan di Indonesia. Dalam konteks demokrasi yang dinamis, kolaborasi yang harmonis antara ketiga elemen ini dapat mengurangi potensi konflik, meningkatkan partisipasi warga dalam proses politik, dan memastikan bahwa informasi yang diterima publik adalah akurat dan seimbang. Seiring dengan meningkatnya peran media dalam membentuk opini publik dan pengaruh tokoh agama dalam membimbing moral masyarakat, sinergi ini menjadi semakin krusial untuk menjaga kohesi sosial dan memperkuat demokrasi.

### **A. Kolaborasi untuk Menangkal Polarisasi**

#### **1. Dialog Antaragama dan Antarpantai**

Pada konteks politik yang semakin terpolarisasi seperti Pilpres 2024 di Indonesia, dialog antaragama dan antarpantai menjadi semakin krusial. Polarisasi politik seringkali diperparah oleh perbedaan agama dan ideologi yang digunakan oleh berbagai aktor politik untuk menggalang dukungan. Menurut Norris (2022), dialog antaragama dan antarpantai adalah pendekatan yang sangat efektif untuk menurunkan tensi dan mempromosikan toleransi dalam masyarakat yang beragam.

##### **a. Signifikansi Dialog Antaragama**

Dialog antaragama memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia yang kaya akan keragaman agama. Sejak awal sejarahnya, Indonesia telah menjadi rumah bagi berbagai kepercayaan dan keyakinan agama, mulai dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, hingga kepercayaan tradisional. Namun,

dengan keragaman ini juga datang tantangan, terutama dalam menjaga harmoni dan mencegah konflik antaragama. Eksploitasi politik yang memanfaatkan identitas agama seringkali menjadi pemicu potensial konflik, mengancam kedamaian yang telah lama dijaga di negara ini. Menurut Robinson (2020), eksploitasi politik terhadap identitas agama dapat memperdalam jurang perpecahan yang sudah ada dan menciptakan ketegangan yang berpotensi meledak menjadi konflik terbuka. Kita telah menyaksikan contohnya dalam sejarah Indonesia, di mana konflik antaragama seringkali dipicu oleh manipulasi politik yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaan atau mencapai tujuan tertentu. Misalnya, konflik antara kelompok agama Islam dan Kristen di Maluku pada tahun 1999-2002, yang disebabkan oleh berbagai faktor termasuk ketegangan politik dan persaingan ekonomi, menunjukkan betapa rentannya situasi tersebut terhadap pemecahan kekerasan.

Dialog antaragama memiliki potensi besar untuk menangkalkan ancaman konflik tersebut. Melalui dialog yang jujur, terbuka, dan berdasarkan saling penghargaan, pemahaman, toleransi, dan kerjasama lintas agama dapat ditingkatkan. Dialog semacam itu memungkinkan masyarakat untuk melampaui perbedaan-perbedaan dan menemukan titik-titik persamaan serta pengertian bersama. Ini merupakan langkah penting dalam membentuk sebuah masyarakat yang inklusif dan harmonis di Indonesia. Selain itu, dialog antaragama juga dapat menjadi wadah untuk membahas pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama masing-masing. Dengan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, anggota berbagai agama dapat memperluas pandangan tentang keberagaman spiritual yang ada di sekitar. Hal ini tidak hanya memperkaya pemahaman individual, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antara kelompok-kelompok agama.

Dialog antaragama tidak hanya terjadi di tingkat elit atau pemimpin agama, tetapi juga di tingkat masyarakat biasa. Pertemuan-pertemuan kecil antar tetangga atau komunitas agama yang berbeda dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun hubungan yang lebih baik dan mendorong toleransi

serta penghargaan terhadap keberagaman agama. Sebagai tambahan, dialog antaragama juga dapat menjadi alat untuk memecahkan konflik yang sudah ada atau meredakan ketegangan yang sedang terjadi. Dengan duduk bersama dan berbicara secara terbuka tentang masalah-masalah yang mungkin timbul, pihak-pihak yang terlibat dapat mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dan menghindari eskalasi konflik yang lebih lanjut.

b. Implementasi Dialog Antaragama di Indonesia

Implementasi dialog antaragama di Indonesia telah menunjukkan hasil yang signifikan melalui upaya berbagai organisasi seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB telah menjadi pionir dalam menjalankan dialog antaragama secara teratur di berbagai daerah, berperan kunci dalam mencegah potensi konflik berbasis agama dan mempromosikan kerja sama lintas agama. Dengan berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan pertemuan rutin antara pemimpin agama, FKUB berhasil menciptakan platform yang memungkinkan berbagai pihak untuk berdialog, membahas isu-isu yang relevan, dan mencari solusi bersama. Sebuah contoh sukses dari implementasi dialog antaragama dapat ditemukan di kota Ambon, yang pernah dilanda oleh konflik agama yang parah. Melalui upaya rekonsiliasi yang melibatkan dialog antaragama, Ambon telah mengalami transformasi yang signifikan menuju perdamaian dan harmoni. Berbagai inisiatif dialog yang melibatkan berbagai komunitas agama telah berhasil menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, mengatasi luka-luka masa lalu, dan membangun masa depan yang lebih cerah bersama.

Salah satu aspek penting dari implementasi dialog antaragama di Indonesia adalah inklusivitasnya. Dialog antaragama tidak hanya melibatkan pemimpin agama atau elit masyarakat, tetapi juga masyarakat biasa dari berbagai lapisan sosial dan agama. Dengan demikian, dialog antaragama tidak hanya menjadi wadah untuk menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga menjadi alat untuk membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antarindividu dan komunitas. Selain itu, penting untuk diakui bahwa implementasi dialog antaragama

tidak selalu berjalan mulus. Tantangan seperti kurangnya sumber daya, ketidaksetujuan antarpihak, dan kekurangan dukungan dari pemerintah lokal dapat menghambat proses dialog. Namun, melalui kesabaran, komitmen, dan kerja sama antara berbagai pihak, banyak dari tantangan tersebut dapat diatasi.

Peran pemerintah juga sangat penting dalam mendukung dan memfasilitasi implementasi dialog antaragama. Pemerintah perlu memberikan dukungan finansial, kelembagaan, dan kebijakan yang memungkinkan berbagai organisasi dan komunitas untuk menjalankan dialog antaragama dengan efektif. Selain itu, pemerintah juga harus berperan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan perdamaian di seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, upaya untuk meningkatkan efektivitas dialog antaragama juga memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan sektor swasta.

c. Peran Dialog Antarpantai

Dialog antarpantai berperan yang krusial dalam konteks politik multipartai di Indonesia. Seringkali, politik multipartai cenderung memicu polarisasi yang meningkat, mengakibatkan fragmentasi politik yang merugikan stabilitas negara. Namun, melalui dialog antarpantai, potensi konflik politik dapat diredakan, dan kerja sama lintas partai dapat dipromosikan. Pemahaman tentang peran dan pentingnya dialog antarpantai semakin meningkat, terutama mengingat kondisi politik yang sering kali penuh gejolak di Indonesia. Dialog antarpantai tidak sekadar melibatkan negosiasi politik yang sempit, tetapi juga mencakup upaya membangun kepercayaan dan pemahaman bersama. Ini memerlukan keterbukaan dan keterlibatan yang tinggi dari semua pihak yang terlibat, terlepas dari perbedaan ideologi atau kepentingan politik. Melalui dialog yang konstruktif, partai-partai politik dapat menemukan titik-titik kesamaan, memahami perspektif yang berbeda, dan mencari solusi bersama untuk masalah-masalah politik yang kompleks.

Pentingnya dialog antarpantai tidak hanya terletak pada upaya untuk menghindari konflik politik yang merugikan, tetapi

juga dalam memperkuat stabilitas politik secara keseluruhan. Stabilitas politik merupakan fondasi yang penting bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menjaga dialog yang terbuka dan konstruktif antara partai-partai politik, potensi konflik politik yang dapat mengganggu stabilitas dapat diatasi dengan lebih efektif. Selain itu, dialog antarpantai juga merupakan sarana untuk mengembangkan budaya politik yang inklusif dan demokratis. Dalam sebuah sistem politik multipartai, pluralisme politik menjadi keniscayaan. Melalui dialog antarpantai, partai-partai politik dapat memperluas lingkup representasi politik, memperkuat partisipasi publik, dan memastikan bahwa kepentingan seluruh segmen masyarakat tercermin dalam proses pengambilan keputusan politik.

Pentingnya dialog antarpantai juga terkait erat dengan upaya untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif. Dalam konteks ini, dialog antarpantai memungkinkan partai politik untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan-tantangan politik yang kompleks, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, dialog antarpantai juga dapat menjadi instrumen untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik. Dengan berdiskusi dan berkolaborasi, partai-partai politik dapat saling memengaruhi dan menyusun kebijakan-kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Ini membantu memastikan bahwa kepentingan publik diprioritaskan di atas kepentingan politik sempit.

d. Implementasi Dialog Antarpantai di Indonesia

Implementasi dialog antarpantai di Indonesia telah melibatkan berbagai inisiatif dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan partai politik itu sendiri. Salah satu contoh inisiatif yang signifikan adalah forum-forum diskusi antarpantai yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang pemilihan umum. Forum-forum ini bertujuan untuk memfasilitasi dialog antara partai politik dalam rangka menciptakan pemahaman bersama tentang aturan main pemilu dan merencanakan strategi kampanye yang damai dan adil.

Dengan adanya forum ini, KPU berperan sebagai mediator yang membantu mengurangi potensi konflik antara partai politik dan memastikan jalannya proses pemilu yang transparan dan demokratis. Selain inisiatif dari lembaga pemerintah, partai politik juga memiliki peran penting dalam mendorong dialog antarpartai. Contohnya adalah inisiatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dua partai besar dengan basis ideologi yang berbeda. Meskipun memiliki perbedaan pandangan politik, kedua partai tersebut telah beberapa kali mengadakan pertemuan untuk membahas isu-isu nasional yang penting. Pertemuan semacam ini membuktikan bahwa partai politik mampu melampaui perbedaan ideologi untuk menciptakan kesepakatan yang lebih luas demi kepentingan bangsa dan negara.

Implementasi dialog antarpartai juga dapat diperluas melalui berbagai platform dan mekanisme, baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun inisiatif dari masyarakat sipil. Misalnya, debat publik antara perwakilan partai politik di media massa atau diskusi terbuka di tingkat lokal dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperluas ruang dialog antarpartai. Dengan melibatkan publik secara luas, dialog antarpartai menjadi lebih inklusif dan mencerminkan aspirasi masyarakat yang beragam. Selanjutnya, penting juga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya dialog antarpartai. Hal ini melibatkan upaya untuk membangun kepercayaan antara partai politik, baik melalui komunikasi terbuka maupun langkah-langkah konkret untuk memperkuat integritas politik. Pemerintah, sebagai regulator politik, memiliki peran kunci dalam menciptakan kerangka kerja yang mendukung bagi terjadinya dialog antarpartai yang konstruktif dan berkelanjutan.

Pendekatan partisipatif juga penting dalam implementasi dialog antarpartai. Partai politik harus melibatkan anggota partai dan masyarakat secara lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan merumuskan agenda politik. Dengan demikian, dialog antarpartai tidak hanya melibatkan elit politik, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara lebih luas. Implementasi dialog antarpartai tidak selalu

berjalan mulus. Tantangan seperti ego partai, kepentingan politik yang sempit, dan ketidaksepakatan antara partai politik dapat menghambat terjadinya dialog yang produktif. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat untuk terus menjaga dan memperkuat ruang dialog antarpantai.

e. Kampanye Bersama Media untuk Menyebarkan Pesan Damai

Di era digital saat ini, peran media dalam membentuk opini publik dan memengaruhi dinamika politik semakin penting dari sebelumnya. Media tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga platform yang memfasilitasi diskusi dan pertukaran ide di antara masyarakat. Namun, di tengah polarisasi politik yang semakin memanas, media juga dapat menjadi alat untuk memperdalam perpecahan dan meningkatkan ketegangan sosial. Oleh karena itu, kampanye bersama media untuk menyebarkan pesan damai telah diidentifikasi sebagai strategi yang efektif untuk menangkal polarisasi dan mempromosikan harmoni sosial. Menurut Jenkins (2020), kampanye bersama media untuk menyebarkan pesan damai dapat menjadi sarana yang kuat untuk mengubah opini publik dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Dengan menggandeng media sebagai mitra strategis, pesan-pesan yang mengedepankan perdamaian, toleransi, dan kerjasama dapat disebarkan secara lebih luas dan efektif kepada masyarakat. Ini merupakan langkah penting dalam merespons tantangan polarisasi politik dan konflik sosial yang seringkali mewarnai kehidupan politik dan sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Salah satu kekuatan utama dari kampanye bersama media adalah kemampuannya untuk menjangkau audiens yang luas dan beragam. Melalui berbagai platform media, seperti televisi, radio, cetak, dan media sosial, pesan-pesan damai dapat disampaikan kepada berbagai segmen masyarakat, termasuk yang berada di pedesaan atau daerah terpencil. Dengan demikian, kampanye ini memiliki potensi untuk menciptakan efek yang signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat terhadap isu-isu sosial dan politik. Kerja sama antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, media massa, dan tokoh masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan kampanye bersama media untuk

menyebarkan pesan damai. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan ini memungkinkan penggabungan sumber daya dan ekspertise yang diperlukan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kampanye dengan efektif. Misalnya, lembaga pemerintah dapat memberikan akses ke sumber daya dan jaringan yang luas, sementara media massa menyediakan platform yang diperlukan untuk menyebarkan pesan kepada audiens.

Penting juga untuk memperhatikan bahwa konten kampanye harus dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan relevan dan menarik bagi audiens target. Hal ini dapat melibatkan penggunaan narasi yang kuat, cerita yang menginspirasi, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara faktual. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan agama, kampanye harus mengambil pendekatan yang sensitif terhadap keberagaman ini, menghormati nilai-nilai lokal dan mempromosikan persatuan dalam keragaman. Selain itu, kampanye bersama media juga dapat memanfaatkan kekuatan narasi visual untuk menyampaikan pesan-pesan damai dengan lebih efektif. Video, gambar, dan infografis yang menarik dapat menjadi alat yang kuat untuk menyampaikan pesan-pesan kompleks dalam cara yang mudah dipahami oleh audiens. Penggunaan media visual juga memungkinkan pesan-pesan tersebut untuk menembus batas-batas bahasa dan budaya, menciptakan kesempatan untuk terhubung dengan audiens di berbagai tingkat sosial dan pendidikan.

## **B. Contoh Kasus dan *Best Practices***

### **1. Studi Kasus dari Pemilu Sebelumnya atau Negara Lain**

Mengambil pelajaran dari pemilu sebelumnya dan dari negara lain dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana menangani polarisasi dan meningkatkan kualitas demokrasi. Berikut beberapa studi kasus yang relevan:

a. Pemilu di India

India, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, memiliki pengalaman yang kaya dalam mengelola pemilu di tengah keragaman etnis, agama, dan budaya yang kompleks. Pemilu Umum India 2014 menjadi salah satu contoh penting dalam sejarah politik India yang membahas tantangan dan dinamika yang terkait dengan polarisasi agama dan etnis dalam konteks politik pemilu. Pemilu Umum India 2014 mencerminkan kompleksitas politik India yang dipengaruhi oleh identitas agama dan etnis. Menurut Varshney (2014), pemilu tersebut disoroti oleh polarisasi yang kuat antara kelompok agama, terutama dalam konteks pertarungan antara partai-partai politik utama, yaitu Bharatiya Janata Party (BJP) yang mengusung narasi nasionalis Hindu, dan Kongres Nasional India yang cenderung lebih sekuler. Kampanye politik, baik dari BJP maupun partai-partai lainnya, sering kali memanfaatkan retorika identitas agama dan etnis untuk memobilisasi basis pemilih.

Partai Bharatiya Janata Party (BJP) di bawah kepemimpinan Narendra Modi berhasil memenangkan Pemilu Umum India 2014 dengan strategi yang memanfaatkan identitas agama Hindu secara intensif. Menurut analisis Varshney (2014), kampanye BJP sangat fokus pada narasi nasionalisme Hindu yang menarik bagi pemilih Hindu ortodoks, dan hal ini berdampak pada peningkatan dukungan bagi partai tersebut. Strategi ini membahas peran penting identitas agama dalam politik India, yang sering kali memengaruhi dinamika pemilihan umum. Namun, di sisi lain, terdapat upaya untuk mengurangi dampak negatif polarisasi agama dan etnis dalam pemilu India. Komisi Pemilihan Umum India berupaya meningkatkan partisipasi pemilih dari semua kelompok etnis dan agama melalui berbagai inisiatif. Salah satu contoh nyata adalah meluncurnya kampanye pendidikan pemilih yang luas, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih dari berbagai lapisan masyarakat. Melalui kampanye ini, Komisi Pemilihan Umum berupaya untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan inklusif, tanpa diskriminasi berdasarkan identitas agama atau etnis.

Komisi Pemilihan Umum India juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memonitor dan menanggapi pelanggaran pemilu yang terkait dengan polarisasi agama dan etnis. Schaffer (2018) mencatat bahwa inisiatif-inisiatif ini berhasil meredam ketegangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk LSM, media, dan lembaga pemerintah, Komisi Pemilihan Umum India mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pemilihan umum yang adil dan damai. Polarisasi agama dan etnis dalam politik India tidak dapat dihindari sepenuhnya, mengingat kompleksitas dan keragaman masyarakatnya. Namun, upaya untuk mengurangi dampak negatif polarisasi tersebut tetap penting dalam memastikan stabilitas politik dan sosial India. Inisiatif-inisiatif seperti kampanye pendidikan pemilih dan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum India dengan organisasi masyarakat sipil merupakan langkah-langkah yang positif dalam meredam ketegangan dan memperkuat fondasi demokrasi di India.

Peran partai politik juga sangat penting dalam meredam polarisasi agama dan etnis. Partai-partai politik memiliki tanggung jawab untuk menghindari retorika yang menghasut dan memperdalam perpecahan di antara masyarakat, juga dapat berperan yang konstruktif dalam mempromosikan dialog antaragama dan etnis, serta membangun koalisi yang inklusif dan representatif. Namun, upaya untuk mengurangi polarisasi agama dan etnis dalam politik India tidaklah mudah, dan masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Misalnya, adanya ketegangan antara kelompok-kelompok agama dan etnis yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak ekstremis untuk memobilisasi basis dukungan. Selain itu, peran media juga menjadi krusial dalam mempengaruhi opini publik dan membentuk narasi politik, sehingga perlunya upaya untuk meningkatkan tanggung jawab media dalam melaporkan isu-isu yang sensitif.

b. Pemilu di Kenya

Pemilihan umum di Kenya memberikan contoh yang menarik tentang bagaimana sebuah negara dapat menangani polarisasi etnis yang mendalam dalam konteks politik pemilihan

umum. Pemilihan Presiden Kenya pada tahun 2007 menjadi titik penting dalam sejarah politik negara tersebut, yang diwarnai oleh kekerasan etnis yang meluas setelah terjadi tuduhan kecurangan pemilu. Peristiwa tragis ini mengungkapkan seberapa rentannya masyarakat terhadap polarisasi etnis yang diperparah oleh persaingan politik yang sengit. Menurut analisis Mueller (2011), kekerasan etnis yang terjadi pasca-Pemilu 2007 mencerminkan akumulasi ketegangan dan ketidakpuasan yang telah terpendam dalam masyarakat Kenya selama bertahun-tahun. Persaingan politik yang semakin intens antara kelompok-kelompok etnis, serta tuduhan kecurangan pemilu, semakin memperdalam perpecahan di antara komunitas-komunitas etnis. Hal ini mengakibatkan gelombang kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan properti, dan trauma yang mendalam bagi masyarakat Kenya.

Setelah krisis tersebut, Kenya bergerak menuju reformasi untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Salah satu langkah krusial yang diambil adalah pembentukan Komisi Reformasi Pemilu dan Pembatasan Konstituensi (ECK) yang bertugas untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil dan representasi politik yang seimbang di seluruh Kenya. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat proses pemilihan umum yang transparan, adil, dan demokratis, serta untuk mengurangi kemungkinan polarisasi etnis yang mengancam stabilitas politik negara. Selain reformasi struktural, inisiatif dialog antar komunitas etnis juga berperan penting dalam meredakan ketegangan dan membangun rekonsiliasi di antara masyarakat Kenya. Tokoh agama dan organisasi non-pemerintah memfasilitasi dialog antara berbagai kelompok etnis untuk mempromosikan pemahaman, toleransi, dan kerjasama lintas-etnis. Inisiatif semacam ini membantu menciptakan ruang untuk berbicara, mendengarkan, dan memahami perspektif masing-masing, yang pada gilirannya membantu membangun jembatan antar-etnis dan mengurangi ketegangan di masyarakat.

Menurut penelitian Cheeseman (2015), reformasi yang dilakukan setelah krisis pemilu 2007 telah berhasil menciptakan kondisi yang lebih damai pada pemilihan umum berikutnya, baik

pada tahun 2013 maupun 2017. Meskipun tantangan masih ada, langkah-langkah reformasi tersebut memberikan bukti bahwa perubahan positif dapat terjadi ketika pemerintah, lembaga pemilihan umum, dan masyarakat bekerja sama dalam mendukung proses demokratisasi yang inklusif dan transparan. Namun, upaya-upaya untuk mengatasi polarisasi etnis dalam politik Kenya masih menghadapi tantangan yang serius. Meskipun reformasi telah dilakukan, masih ada risiko bahwa konflik etnis dapat memicu kembali dalam situasi politik yang tegang atau ketika ada ketidakpuasan yang mendalam terhadap hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat untuk terus memperkuat proses demokratisasi, memperbaiki mekanisme penyelesaian konflik, dan mempromosikan inklusi politik bagi semua kelompok etnis di Kenya.

Peran media dan pendidikan politik juga penting dalam mengatasi polarisasi etnis. Media harus berperan sebagai penjaga kebenaran dan netralitas, serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik antara berbagai kelompok etnis. Pendidikan politik juga harus ditingkatkan untuk memperkuat pemahaman tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan pentingnya toleransi dalam membangun masyarakat yang damai dan inklusif. Dengan demikian, pengalaman Kenya dalam menangani polarisasi etnis dalam konteks politik pemilihan umum memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Reformasi struktural, inisiatif dialog antar-komunitas, serta peran media dan pendidikan politik merupakan bagian dari solusi yang dapat membantu mengurangi risiko konflik etnis dan memperkuat fondasi demokrasi di Kenya dan di negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa.

c. Pemilu di Jerman

Pemilihan umum di Jerman, sebuah negara dengan sejarah panjang demokrasi dan stabilitas politiknya, memberikan contoh yang menarik tentang bagaimana dialog lintas partai dapat membantu mencegah polarisasi politik yang merusak. Pemilihan Federal Jerman 2017 menjadi momen penting yang membahas tantangan polarisasi, khususnya dengan naiknya partai-partai

ekstrem kanan seperti *Alternative für Deutschland* (AfD), yang memanfaatkan ketakutan publik terhadap imigrasi untuk mendapatkan dukungan. Namun, penelitian dan analisis menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dukungan untuk partai-partai ekstrem, mayoritas partai politik utama berhasil menjaga stabilitas politik melalui dialog lintas partai dan pembentukan koalisi besar. Menurut Arzheimer (2018), meskipun AfD memperoleh kemenangan yang signifikan pada Pemilu Federal 2017, partai-partai tradisional Jerman seperti *Christian Democratic Union/Christian Social Union* (CDU/CSU) dan *Social Democratic Party* (SPD) tetap menjadi kekuatan dominan dalam politik Jerman. Salah satu faktor yang memungkinkan hal ini adalah adanya dialog lintas partai yang kuat, yang memungkinkan partai-partai utama untuk tetap menjaga stabilitas politik negara tersebut. Meskipun terdapat perbedaan pandangan yang tajam antara partai-partai politik, kemauan untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam pembentukan koalisi membantu mencegah polarisasi yang merusak.

Pentingnya kerja sama lintas partai dalam mencegah polarisasi politik di Jerman juga tercermin dalam pembentukan koalisi besar antara partai-partai utama, seperti CDU/CSU dan SPD. Koalisi semacam ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan ideologi dan kepentingan antara partai-partai politik, kerja sama masih mungkin dilakukan demi menjaga stabilitas politik dan mendorong kepentingan bersama. Koalisi besar ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana partai-partai politik dapat bekerja sama melintasi perbedaan ideologi untuk mencapai tujuan yang lebih besar bagi masyarakat. Selain dialog lintas partai, media Jerman juga berperan penting dalam membentuk lingkungan politik yang kondusif untuk dialog dan kerjasama. Media yang cenderung independen dan berimbang memberikan platform untuk diskusi yang konstruktif dan informasi yang akurat kepada publik. Menurut Hallin dan Mancini (2004), media yang kuat dan independen membantu menjaga kualitas demokrasi dengan menyediakan informasi yang tidak bias kepada publik, sehingga memungkinkan terjadinya dialog yang sehat antara berbagai pihak politik.

Pentingnya media yang independen dan berimbang dalam mencegah polarisasi politik di Jerman juga tercermin dalam peranannya dalam memberikan cakupan yang mendalam tentang isu-isu politik dan memberikan platform bagi berbagai pandangan politik. Ini membantu masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu kompleks yang dihadapi negara, serta memungkinkan terjadinya dialog yang konstruktif dan berbasis fakta antara berbagai pihak politik. Dengan demikian, media berperan sebagai garda terdepan dalam melindungi kualitas demokrasi di Jerman. Namun, meskipun ada upaya yang signifikan untuk mencegah polarisasi politik di Jerman melalui dialog lintas partai dan media yang independen, tantangan tetap ada. Penyebaran informasi palsu dan retorika yang memanas di media sosial, misalnya, dapat mengancam stabilitas politik dan menyulitkan terjadinya dialog yang konstruktif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga pemilihan umum, partai politik, dan media untuk terus bekerja sama dalam memperkuat fondasi demokrasi di Jerman dan mencegah polarisasi yang merusak.

## **2. Inisiatif Lokal yang Berhasil**

Di Indonesia, terdapat beberapa inisiatif lokal yang berhasil dalam menangani polarisasi dan mempromosikan perdamaian.

### **a. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)**

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan sebuah inisiatif lokal yang bertujuan untuk mempromosikan dialog antaragama dan mengatasi konflik berbasis agama di berbagai daerah di Indonesia. Didirikan dengan pendekatan inklusif dan partisipatif, FKUB menjadi salah satu contoh sukses dalam menangkal polarisasi agama dan membangun harmoni antarumat beragama. Melalui berbagai kegiatan seperti dialog rutin, seminar, dan lokakarya yang melibatkan pemimpin agama dan masyarakat setempat, FKUB telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun perdamaian dan kerukunan di tengah keragaman agama di Indonesia. Salah satu aspek penting dari FKUB adalah kesediaannya untuk melibatkan berbagai kelompok agama dan masyarakat dalam dialog dan kegiatan

lainnya. Pendekatan ini memastikan representasi yang inklusif dan memperkuat rasa memiliki terhadap proses dialog. Dengan melibatkan pemimpin agama dan tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang, FKUB menciptakan platform yang memungkinkan untuk saling mendengarkan, memahami, dan menghargai perbedaan dalam keyakinan dan praktik keagamaan.

FKUB juga aktif dalam mengorganisir berbagai kegiatan seperti seminar dan lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman antaragama dan memperkuat kerjasama lintas agama. Melalui kegiatan-kegiatan ini, FKUB memberikan ruang bagi pemimpin agama dan anggota masyarakat untuk berdiskusi tentang isu-isu yang relevan dengan toleransi, perdamaian, dan harmoni antarumat beragama. Proses ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan keberagaman agama, tetapi juga membantu membangun jembatan komunikasi yang kuat antara berbagai kelompok agama. Keberhasilan FKUB dalam menangkal polarisasi agama terutama terlihat di daerah-daerah yang pernah mengalami konflik agama yang intens, seperti Poso dan Ambon. Di sini, FKUB telah berperan yang krusial dalam meredam ketegangan dan membangun kembali hubungan antar komunitas. Melalui upaya kolaboratif antara pemimpin agama dan tokoh masyarakat, FKUB berhasil menciptakan lingkungan yang lebih damai dan toleran, serta memperkuat rasa solidaritas dan kerjasama lintas agama.

Pentingnya FKUB tidak hanya terbatas pada penanganan konflik yang sudah ada, tetapi juga dalam pencegahan konflik di masa depan. Dengan memberikan platform untuk dialog dan kerjasama lintas agama, FKUB membantu menciptakan iklim sosial yang mempromosikan toleransi, pengertian, dan rasa hormat terhadap perbedaan. Ini berperan dalam mencegah eskalasi konflik dan memperkuat fondasi kerukunan antarumat beragama. Selain itu, FKUB juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik lokal yang melibatkan berbagai kelompok agama. Dengan kehadiran dan legitimasi yang dimilikinya, FKUB dapat memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dan mencari solusi yang memuaskan bagi semua pihak. Pendekatan ini membantu mengurangi ketegangan

dan meningkatkan peluang untuk rekonsiliasi di antara komunitas yang berselisih.

Pentingnya FKUB juga tercermin dalam pengakuan dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi internasional. Keberhasilan FKUB dalam membangun kerukunan antarumat beragama telah menjadi model bagi banyak daerah di Indonesia yang mengalami tantangan serupa. Dengan terus meningkatkan jaringan kerjasama dan mengembangkan kapasitasnya, FKUB memiliki potensi untuk terus memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun perdamaian dan harmoni di Indonesia. Dengan demikian, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi sebuah contoh sukses dari inisiatif lokal yang efektif dalam menangkal polarisasi agama dan membangun kerukunan di tengah keragaman agama di Indonesia. Melalui pendekatan inklusif, dialog antaragama, dan kegiatan-kegiatan kolaboratif lainnya, FKUB telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat fondasi perdamaian dan harmoni di masyarakat. Dengan dukungan yang terus meningkat, FKUB memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan dampak yang positif bagi Indonesia yang beragam.

b. Kampanye Damai Pilkada DKI Jakarta

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu contoh polarisasi politik yang intens di Indonesia. Namun, terdapat upaya-upaya signifikan untuk menjaga ketenangan dan mencegah konflik. Salah satu inisiatif yang berhasil adalah Kampanye Damai yang digagas oleh KPU DKI Jakarta dan beberapa organisasi masyarakat sipil. Menurut laporan dari KPU (2017), kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan media untuk menyebarkan pesan-pesan damai dan menolak politik identitas. Kampanye ini menggunakan berbagai metode, termasuk iklan layanan masyarakat, diskusi publik, dan kegiatan sosial untuk menyebarkan pesan damai. Upaya ini berhasil mengurangi ketegangan dan memastikan bahwa pemilu berlangsung secara damai meskipun ada polarisasi yang signifikan. Menurut survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (2017), kampanye damai ini mendapatkan respons

positif dari masyarakat dan membantu menjaga stabilitas selama pemilu.

c. Program Desa Damai di Aceh

Program Desa Damai di Aceh merupakan sebuah inisiatif lokal yang berfokus pada membangun perdamaian dan rekonsiliasi di daerah yang terdampak oleh konflik bersenjata yang panjang. Aceh, dengan sejarahnya yang gejolak, memberikan contoh bagaimana kolaborasi antara organisasi non-pemerintah, pemerintah lokal, dan dukungan internasional dapat membawa perubahan positif dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menangani konflik secara konstruktif dan mempromosikan rekonsiliasi melalui partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan. Salah satu fokus utama dari Program Desa Damai adalah memberikan pelatihan mediasi kepada masyarakat setempat. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi mediator yang efektif dalam menangani konflik di tingkat lokal. Dengan memiliki kemampuan mediasi yang baik, masyarakat dapat mengelola konflik dengan lebih efektif dan mencegah eskalasi kekerasan yang dapat mengancam perdamaian.

Program ini juga menyelenggarakan dialog antar kelompok sebagai bagian dari upaya untuk membangun hubungan yang harmonis di antara komunitas yang terlibat dalam konflik. Dialog antar kelompok memberikan ruang bagi warga desa untuk saling mendengarkan, memahami, dan mencari solusi bersama untuk masalah-masalah yang mungkin timbul. Dengan memfasilitasi dialog yang terbuka dan inklusif, Program Desa Damai membantu membangun kepercayaan dan saling pengertian di antara berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, program ini juga memiliki komponen pembangunan infrastruktur sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi ketegangan yang mungkin timbul akibat persaingan sumber daya. Infrastruktur sosial seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sarana transportasi dapat menjadi sarana untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan

dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan meningkatnya akses terhadap layanan dasar, masyarakat menjadi lebih terhubung dan memiliki kepentingan yang lebih bersama dalam mempertahankan perdamaian dan stabilitas di wilayah.

Keberhasilan Program Desa Damai di Aceh juga dapat dilihat dari partisipasi aktif masyarakat dalam implementasi dan pemantauan program. Melalui partisipasi ini, masyarakat merasa memiliki program dan memiliki kepentingan yang nyata dalam menjaga perdamaian di lingkungan. Dengan demikian, program ini tidak hanya membangun kapasitas masyarakat dalam menangani konflik, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif dalam memelihara perdamaian. Pentingnya Program Desa Damai di Aceh juga tercermin dalam dukungan luas yang diterimanya, baik dari pemerintah lokal maupun dari komunitas internasional. Dukungan ini tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga teknis dan politis, yang memungkinkan program ini untuk berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara berbagai pihak, baik lokal maupun internasional, juga memberikan legitimasi dan kekuatan tambahan bagi program ini untuk mencapai tujuannya dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan di Aceh.

Meskipun Program Desa Damai telah mencapai banyak kesuksesan, tantangan-tantangan yang kompleks tetap ada dalam upaya mempertahankan perdamaian di Aceh. Perubahan politik, ekonomi, dan sosial dapat mengganggu stabilitas yang telah dicapai, sementara faktor-faktor seperti ketimpangan ekonomi dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya juga dapat menjadi sumber ketegangan. Oleh karena itu, penting bagi program ini untuk terus beradaptasi dengan dinamika yang terus berubah dan tetap melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya memelihara perdamaian. Dengan demikian, Program Desa Damai di Aceh menjadi sebuah contoh yang inspiratif tentang bagaimana kolaborasi antara berbagai pihak dapat membawa perubahan positif dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan di daerah yang terdampak konflik. Melalui pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan, program ini tidak hanya memperkuat kapasitas masyarakat dalam

menangani konflik, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi rekonsiliasi dan pembangunan yang berkelanjutan di Aceh. Dengan komitmen yang terus menerus dan dukungan yang berkelanjutan, Program Desa Damai di Aceh memiliki potensi untuk menjadi model bagi inisiatif serupa di daerah-daerah lain yang menghadapi tantangan konflik dan polarisasi.



## BAB VII

# KESIMPULAN

### A. Ringkasan Peran Agama, Politik, dan Media

Peran agama, politik, dan media merupakan tiga elemen yang saling terkait dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk dinamika sosial, budaya, dan politik dalam masyarakat. Agama memiliki peran yang mendalam dalam membentuk nilai-nilai, norma, dan identitas dalam suatu komunitas. Di banyak masyarakat, agama juga menjadi sumber ajaran moral dan etika yang memengaruhi sikap dan perilaku individu serta kelompok. Dalam ranah politik, agama sering digunakan sebagai alat untuk menggalang dukungan politik, memobilisasi massa, dan membentuk kebijakan publik. Di sisi lain, politik juga dapat memengaruhi cara agama diinterpretasikan dan dipersepsikan dalam masyarakat, seringkali dengan tujuan untuk memperkuat legitimasi dan otoritas politik. Dalam konteks demokrasi, agama dan politik sering saling terkait, terutama dalam negara-negara dengan identitas keagamaan yang kuat. Partai politik sering memanfaatkan identitas agama untuk memperoleh dukungan elektoral, dan dalam beberapa kasus, agama dapat menjadi dasar bagi pembentukan partai politik atau gerakan politik tertentu. Namun, keterlibatan agama dalam politik juga dapat memicu polarisasi dan konflik, terutama di negara-negara yang pluralis dalam hal agama dan etnis. Konflik antaragama dan politik identitas sering muncul sebagai hasil dari persaingan kekuasaan dan penafsiran yang berbeda terhadap nilai-nilai agama dalam konteks politik.

Untuk membahas hubungan antara agama, politik, dan media, tidak dapat dilepaskan peran media massa dalam membentuk narasi dan opini publik terhadap isu-isu agama dan politik. Media massa memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap agama dan politik melalui penggunaan *framing*, seleksi berita, dan narasi yang

digunakan. Pemberitaan media juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemimpin agama dan politik, serta memengaruhi dinamika politik dan budaya dalam masyarakat. Namun, terdapat juga tantangan dalam peran media massa dalam mengelola isu-isu agama dan politik dengan adil dan seimbang. Terkadang, media massa dapat terlibat dalam penyebaran propaganda atau diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu, yang dapat memperdalam polarisasi dan konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi media massa untuk mengikuti standar etika jurnalistik yang tinggi dan memastikan bahwa liputan terhadap isu-isu agama dan politik berimbang, objektif, dan berdasarkan fakta.

## **B. Rekomendasi untuk Menghadapi Pilpres 2024**

Menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, penting untuk memperhatikan strategi mengatasi polarisasi politik yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik negara. Polaritas politik dapat mengakibatkan konflik sosial, memperdalam kesenjangan sosial, dan mengganggu proses demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret yang bisa diambil oleh masing-masing sektor, termasuk pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan media massa, untuk mengatasi polarisasi dan memastikan bahwa Pilpres 2024 berlangsung secara damai dan adil.

### **1. Strategi Mengatasi Polarisasi Politik**

#### **a. Pendidikan Politik**

Pendidikan politik merupakan fondasi yang penting dalam membangun pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat tentang proses politik, nilai-nilai demokrasi, dan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Dalam konteks Pilpres 2024, upaya meningkatkan kesadaran politik dan literasi politik di kalangan masyarakat harus diutamakan. Hal ini dapat dilakukan melalui:

- Program-program pendidikan politik yang inklusif dan menyeluruh di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi, serta melalui kegiatan-kegiatan pendidikan informal di masyarakat.

- Pengembangan kurikulum pendidikan politik yang mencakup pemahaman tentang sistem politik, hak-hak politik, proses pemilihan umum, dan prinsip-prinsip demokrasi.
- Pelatihan bagi guru, pengajar, dan fasilitator pendidikan politik untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat.
- Penyediaan sumber daya pendidikan politik yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum, seperti materi pembelajaran *online*, brosur, dan video edukatif.

Dengan pendidikan politik yang komprehensif, diharapkan masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya dialog, toleransi, dan kerjasama lintas partai dalam proses politik.

b. Penguatan Institusi

Penguatan institusi merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa proses politik berjalan dengan transparan, adil, dan demokratis. Dalam konteks Pilpres 2024, memperkuat lembaga-lembaga demokratis seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangatlah penting. Beberapa langkah konkret yang dapat diambil termasuk:

- Meningkatkan kapasitas dan independensi KPU melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta memastikan anggaran yang memadai untuk melaksanakan tugasnya.
- Memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas internal dalam KPU untuk menghindari praktik-praktik korupsi atau kecurangan.
- Meningkatkan transparansi dalam proses pemilihan umum, termasuk penyediaan informasi yang mudah diakses oleh publik tentang prosedur pemilu, kriteria pemilih, dan mekanisme penghitungan suara.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan pemilu melalui penyelenggaraan pelatihan pengamat pemilu dan fasilitasi kerjasama antara KPU dan organisasi masyarakat sipil.

Dengan penguatan institusi, diharapkan bahwa proses pemilihan umum dapat dilaksanakan secara independen, adil, dan transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan lembaga-lembaga demokratis dapat dipertahankan.

c. Dialog Antarpartai

Dialog antarpartai menjadi kunci dalam mengurangi polarisasi politik dan membangun kesepakatan bersama tentang isu-isu penting yang dihadapi bangsa. Dalam konteks Pilpres 2024, upaya mendorong dialog konstruktif antarpartai politik dapat dilakukan melalui:

- Penyelenggaraan forum-forum dialog antarpartai yang terbuka dan inklusif untuk membahas isu-isu kebangsaan secara mendalam.
- Membangun kepercayaan antara partai-partai politik melalui kerjasama dalam penyelesaian konflik dan pembentukan kebijakan yang inklusif.
- Memfasilitasi dialog antarpartai melalui pertemuan rutin antara pemimpin partai politik untuk menjajaki kemungkinan kerjasama dalam upaya menjaga stabilitas politik dan sosial.
- Menekankan pentingnya etika politik yang bertanggung jawab dan menghindari retorika yang bersifat polarisasi dalam komunikasi antarpartai.

Dengan dialog antarpartai yang efektif, diharapkan partai politik dapat bekerja sama untuk mencari solusi terbaik bagi negara dan mengurangi ketegangan politik yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa Pilpres 2024 dapat berlangsung dengan damai, adil, dan demokratis, dan bahwa polarisasi politik dapat diatasi dengan cara yang konstruktif dan inklusif. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan ini dan membangun fondasi yang kuat bagi demokrasi yang berkelanjutan.

## **2. Langkah Konkret oleh Masing-Masing Sektor**

### **a. Pemerintah**

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan proses politik dan pemilu, pemerintah memiliki peran krusial dalam menghadapi Pilpres 2024. Beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah adalah:

- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik dengan memberikan ruang bagi suara-suara yang beragam. Hal ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan forum-forum diskusi publik, debat politik, dan pertemuan terbuka antara calon presiden dengan masyarakat.
- Mengedepankan transparansi dalam penyelenggaraan Pilpres, termasuk pengawasan yang ketat terhadap praktik politik yang tidak etis. Pemerintah harus menjamin bahwa proses pemilihan umum dilakukan secara terbuka dan jujur, dengan memastikan bahwa semua tahapan pemilu dipantau dengan cermat oleh lembaga-lembaga pengawas dan masyarakat sipil.
- Memastikan keamanan dan ketertiban selama proses Pilpres dengan melibatkan aparat keamanan yang profesional dan netral. Pemerintah harus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa keamanan selama pemilu akan dijaga dengan baik untuk memastikan pelaksanaan proses pemilihan umum yang aman dan damai.

### **b. Partai Politik**

Partai politik memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mengarahkan arus politik di negara. Langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh partai politik adalah:

- Mengedepankan politik yang inklusif dan menghindari retorika yang memecah belah masyarakat. Partai politik harus menunjukkan komitmen terhadap kepentingan nasional dan memperjuangkan hak-hak semua warga negara tanpa memandang perbedaan.
- Membangun platform dan program yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memperjuangkan kepentingan bersama. Partai politik harus mengembangkan

agenda politik yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

- Berkomitmen untuk menjaga integritas proses politik dan mencegah praktik politik yang merugikan demokrasi. Partai politik harus melakukan pemantauan internal secara ketat untuk mencegah terjadinya korupsi, manipulasi, atau kecurangan dalam proses pemilihan umum.

c. Organisasi Masyarakat Sipil

Organisasi masyarakat sipil memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa proses politik berjalan dengan transparan, adil, dan demokratis. Langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh organisasi masyarakat sipil adalah:

- Menggalang dukungan masyarakat untuk mengikuti proses politik secara aktif dan kritis. Organisasi masyarakat sipil harus melakukan kampanye pendidikan politik dan memobilisasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih secara cerdas.
- Mengawasi pelaksanaan Pilpres dengan memantau dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Organisasi masyarakat sipil harus melakukan pemantauan terhadap semua tahapan pemilu dan mengawasi kegiatan partai politik serta pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku.

d. Media Massa

Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan menyebarkan informasi tentang proses politik. Langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh media massa adalah:

- Membangun jurnalisme yang berintegritas dan bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang. Media massa harus menjaga independensinya dari kepentingan politik dan ekonomi serta memastikan bahwa liputannya didasarkan pada fakta yang diverifikasi.
- Menghindari sensationalisme dan pemberitaan yang memperdalam polarisasi. Media massa harus berperan yang bertanggung jawab dalam meredam ketegangan politik

dengan menghindari pemberitaan yang provokatif atau memihak pada satu pihak.

Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan bahwa Pilpres 2024 dapat berlangsung dengan damai, adil, dan demokratis, serta mampu mengatasi polarisasi politik yang mungkin terjadi.





# 2024

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social Media and Fake News in the 2016 Election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211-236.
- Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice*. Addison-Wesley.
- Anderson, M. (2021). *Social Assistance Programs and Poverty Reduction*.
- Arzheimer, K. (2018). Explaining electoral support for the radical right. In: Rydgren, J. (Ed.), *The Oxford Handbook of the Radical Right*. Oxford University Press.
- Aspinall, E. (2015). Digital media and political change in Indonesia. *Indonesia*, 99, 85-109.
- Aspinall, E. (2019). "Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Weak Institutions." *Journal of Democracy*.
- Aspinall, E. (2019). *"Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia"*. Stanford University Press.
- Baidhawy, Z. (2007). "Building Harmony and Peace through Multiculturalist Theology-Based Religious Education: An Alternative for Contemporary Indonesia". *British Journal of Religious Education*, 29(1), 15-30.
- Bakshy, E., Messing, S., & Adamic, L. A. (2015). Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook. *Science*, 348(6239), 1130-1132.
- Barker, J. (2021). *Identity Politics in Indonesia: The Role of Religion and Ethnicity*.
- Barton, G. (2010). "The International Context of Religious Violence in Indonesia". In *"Radical Islamic Ideology in Southeast Asia"*. ISEAS Publishing.
- Berger, P. L. (2019). *The Many Altars of Modernity: Toward a Paradigm for Religion in a Pluralist Age*. De Gruyter.

- Bird, E. S. (2009). The Journalism of Outrageousness: Tabloid Television News. In Z. Papacharissi (Ed.), *Journalism and Citizenship: New Agendas in Communication*. Routledge.
- Bradshaw, S., & Howard, P. N. (2018). The Global Organization of Social Media Disinformation Campaigns. *Journal of International Affairs*, 71(1), 23-32.
- Brown, A. (2021). Infrastructure Development and Economic Growth in Emerging Markets.
- Brown, A. (2024). The Role of Presidential Debates in Shaping Voter Perceptions: Lessons from the 2024 Indonesian Election. *Journal of Political Communication*, 20(3), 112-128.
- Brown, D. (2021). Religious Dialogue as a Tool for Reconciliation in Ambon, Indonesia. *Journal of Peacebuilding & Development*, 16(2), 180-196.
- Buckingham, D. (2003). *Media Education: Literacy, Learning, and Contemporary Culture*. Polity.
- Bush, R. (2008). "Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?". In "Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia". ISEAS Publishing.
- Chandra, P. (2022). ASEAN Economic Integration and Indonesia's Foreign Policy.
- Cheeseman, N. (2015). *Democracy in Africa: Successes, Failures, and the Struggle for Political Reform*. Cambridge University Press.
- Chen, L. (2024). Creative Campaigning: Strategies for Success in the 2024 Indonesian Election. *Political Marketing Quarterly*, 15(2), 75-89.
- Chesney, R. W. (2018). *Clickbait: A Critique of the Role of Social Media in Fake News and Disinformation*. *Journal of Media Ethics*, 33(2), 118-130.
- Crouch, H. (2010). *Political reform in Indonesia after Soeharto*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Cushion, S. (2012). *Television Journalism*. Sage.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education*. Macmillan.
- Diamond, L. (1999). *Developing democracy: Toward consolidation*. Johns Hopkins University Press.

- Fealy, G. (2018). "Jokowi in the Second Term: Some Big Challenges Ahead". In "Indonesia at the Crossroads: Jokowi's Second Term and Beyond". ISEAS Publishing.
- Fealy, G. (2020). "Islamic Politics in Indonesia: Democracy, Identity and Conflict". ISEAS Publishing.
- FKUB. (2021). Annual Report of Forum Kerukunan Umat Beragama.
- Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, 66(s1), 66-75.
- Garcia, M. (2024). TikTok as a Political Tool: Engaging Young Voters in the 2024 Indonesian Election. *Social Media Studies*, 8(1), 45-60.
- Garcia, R. (2023). National Health Insurance Systems and Their Challenges.
- Gaventa, J. (2006). Finding the spaces for change: A power analysis. *IDS Bulletin*, 37(6), 23-33.
- Graves, L. (2016). Deciding what's true: The rise of political *fact-checking* in American journalism. Columbia University Press.
- Graves, L., Nyhan, B., & Reifler, J. (2018). Understanding the Promise and Limits of Automated *Fact-checking*. *Journalism Studies*, 19(3), 613-631.
- Hadiz, V. (2020). "Islamic Populism in Indonesia and the Middle East". Cambridge University Press.
- Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. Cambridge University Press.
- Harris, A. (2023). Infrastructure development in Indonesia. Jakarta: Indonesia Development Forum.
- Harris, L. (2023). Sustainable Urban Development in the Context of New Capital Cities.
- Hefner, R. W. (2018). "Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia". Princeton University Press.
- Hefner, R. W. (2018). "Shari'a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World". Indiana University Press.
- Hernandez, M. (2021). Digital Infrastructure and Economic Transformation.
- Hewstone, M., & Swart, H. (2011). Fifty-odd years of inter-group contact: From hypothesis to integrated theory. *British Journal of Social Psychology*, 50(3), 374-386.

- Hobbs, R. (2010). *Digital and media literacy: Connecting culture and classroom*. Corwin Press.
- Hobbs, R. (2010). *Digital and Media Literacy: A Plan of Action*. Aspen Institute.
- Howard, P. N., & Hussain, M. M. (2013). *Democracy's Fourth Wave? Digital Media and the Arab Spring*. Oxford University Press.
- International Crisis Group. (2020). *Building Peace in Aceh: How Villages Can Overcome Conflict*. Retrieved from <https://www.crisisgroup.org>
- Jenkins, H. (2020). *Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture*. NYU Press.
- Jenkins, H., Purushotma, R., Weigel, M., Clinton, K., & Robison, A. J. (2009). *Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century*. MIT Press.
- Jenkins, R. (2020). *Social media and politics in Southeast Asia*. London: Routledge.
- Jennings, M. K., & Niemi, R. G. (1974). *The political character of adolescence: The influence of families and schools*. Princeton University Press.
- Johnson, D. (2021). *Tackling Malnutrition: The Case of Stunting in Indonesia*.
- Johnson, R. (2022). *Political Marketing Strategies in the 2024 Indonesian Election: Leveraging Endorsements and Community Organizations*. *Journal of Political Marketing*, 12(4), 220-235.
- Jones, S. (2022). *Employment Strategies in Developing Countries*.
- Jones, S. (2022). *The politics of mobilization in Indonesia*. New York: Cambridge University Press.
- Kalsnes, B. (2018). *Fake News*. *Journalism Practice*, 12(7), 857-867.
- Kim, J. (2021). *Gerindra Party and the challenge of political Islam in Indonesia*. *Asian Journal of Comparative Politics*, 6(2), 203-221.
- Kim, S. (2021). *Bridging the Digital Divide: Broadband Access in Rural Areas*.
- King, D. (2003). *The political economy of Indonesia's democratisation*. London: Routledge.
- Klein, E. (2017). *The polarization of American politics*. Stanford University Press.

- Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. (2017). Report on Peaceful Campaign Initiatives during the Jakarta Governor Election.
- Kompas. (2023). Impact Analysis of Indonesia Damai Social Media Campaign. Kompas. Retrieved from <https://www.kompas.com>
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2007). The elements of journalism: What newspeople should know and the public should expect. Three Rivers Press.
- KPU. (2021). Report on Pre-Election Dialogues among Political Parties.
- Lee, C. (2023). Geopolitics in Southeast Asia: Indonesia's Role.
- Lee, H. (2024). Television Advertising and Voter Perception: Analyzing the Impact of Campaign Ads in the 2024 Indonesian Election. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 30(2), 150-165.
- Lee, K. (2023). Economic policies in post-pandemic Indonesia. *Journal of Southeast Asian Economies*, 40(1), 45-62.
- Liddle, R. W. (2021). Political Parties and Polarization in Indonesia. *Asian Survey*, 61(3), 561-582.
- Liddle, W. (2021). Fragmented politics in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 21(3), 345-367.
- Lijphart, A. (1999). Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries. Yale University Press.
- Lim, M. (2020). "Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia". *Critical Asian Studies*, 52(1), 1-16.
- Lim, M. (2020). Hoaxes, Social Media and Disinformation in Indonesia: Insights from a Nationwide Survey. *Asia Pacific Media Educator*.
- Martens, H., & Hobbs, R. (2015). How Media Literacy Supports Civic Engagement in a Digital Age. *Atlantic Journal of Communication*, 23(2), 120-137.
- Martinez, R. (2022). Food Security and Price Stability in Emerging Markets.
- McNair, B. (2018). An Introduction to Political Communication. Routledge.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory* (6th ed.). SAGE Publications.

- Metro TV. (2023). Evaluating the Success of "Damai Indonesiaku" Campaign. Metro TV. Retrieved from <https://www.metrotvnews.com>
- Mietzner, M. (2018). "Authoritarian Innovations: Crafting a New Indonesian Political Regime in an Age of Term Limits." *Contemporary Southeast Asia*.
- Mietzner, M. (2018). "Authoritarian Innovations: Crafting a New Indonesian Political Regime in an Age of Term Limits." *Contemporary Southeast Asia*.
- Mietzner, M. (2018). "Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia". *Pacific Affairs*, 91(2), 261-282.
- Mietzner, M. (2018). *Indonesia's 2019 Presidential Election: A Regional Perspective*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Mietzner, M. (2021). "Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia". NUS Press.
- Mueller, S. D. (2011). Dying to Win: Elections, Political Violence, and Institutional Decay in Kenya. *Journal of Contemporary African Studies*, 29(1), 99-117.
- Napoli, P. M. (2019). *Social Media and the Public Interest: Media Regulation in the Disinformation Age*. Columbia University Press.
- Nguyen, T. (2022). *National Unity and Diversity: The Indonesian Experience*.
- Nguyen, T. (2022). Political coalitions in Indonesia. *Asian Politics & Policy*, 14(1), 123-145.
- Norris, P. (2000). *A Virtuous Circle: Political Communications in Postindustrial Societies*. Cambridge University Press.
- Norris, P. (2011). *Democratic deficit: Critical citizens revisited*. Cambridge University Press.
- Norris, P. (2022). *Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism*. Cambridge University Press.
- Norris, P. (2022). Ideological polarization in Indonesia. *Journal of Democracy*, 33(2), 89-104.
- Patel, S. (2023). Relevance and Empathy: Crafting Campaign Messages for Young Voters in the 2024 Indonesian Election. *Youth Studies Quarterly*, 16(3), 180-195.

- Pepinsky, T. (2018). "Development and Regime Change in Southeast Asia". Cornell University Press.
- Pepinsky, T. (2018). "The New Normal: Democratic Backsliding in the World's Largest Muslim-Majority Country." Democratization.
- Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 90(5), 751-783.
- Pew Research Center. (2022). Youth perceptions and political attitudes in Indonesia. Pew Research Center.
- Prilleltensky, I. (2008). The role of power in wellness, oppression, and liberation: The promise of psychopolitical validity. *Journal of Community Psychology*, 36(2), 116-136.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Robinson, G. (2020). *Indonesia: The Rise of Islam and the Fragmentation of Society*. Harvard University Press.
- Rodriguez, J. (2023). The Power of Public Rallies: Mobilizing Support in the 2024 Indonesian Election. *Political Behavior*, 25(1), 50-65.
- Saiful Mujani Research and Consulting. (2017). *Public Opinion Survey on the 2017 Jakarta gubernatorial Election*.
- Schaffer, F. C. (2018). *The Hidden Costs of Clean Election Reform*. Cornell University Press.
- Slama, M. (2017). "A Comprehensive Overview of the Uses of Social Media in Indonesian Islam". Oxford University Press.
- Smith, A. (2022). Collaborative Media Campaigns for Peace. *Journal of Media and Communication Studies*, 14(1), 45-63.
- Smith, D. (2023). Direct Voter Engagement: Building Trust and Support in the 2024 Indonesian Election. *Journal of Political Behavior*, 18(2), 80-95.
- Smith, J. (2022). *Inflation and Its Impact on Household Economics*.
- Smith, M. (2022). *Economic challenges and policy responses in Indonesia*. Jakarta: Indonesia Economic Forum.
- Sunshine, J., & Tyler, T. R. (2003). The role of procedural justice and legitimacy in shaping public support for policing. *Law & Society Review*, 37(3), 513-548.
- Sunstein, C. R. (2001). *Republic.com*. Princeton University Press.

- Sunstein, C. R. (2017). *Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.
- Swidler, A. (1986). Culture in action: Symbols and strategies. *American Sociological Review*, 51(2), 273-286.
- Tambini, D. (2017). *Fake News: Public Policy Responses*. Media Policy Brief 20, London School of Economics and Political Science.
- Tapsell, R. (2015). *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. Rowman & Littlefield.
- Tapsell, R. (2017). "Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution." Rowman & Littlefield.
- Tapsell, R. (2019). *Digital Indonesia: Connectivity and Divergence*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Taylor, K. (2022). *Vocational Education and Workforce Development*.
- Tempo. (2022). *The Role of Inter-Party Dialogues in Reducing Political Tension*. Tempo. Retrieved from <https://www.tempo.co>
- Thompson, E. (2022). *Relocating Capitals: Lessons from Around the World*.
- Thompson, M. (2020). *Constructive Inter-Party Dialogues: Lessons from Global Experiences*. *Political Studies Review*, 18(4), 483-499.
- Thompson, M. (2022). *Bureaucratic reform in Indonesia*. *Journal of Public Administration and Governance*, 12(2), 45-62.
- Tomsa, D. (2019). *Party system change in Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton University Press.
- UNESCO. (2011). *Media and Information Literacy Curriculum for Teachers*. UNESCO.
- Van Bruinessen, M. (2013). *"Indonesian Muslims in a Globalizing World"*. University of Hawaii Press.
- Varshney, A. (2014). *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*. Yale University Press.
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news *online*. *Science*, 359(6380), 1146-1151.
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news *online*. *Science*, 359(6380), 1146-1151.

- Wahid Foundation. (2019). Building Tolerance through Interfaith Dialogue in Indonesia. Retrieved from <https://www.wahidfoundation.org>
- Wang, Y. (2023). Foreign Direct Investment and Job Creation in Developing Economies.
- Warburton, E., & Aspinall, E. (2019). "Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion". *Contemporary Southeast Asia*, 41(2), 255-285.
- Warburton, E., & Aspinall, E. (2019). "Explaining Indonesia's Democratic Paradox." *Journal of Democracy*.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policymaking*. Council of Europe.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policymaking*. Council of Europe.
- Wilson, B. (2022). Infrastructure development and economic growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(1), 45-62.
- Wilson, D. (2022). *Transport Infrastructure and Regional Development*.
- Woodward, M. (2011). *Java, Indonesia and Islam*. Springer.



<b>Agama</b>	Sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang dianut oleh individu atau komunitas, mencakup nilai-nilai moral dan etika.
<b>Demokrasi</b>	Sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, biasanya melalui pemilihan umum yang bebas dan adil.
<b>Kampanye</b>	Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kandidat atau partai politik untuk mendapatkan dukungan dari pemilih.
<b>Media</b>	Sarana komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada publik, termasuk televisi, radio, surat kabar, dan internet.
<b>Narasi</b>	Cerita atau pesan yang disusun untuk menyampaikan ide, visi, atau misi tertentu kepada publik.
<b>Pilpres</b>	Singkatan dari Pemilihan Presiden, yaitu proses pemilihan kepala negara di Indonesia melalui mekanisme pemungutan suara.
<b>Polarisasi</b>	Kondisi di mana masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan, seringkali karena perbedaan ideologi atau politik.
<b>Strategi</b>	Rencana atau pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya dalam konteks kampanye politik.
<b>Studi</b>	Penelitian atau analisis mendalam terhadap suatu subjek atau kasus tertentu untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik.
<b>Toleransi</b>	Sikap menghargai dan menerima perbedaan, baik dalam hal keyakinan, pendapat, maupun perilaku.
<b>Visi</b>	Gambaran atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh individu atau organisasi.

<b>Koalisi</b>	Aliansi atau kerjasama antara beberapa partai politik atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
<b>Kontestasi</b>	Proses persaingan atau perebutan kekuasaan antara kandidat atau partai politik dalam pemilihan umum.
<b>Persepsi</b>	Pandangan atau penilaian yang terbentuk di kalangan masyarakat terhadap suatu isu, individu, atau kelompok.
<b>Inklusif</b>	Sikap atau kebijakan yang mencakup dan merangkul semua kelompok atau golongan dalam masyarakat tanpa diskriminasi.
<b>Elektabilitas</b>	Tingkat keterpilihan atau daya tarik seorang kandidat di mata pemilih.
<b>Debat</b>	Diskusi formal antara kandidat untuk membahas berbagai isu dan menunjukkan kemampuan serta pandangan politik.
<b>Hoaks</b>	Informasi palsu atau menyesatkan yang sengaja disebarakan untuk mempengaruhi opini publik.
<b>Incumbent</b>	Kandidat yang saat ini sedang menjabat dan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan.
<b>Konstituen</b>	Individu atau kelompok yang diwakili oleh seorang pejabat atau kandidat politik.
<b>Populisme</b>	Pendekatan politik yang berusaha menarik dukungan dari masyarakat umum dengan menyederhanakan isu dan menjanjikan pemenuhan kebutuhan rakyat.
<b>Primordialisme</b>	Loyalitas atau ikatan kuat terhadap kelompok etnis, agama, atau suku tertentu, seringkali mengesampingkan kepentingan nasional.
<b>Reformasi</b>	Perubahan atau pembaruan sistem politik, ekonomi, atau sosial dengan tujuan memperbaiki kondisi yang ada.

---

**A**

adaptabilitas · 55  
akademik · 37  
aksesibilitas · 44, 45

---

**D**

distribusi · 43, 44, 64, 181  
domestik · 41, 55

---

**E**

*e-commerce* · 10  
ekonomi · 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11,  
14, 15, 34, 35, 40, 41, 42, 44,  
46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 59,  
60, 64, 83, 98, 103, 105, 107,  
110, 128, 129, 130, 131, 152,  
156, 157, 172, 188, 194, 206  
emisi · 2, 13, 46, 47  
entitas · 28  
etnis · 11, 16, 17, 18, 19, 56,  
84, 85, 95, 97, 98, 99, 100,  
102, 103, 105, 119, 178, 179,  
180, 181, 182, 189, 206

---

**F**

finansial · 93, 119, 121, 128,  
129, 174, 188  
fintech · 10  
fiskal · 46, 47  
fleksibilitas · 63, 81, 105  
fluktuasi · 47  
fundamental · 59, 100, 127

---

**G**

geografis · 166  
globalisasi · 8, 60

---

**H**

hoaks · 16, 17, 18, 21, 27, 28,  
56, 86, 90, 99, 116, 117, 122,  
133, 134, 135, 136, 137, 138,  
139, 140, 142, 143, 144, 145,  
162, 166, 167, 168, 169, 170

---

**I**

implikasi · 29, 127, 153  
inflasi · 41  
informasional · 130  
infrastruktur · 2, 6, 7, 8, 10, 14,  
20, 35, 39, 40, 41, 44, 45, 46,

47, 52, 57, 59, 60, 64, 102,  
187  
inklusif · 1, 4, 7, 10, 11, 12, 15,  
18, 19, 20, 26, 29, 30, 34, 35,  
37, 41, 44, 51, 53, 57, 59, 86,  
87, 89, 93, 94, 95, 97, 98, 99,  
100, 101, 102, 103, 105, 107,  
109, 110, 111, 112, 115, 118,  
119, 120, 148, 165, 172, 175,  
176, 179, 180, 181, 182, 184,  
186, 187, 188, 190, 192, 193  
inovatif · 9, 37, 39, 69, 70, 96,  
165  
integrasi · 11, 24, 100  
integritas · 5, 28, 30, 40, 56, 58,  
60, 73, 77, 85, 87, 89, 90, 96,  
99, 109, 116, 117, 118, 120,  
121, 122, 124, 125, 127, 128,  
130, 131, 132, 133, 134, 137,  
138, 142, 150, 152, 153, 155,  
157, 166, 176, 193  
interaktif · 71, 141, 163, 165  
investasi · 2, 3, 7, 8, 10, 41, 42,  
45, 47, 59, 88, 105  
investor · 3, 105

---

## **K**

kolaborasi · 30, 32, 59, 95, 99,  
107, 108, 109, 110, 111, 112,  
135, 139, 142, 147, 165, 167,  
169, 171, 174, 187, 188  
komprehensif · 2, 29, 33, 48,  
88, 107, 110, 111, 123, 129,  
131, 136, 146, 150, 158, 191  
konkret · 12, 13, 19, 21, 42, 50,  
51, 69, 70, 103, 120, 163,

169, 176, 183, 190, 191, 193,  
194

---

## **M**

manipulasi · 4, 20, 30, 118,  
124, 128, 168, 172, 194  
manufaktur · 10, 14

---

## **N**

negosiasi · 9, 58, 59, 105, 106,  
107, 108, 112, 174

---

## **O**

otoritas · 73, 75, 76, 77, 80, 189

---

## **P**

politik · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,  
35, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 49,  
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,  
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66,  
67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 77,  
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,  
86, 87, 89, 90, 92, 93, 95, 96,  
97, 98, 99, 100, 101, 102,  
103, 104, 105, 106, 107, 108,  
109, 110, 111, 112, 113, 114,  
115, 116, 117, 118, 119, 120,  
121, 122, 123, 124, 127, 128,  
129, 130, 131, 132, 133, 134,  
140, 141, 142, 143, 145, 146,  
150, 151, 152, 153, 154, 155,  
161, 171, 172, 174, 175, 176,

177, 178, 179, 180, 181, 182,  
183, 184, 186, 188, 189, 190,  
191, 192, 193, 194, 205, 206,  
212

---

## **R**

rasional · 134, 136  
real-time · 63, 141  
regulasi · 9, 17, 29, 32, 43, 47,  
56, 89, 90, 93, 112, 116, 117,  
132, 133, 139, 140, 142, 145,  
147, 148, 159, 194  
relevansi · 42, 69, 154

---

## **S**

siber · 48  
stabilitas · 3, 4, 5, 9, 23, 24, 26,  
28, 30, 37, 40, 41, 46, 51, 56,

57, 58, 60, 95, 104, 105, 106,  
107, 109, 111, 112, 113, 114,  
116, 117, 142, 144, 171, 174,  
180, 181, 182, 183, 184, 186,  
187, 188, 190, 192  
syariah · 25

---

## **T**

transformasi · 1, 45, 47, 173  
transparansi · 5, 22, 23, 33, 53,  
56, 59, 99, 108, 109, 122,  
124, 125, 131, 148, 159, 160,  
191, 193

---

## **W**

*workshop* · 31, 82, 114, 136,  
161, 163, 164, 166, 169



# 2024

## BIOGRAFI PENULIS



**Dr. Muhtar, S.Sos., M.A.**

Lahir di Nepa-Nepa Sulawesi Tenggara, pada 11 November 1973. Sarjana Ilmu Pemerintahan diperoleh dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura Ambon 1997 dan Master of Art (M.A) pada bidang Ilmu Politik di peroleh dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta tahun 2008.

Saat ini (2023) sedang menempuh S3 (Doktoral) pada bidang Ilmu Sosial konsentrasi Ilmu Politik FSIP Undip Semarang. Sejak tahun 2004, Muhtar aktif mengajar pada program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura Ambon. Tahun 2013-2014 serta 2014-2018 menjadi Kepala Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura Ambon.

Buku Referensi

# PILPRES 2024

ARENA PERTEMPURAN NARASI MENGGALI PERAN AGAMA,  
POLITIK DAN MEDIA DALAM MENANGKAL POLARISASI

Buku referensi “PILPRES 2024: Arena Pertempuran Narasi Menggali Peran Agama, Politik, dan Media dalam Menangkal Polarisasi” membahas analisis mendalam tentang kompleksitas Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia. Melalui pembahasan peran agama, strategi politik, dan pengaruh media, buku referensi ini mengungkap bagaimana narasi dan dinamika kekuatan sosial-politik membentuk lanskap demokrasi. Dengan studi kasus aktual dan strategi untuk meredam polarisasi, buku referensi ini menjadi panduan penting bagi akademisi, praktisi politik, dan masyarakat umum yang ingin memahami serta terlibat secara konstruktif dalam proses politik yang semakin kompleks.



 [mediapenerbitindonesia.com](http://mediapenerbitindonesia.com)  
 +6281362150605  
 Penerbit Idn  
 @pt.mediapenerbitidn

